

**PENERAPAN KONSEP *COMMUNITY BASED*
TOURISM DALAM PENGELOLAAN DAYA
TARIK WISATA BERKELANJUTAN**

**(STUDI PADA DESA WISATA BANGUN KECAMATAN
MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

NENO RIZKianto

NIM. 135030800111014



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PARIWISATA
MALANG**

2017

MOTTO

“Dunia ini bagai samudera dimana banyak ciptaan-Nya yang tenggelam. Maka jelajahilah dunia ini dengan menyebut nama Allah SWT. Jadikan ketakutanmu pada Allah sebagai kapal yang menyelamatkanmu. Kembangkanlah keimanan sebagai layarmu, logika sebagai pendayung kapalmu, ilmu pengetahuan sebagai nahkoda perjalananmu, dan kesabaran sebagai jangkar dalam setiap badai cobaanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“Sepiro Gedhene Sengsara, Yen Tinompo Amung Dadi Coba”

(Raden Mas Imam Koessoepangat)

“Jatuh dalam lubang keterpurukan itu wajar. Bangkit dan melompatlah. Ada cahaya yang harus diraih dan disinarkan. Itulah cara Si Dalang mendewasakan para wayang-Nya”

(Neno Rizkianto)

**KUPERSEMBAHKAN KARYAKU
PADA ORANG TUAKU TERCINTA
DAN
UNTUK KEMAJUAN DESA WISATA BANGUN**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Konsep *Community Based Tourism* Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)

Disusun oleh : Neno Rizkianto

NIM : 135030800111014

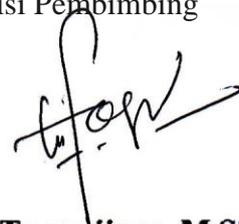
Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Pariwisata

Konsentrasi/Minat : Destinasi

Malang, 5 Oktober 2017

Komisi Pembimbing



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Oktober 2017

Jam : 09.30-11.00 WIB

Skripsi atas nama : Neno Rizkianto

Judul : Penerapan Konsep *Community Based Tourism* Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota

Edriana Pangestati, SE, M.Si, DBA
NIP. 19770321 200312 2 001

Anggota

Dr. Ari Darmawan, S.AB, M.AB
NIP. 2012018009141001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No.20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, 5 Oktober 2017



Nama : Neno Rizkianto

NIM : 135030800111014

RINGKASAN

Neno Rizkianto, 2017, **Penerapan Konsep *Community Based Tourism* Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)**. Drs. Topowijono, M.Si.

Desa Wisata Bangun merupakan desa wisata rintisan yang masuk dalam kategori desa wisata berpotensi yang masyarakatnya memiliki antusias tinggi dalam mengelola daya tarik wisata yang ada di dalamnya. Konsep CBT (*Community Based Tourism*) yang diterapkan untuk mencapai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan diaplikasikan dalam bentuk partisipasi masyarakat lokal, pembentukan kelembagaan desa wisata, pengelolaan daya tarik wisata berwawasan lingkungan dan terciptanya kegiatan usaha masyarakat. Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun melibatkan seluruh *stakeholders* atau pemangku kepentingan pariwisata. *Stakeholders* terkait yang terlibat dalam pengelolaan daya tarik wisata terdiri dari kelompok masyarakat, pemerintah dan pihak swasta yang memiliki perannya masing-masing untuk menciptakan pengelolaan daya tarik wisata yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan model *Community Based Research* sebagai sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka. Rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti ada dua, yaitu: (1) bagaimana penerapan konsep CBT yang dilakukan oleh Lembaga Desa Wisata Bangun dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan? (2) Bagaimana peran yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan? Sumber data penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD (*Focus Group Discussion*). Analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun muncul dari inisiatif masyarakat lokal yang memiliki kesadaran bersama bahwa desanya memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan, masyarakat menyepakati pembentukan lembaga desa wisata, pembuatan program pengelolaan Air Terjun Wonoasri sebagai daya tarik utama dan munculnya kegiatan usaha masyarakat sebagai dampak dari pengelolaan daya tarik wisata.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran kepada Ladewi Bangun dan kelompok masyarakat yang terlibat lainnya untuk meningkatkan koordinasi dan pembuatan rencana program yang tertulis, kepada pemerintah untuk pendampingan yang terarah dan berkelanjutan dan kepada pihak swasta untuk lebih mendorong pengelolaan yang memberikan sumber penghasilan kepada masyarakat.

Kata kunci: CBT, desa wisata, pariwisata berkelanjutan

SUMMARY

Neno Rizkianto, 2017, **Community Based Tourism Concept Application in the Management of Attraction Sustainability (Study on Bangun Tourism Village in Munjungan District, Trenggalek)**. Drs. Topowijono, M.Si.

Bangun tourism village was a created tourism village that was categorized as a potential tourism village where the local communities in there have a high enthusiasm in managing the attractions. The CBT concept (*Community Based Tourism*) that is applied to achieve a sustainable tourism management were applied in the forms of local community participation, tourism village institute creation, environmental based tourism attractions management and the creation of small business activities by the locals. Tourism attraction management in Bangun tourism village involves every tourism stakeholders. The stakeholders that were related in the tourism attraction management consisted from local communities, government and the private sector with their respective roles to create a sustainable tourism attraction management.

This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research, using community based research as a commitment from the locals to provide a strength support, resource, and also an involvement in the research process in order to create a research product that will be useful for them. There are two problem formulations that were studied by the researcher, which are (1) How is the application of CBT concept that was done by the institute of Bangun tourism village in the management of sustainable tourism attraction (2) How is the roles of the stakeholders regarding the management of sustainable tourism attraction. The data resource of this research were in the forms of primary and secondary data with a data collection that was done through observation, interview, documentations and FGD (Focus Group Discussion). The data analysis uses stages which are data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing.

The result of this research shows that the management of tourism attraction in Bangun Tourism Village appears from the initiative of the locals with a mutual consciousness that their village has a potential on tourism sector which can be developed more, the locals has agreed on the creation of tourism village institute, the creation of Wonoasri waterfall management priority program as the main attraction and the emergence of community business activities as a result of the tourism attraction management.

Based on the results, the researcher gives an advice to Ladewi Bangun and any other related local communities to improve the coordination and to make a written program planning, to the government for a targeted and sustained assistance, and for the private sector to further encourage a management that provide a source of income to the community.

Key Words: CBT, Tourism Village, Sustainable Tourism

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Konsep *Community Based Tourism* Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Pariwisata Universitas Brawijaya.

Proses penelitian ini melewati dimensi ruang waktu yang cukup panjang. Diawali dari bentuk misi sosial pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh peneliti sebagai wujud rasa kecintaan terhadap tanah kelahiran Trenggalek dan tanggung jawab moral terhadap ilmu kepariwisataan yang telah peneliti dapatkan di perkuliahan. Pengabdian masyarakat tersebut peneliti terapkan di sebuah desa pelosok bernama Desa Bangun bersama kawan-kawan komunitas Aku Tresno Trenggalek yang semula masyarakat tidak mengenal pariwisata sampai akhirnya mereka mampu mengelola potensi wisata yang dimiliki. Sebuah rasa kebanggaan dan kepuasan batin yang tak terkirakan bahwa peneliti telah ikut andil memberikan kontribusi dalam pembangunan pariwisata sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari aktivitas pariwisata tersebut.

Hasil penelitian ini menjadi naskah tertulis saksi perjalanan peneliti dan masyarakat Desa Bangun untuk bergerak mewujudkan cita-cita bersama merintis

Desa Wisata Bangun. Sebagai sebuah karya, terlalu naif bila mengatakan hasil penelitian ini merupakan karya peneliti seorang diri. Banyak sekali sumbangan ide, pemikiran dan gagasan yang diberikan oleh berbagai pihak yang pada akhirnya ikut andil sehingga terwujudnya karya ini antara lain para dosen, guru, keluarga, rekan sejawat, para informan lapangan, para tukang foto kopi dan lain-lain. Di ruang yang mulia ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. **Allah SWT** yang berkat Ridho-Nya memberikan arahan, tuntunan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Kedua orang tua** yang telah berjuang keras penuh kesabaran memberikan bimbingan dan dukungan kepada anaknya yang bandel ini untuk menuntut ilmu hingga anaknya bisa menjadi seperti saat ini.
3. **Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS** selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. **Bapak Yusri Abdillah, S.Sos, M.Si, Ph. D** selaku Ketua Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. **Bapak Drs. Topowijono, M.Si** selaku dosen pembimbing sekaligus peneliti anggap sebagai orang tua peneliti sendiri yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan bentuk kasih sayang berupa motivasi, perhatian dan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. **Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya** yang memberikan ilmu dan pengetahuan terkait kepariwisataan selama perkuliahan serta **seluruh karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya** yang telah

membantu kebutuhan mahasiswa selama masa perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.

7. **Seluruh masyarakat Desa Bangun** yang telah menerima peneliti untuk mengadakan pengabdian masyarakat, menjadikan Desa Bangun sebagai Laboratorium Hidup bagi peneliti dan menjadi keluarga baru bagi peneliti
8. **Kawan-kawan Aku Tresno Trenggalek** yang dengan semangatnya menyiarkan spirit “*Tresno Nggalek*” menjadi motivasi peneliti untuk melakukan pengabdian masyarakat di Desa Bangun hingga terciptanya karya ini.
9. **Keluarga Besar ASIDEWI Indonesia** yang menjadi wadah pembelajaran bagi peneliti untuk lebih mendalami ilmu kepariwisataan di lapangan dan selalu membimbing peneliti untuk berkarya di desa wisata.
10. **Keluarga Besar Disparbud Kabupaten Trenggalek** yang menjadi rumah peneliti dalam menyampaikan ide dan keluh kesah terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek.
11. **Keluarga Besar Bisnis Pariwisata angkatan 2013** yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
12. **Semua pihak yang belum peneliti sebutkan** yang telah menjadi bagian hidup dari perjalanan peneliti mengarungi dunia kepariwisataan.

Malang, 5 Oktober 2017

Peneliti



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Toeritis	21
1. Pengertian Pariwisata	21
2. Pengertian Daya Tarik Wisata	28
3. Kepariwisataaan Sebagai Sistem	31
4. Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan ...	37
5. Konsep <i>Community Bassed Tourism</i>	46
6. Tata Kelola Desa Wisata	53
C. Kerangka Pemikiran	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	66
B. Fokus Penelitian	68
C. Lokasi dan Situs Penelitian	69



D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Instrumen Penelitian	73
G. Analisis Data	74
H. Keabsahan Data	76

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum	77
1. Wilayah administrasi	78
2. Klimatologi	80
3. Pola penggunaan tanah	80
4. Kependudukan	81
5. Potensi Desa Wisata Bangun	84
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	99
1. Penerapan konsep CBT	99
a) Partisipasi masyarakat lokal	100
b) Pembentukan kelembagaan desa wisata	105
c) Pengelolaan berwawasan lingkungan	114
d) Terciptanya kegiatan usaha masyarakat	121
2. Peran <i>stakeholders</i> terkait	125
a) Peran masyarakat sebagai pelaku	125
b) Peran pemerintah sebagai fasilitator	130
c) Peran swasta sebagai pengembang/investor ..	135
C. Pembahasan Hasil Penelitian	139
1. Penerapan konsep CBT	139
a) Partisipasi masyarakat lokal	142
b) Pembentukan kelembagaan desa wisata	150
c) Pengelolaan berwawasan lingkungan	157
d) Terciptanya kegiatan usaha masyarakat	166
2. Peran <i>stakeholders</i> terkait	173
a) Peran masyarakat sebagai pelaku	174
b) Peran Pemerintah sebagai fasilitator	180

c) Peran swasta sebagai investor	187
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	192
B. Saran	196
DAFTAR PUSTAKA	199



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Pariwisata Berdasarkan Dimensi	27
2.	Tahap Perencanaan dan Pengimplementasian Pengembangan Desa Wisata	63
3.	Pola Penggunaan Lahan Desa	81
4.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	82
5.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	83
6.	Jumlah Penduduk Tenaga Kerja Produktif	83
7.	Potensi Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Komoditas	84
8.	Potensi Luas Lahan Perkebunan Berdasarkan Komoditas	85
9.	Banyaknya Jenis Populasi Ternak	86
10.	Klasifikasi tahap pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Bangun	148
11.	Tugas Lembaga desa wisata bangun	156
12.	Penerapan daya tarik wisata berwawasan lingkungan	165
13.	Kegiatan usaha masyarakat yang muncul	172
14.	Peran masyarakat Desa Bangun sebagai subjek	179
15.	Peran pemerintah sebagai fasilitator	186
16.	Peran swasta sebagai investor	190

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Komponen Sistem Kepariwisata	33
2.	Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata	47
3.	Kerangka Pemikiran	65
4.	Peta Desa Bangun	78
5.	Air Terjun Wonoasri	89
6.	Air Terjun Jurug Tundo	90
7.	Seni Tari Gandhong	92
8.	Tari Turonggo Yakso	94
9.	Seni Tayub	95
10.	Kebun Durian Bangun	97
11.	Panen Raya Cengkeh	99
12.	Kerja bakti awal pembukaan Air Terjun Wonoasri	101
13.	Pemerintah Desa Bangun mendukung kerjabakti	102
14.	Perjanjian kerjasama pengelolaan	104
15.	Kepengurusan Ladewi Bangun	109
16.	SK Pembentukan Ladewi Bangun	112
17.	Kondisi Air Terjun Wonoasri	116
18.	Zona perekonomian	117
19.	Zona daya tarik wisata pendukung	118
20.	Zona inti (daya tarik utama)	120
21.	Kegiatan usaha masyarakat	123
22.	Kerjabakti seluruh kelompok masyarakat	127
23.	Kunjungan Disparbud Kab. Trenggalek	132
24.	Fasilitas hibah dari masyarakat	138

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Pedoman wawancara	204
2.	Bukti observasi dan wawancara	206
3.	Transkrip wawancara.....	208
4.	Daftar riwayat hidup	218



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata saat ini merupakan bentuk nyata dari perjalanan sebuah bisnis global yang sangat menjanjikan karena diperkirakan akan menjadi sebuah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang dihasilkan dari pergerakan wisatawan. Data WTO (*World Tourism Organization*) memberikan gambaran nyata tentang hal tersebut. Tahun 1995 tercatat jumlah pergerakan wisatawan dunia hanya sebesar 565 juta wisatawan dengan pembelanjaan total sebesar USD 401 miliar. Pada tahun 2020 diperkirakan akan terjadi pergerakan sebanyak 1,6 miliar wisatawan dengan total pembelanjaan sebesar USD 2.000 miliar atau dengan perkiraan pembelanjaan rata-rata sebesar lebih dari USD 5 miliar per hari (Hermantoro, 2011:17).

Dari pergerakan wisatawan dunia tersebut, pariwisata dipandang sebagai peluang bisnis yang besar. Hal ini dikarenakan pariwisata tidak hanya menjadi bisnis tunggal yang berdiri sendiri, melainkan memiliki *multiplier effect* (efek pengganda) yang membutuhkan, serta akan menghasilkan *impact* (pengaruh yang kuat) terhadap beberapa sektor lain. Sektor tersebut misalnya penyedia jasa pelayanan transportasi, akomodasi, *food and beverage* (makanan dan minuman), dan bahkan pada penyediaan produk budaya dan kreativitas lokal (Hermantoro, 2011:18).

Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Menurut Murphy dalam Rahim (2012:2) menyatakan bahwa pemangku kepentingan dalam pariwisata meliputi 3 (tiga) pihak yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan peran dan fungsinya masing-masing. Pemangku kepentingan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus saling bersinergi untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati.

Sunaryo (2013:218) mengatakan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata. Mulai dari kerangka perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan, dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, potensi, dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat agar semakin memiliki kapasitas dan kemandirian, serta berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional dan nasional. Salah satu konsep yang menjelaskan peranan masyarakat tersebut dalam pembangunan pariwisata adalah *Community Based Tourism* (CBT).

Secara konseptual, prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat kepariwisataan sebesar-besarnya diprioritaskan keberuntukkannya bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di kawasan pembangunan pariwisata. Konsep CBT ini lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata untuk melakukan mobilisasi komunitas agar berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebagai patner industri pariwisata. Tujuannya adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas itu sendiri, dan meletakkan nilai lebih dalam berpariwisata, khususnya kepada para wisatawan (Hermantoro, 2011:130).

Pada saat ini, perkembangan tren perjalanan wisatawan ditandai dengan munculnya motivasi dan pola perjalanan wisata baru yang dilakukan oleh wisatawan, khususnya pada segmen pasar wisatawan yang sudah matang dan berpengalaman (*mature market*), dan yang berpendidikan serta memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu konservasi lingkungan dan pemberdayaan pada komunitas serta budaya lokal. Perubahan yang dimaksud adalah terkait dengan perubahan kecenderungan dari motivasi dan pola perjalanan wisata yaitu dari wisata masal (*mass tourism*) ke arah wisata alternatif (*alternative tourism*). Hal ini sebagai bentuk penyeimbang terhadap perkembangan wisata masal yang begitu pesat dan dipandang kurang ramah

terhadap lingkungan serta kurang berpihak kepada komunitas lokal (Kemenpar, 2016:1).

Perubahan motivasi dan pola perjalanan wisatawan tersebut secara otomatis mendorong pola konsumsi wisatawan tidak lagi terfokus pada 3S (*Sun, Sea, and Sand*), namun berkembang lebih luas pada beragam jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada apresiasi terhadap alam atau budaya lokal dengan tujuan atau motivasi untuk pengkayaan wawasan, petualangan, dan proses pembelajaran. Bentuk wisata alternatif tersebut seperti wisata petualangan (*adventure tourism*), *hiking, trekking, bird watching, wild life viewing*; wisata pedesaan (*village tourism*), dan sebagainya. Bentuk-bentuk kegiatan wisata alternatif perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan daya tarik wisata di Indonesia, khususnya terkait dengan keragaman budaya dan keunikan alam. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka pengembangan wisata pedesaan (*village tourism*) atau desa wisata (*tourism village*) sebagai aset pariwisata menjadi alternatif yang dipandang sangat strategis untuk menjawab sejumlah agenda dalam pembangunan kepariwisataan.

Pengembangan desa wisata akan dapat mendorong berbagai upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi keunikan berupa budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di masyarakat yang cenderung mengalami ancaman kepunahan akibat arus globalisasi yang sangat gencar dan telah memasuki wilayah pedesaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan

terdapatnya pelibatan atau partisipasi masyarakat setempat, pengembangan mutu produk wisata pedesaan, serta pembinaan kelompok pengusaha setempat. Pemodelan desa wisata bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan harus terus secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas yang baru bagi desa (Nugroho dkk, 2014:6).

Menurut Yuwono (2015) menjelaskan bahwa pengembangan wisata pedesaan dan desa wisata berjalan begitu pesat dan menyebar di hampir seluruh wilayah provinsi di Indonesia, terlebih dengan adanya dorongan program PNPM Mandiri Pariwisata pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014. Pada periode berikutnya pemerintahan presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah tingkat desa memiliki otonomi sendiri untuk mengelola sumber daya dan arah pembangunannya. Melalui regulasi tersebut akhirnya banyak desa wisata baru bermunculan di berbagai daerah yang mencoba untuk menangkap peluang perkembangan kepariwisataan serta minat pasar untuk mencari destinasi wisata alternatif dalam hal ini desa wisata.

Berkaitan dengan pengembangan desa wisata, Analisis Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) menyatakan bahwa Indonesia mempunyai kekuatan dalam pengembangan potensi desa wisata. Melalui pengembangan pariwisata berbasis desa ini tidak hanya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia, tetapi juga memberikan dampak pemerataan pembangunan hingga tingkat desa dan mengangkat perekonomian masyarakat. Dengan adanya

dampak yang cukup signifikan tersebut, saat ini keberadaan desa wisata di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Menurut Arif Yahya selaku Menteri Pariwisata Republik Indonesia tahun 2016, Desa-desa di Indonesia yang potensial menjadi desa wisata ternyata sangat banyak. Untuk kategori desa wisata bahari, jumlahnya mencapai 787 desa. Kategori Desa Wisata Sungai, jumlahnya mencapai 576 desa. Desa Wisata Irigasi, angkanya menembus 165 desa. Dan Desa Wisata Danau, jumlahnya mencapai 374 desa (liputan6.com).

Hingga kini, pengembangan dan pertumbuhan desa wisata menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Bukti konkrit dari hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembentukan kebijakan pengembangan pariwisata di Jawa Timur telah membentuk Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI) Provinsi Jawa Timur guna untuk mengakomodir dan memberikan wadah pemberdayaan kepada seluruh pengelola desa wisata di Jawa Timur pada tahun 2011. Andi Yuwono (2017), yang merupakan Ketua ASIDEWI Jawa Timur menyatakan, bahwa semangat masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan pariwisata sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan, terhitung hingga saat ini melalui wadah ASIDEWI, desa wisata yang telah terdata baik yang sedang berkembang maupun sudah mapan berjumlah 54 desa wisata. Dari data yang didapat tersebut, terdapat salah satunya Kabupaten Trenggalek yang memiliki 3 desa wisata berkembang yang telah tercatat menjadi desa wisata binaan ASIDEWI

bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang pada saat ini telah menggalakkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dalam mendorong pembangunan wilayah.

Penggalakan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Trenggalek ditunjukkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 yang telah disusun dengan *tagline* “*Trenggalek Southern Paradise*”, bahwa pariwisata masuk dalam 5 prioritas pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Trenggalek. Program pembangunan desa wisata dimasukkan dalam 10 program kerja pilihan yang mendapatkan perhatian lebih daripada sektor yang lainnya. RPJMD tersebut memprioritaskan 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Watulimo, dan Kecamatan Munjungan yang masing-masing wilayah memiliki ciri keunikan berbeda untuk dijadikan sebagai *leading sector* dalam pembangunan desa wisata di Kabupaten Trenggalek.

Dari ketiga kecamatan yang menjadi prioritas pembangunan pariwisata, Kecamatan Munjungan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pesisir selatan Kabupaten Trenggalek yang juga dikenal sebagai daerah yang khas dan kaya dengan beragam potensi alam maupun budaya dan kearifan lokal. Bentang dan kontur alam yang elok berupa rentetan pegunungan dan garis pantai yang luas, sehingga menjadi potensi tujuan wisata alam yang menarik. Kecamatan Munjungan memiliki potensi budaya berupa keramahan

(*amenity*) penduduk, adat istiadat, tradisi gotong royong yang tinggi, dan berbagai kesenian yang masih terjaga keasliannya, serta hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Berbagai potensi tersebut telah menjadi *icon* Kecamatan Munjungan yang sekaligus merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang perlu dikembangkan dengan konsep yang tepat, dengan mempertahankan kearifan budaya lokal (*local wisdom*), partisipatif, dan keberkelanjutan (*sustainable development*). Mengingat bahwa potensi alam, budaya, dan kearifan lokal yang khas tersebut tersebar hampir di sebagian besar wilayah Kecamatan Munjungan, maka kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam konsep desa wisata (*village tourism*).

Konsep Desa Wisata menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Trenggalek adalah suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan (RIPPDA:2016). Desa wisata juga dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis serta terencana sehingga siap untuk menerima kunjungan wisata.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti (2016), Kecamatan Munjungan memiliki desa-desa yang berkarakter unik, masyarakatnya sangat menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dan memiliki keramah tamahan yang tinggi. Hampir keseluruhan desa memiliki ciri khas

yang sama yaitu berada di daerah pesisir tetapi suasana kesejukannya masih terjaga karena masih lebatnya hutan yang mengitari desa-desa di Kecamatan Munjungan. Diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Munjungan, terdapat salah satu desa yang masyarakatnya memiliki antusias tinggi untuk mengembangkan desanya melalui sektor pariwisata. Antusias masyarakat juga diimbangi dengan potensi wisata yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa yang memiliki potensi wisata dan antusias masyarakat yang tinggi tersebut adalah Desa Bangun yang pada tahun 2016 masyarakat sekitar mendeklarasikan diri untuk merintis Desa Wisata Bangun.

Desa Bangun merupakan desa wisata yang masuk dalam kriteria berpotensi dan menuju ke arah berkembang dibuktikan melalui partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam mengelola daya tarik wisata yang ada di sana dan pendampingan langsung yang dilakukan oleh ASIDEWI Kabupaten Trenggalek, yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Desa Wisata Bangun memiliki beberapa keunikan daya tarik wisata baik alam, kearifan lokal maupun budaya masyarakat setempat. Menurut Pemerintah Desa Bangun (2016), seluruh daya tarik wisata tersebut dikelola oleh Lembaga Desa Wisata (Ladewi) Bangun yang bekerjasama dengan Perhutani dan seluruh komponen masyarakat setempat.

Desa Wisata Bangun menawarkan suasana alam pedesaan yang alami dan masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan budaya ramahtamah. Daya tarik wisata alam yang mulai dikelola oleh masyarakat melalui wadah Ladewi Bangun adalah Air Terjun

Wonoasri dan Air Terjun Jurug Tundo serta daya tarik wisata budaya dengan menghidupkan kesenian khas Desa Bangun yang telah lama punah yang bernama Tari Gandhong.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti, banyak daya tarik wisata yang berpotensi untuk dikelola, namun karena pemahaman masyarakat desa masih awam tentang kepariwisataan maka menyebabkan pengelolaan daya tarik wisata tersebut berjalan lambat dan belum memiliki arah pengelolaan yang jelas sesuai kaidah-kaidah keberlanjutan. Ladewi Bangun sebagai wadah masyarakat dalam mengelola seluruh daya tarik wisata, saat ini belum memiliki konsep perencanaan yang matang dibuktikan dari pengelolaannya yang lambat dan tidak memiliki arah. Ladewi Bangun bersama *stakeholders* terkait perlu membuat arah pengelolaan yang jelas sehingga pembangunan desa wisata di Desa Bangun dapat terus berkelanjutan sehingga ke depan tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Desa wisata menjadi suatu bentuk wisata alternatif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat. Tentunya pengelolaan desa wisata tersebut harus terarah sesuai dengan kaidah-kaidah keberlanjutan dan antar pemangku kepentingan harus bekerjasama satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pengembangan Desa Wisata Bangun dalam bentuk skripsi yang berjudul “Konsep *Community Based Tourism* dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *Community Based Tourism* yang dilakukan oleh Lembaga Desa Wisata Bangun dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan?
2. Bagaimana peran yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan di Desa Wisata Bangun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan konsep *Community Based Tourism* yang dilakukan oleh Lembaga Desa Wisata Bangun dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan.
2. Mengetahui peran yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan di Desa Wisata Bangun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah;

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan peneliti dalam mengkonsep pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam penelitian selanjutnya terkait pengelolaan daya tarik wisata di sebuah desa wisata.
- d. Memberikan pedoman dan petunjuk terhadap pengelolaan daya tarik wisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat di sebuah desa wisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam daya tarik wisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini bagi Lembaga Desa Wisata Bangun dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola daya tarik wisata yang berkelanjutan di Desa Wisata Bangun.
- c. Meningkatkan semangat masyarakat setempat yang tergabung dalam wadah Lembaga Desa Wisata Bangun untuk berkontribusi dalam pembangunan desa melalui konsep berkelanjutan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk membantu memperjelas dalam memahami isi penelitian ini, adapun susunannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang tren perkembangan pariwisata global yang mengarah ke bentuk wisata alternatif berupa konsep desa wisata berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta ditutup dengan sistematika pembahasan yang akan menguraikan secara singkat isi dalam penelitian ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang mendukung untuk dijadikan landasan ilmiah yang berkaitan dengan judul dan keseluruhan permasalahan yang akan diteliti, yang dalam penelitian ini berfokus peran komunitas atau masyarakat dalam pengelolaan sebuah desa wisata dengan menggunakan konsep *Community Based Tourism* dan akhirnya tata kelola atraksi wisata di desa wisata tersebut dapat berkelanjutan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kemudian peneliti juga menjelaskan tentang fokus penelitian tentang hal-hal yang diteliti, lokasi dan situs penelitian yang dilakukan, sumber data yang akan

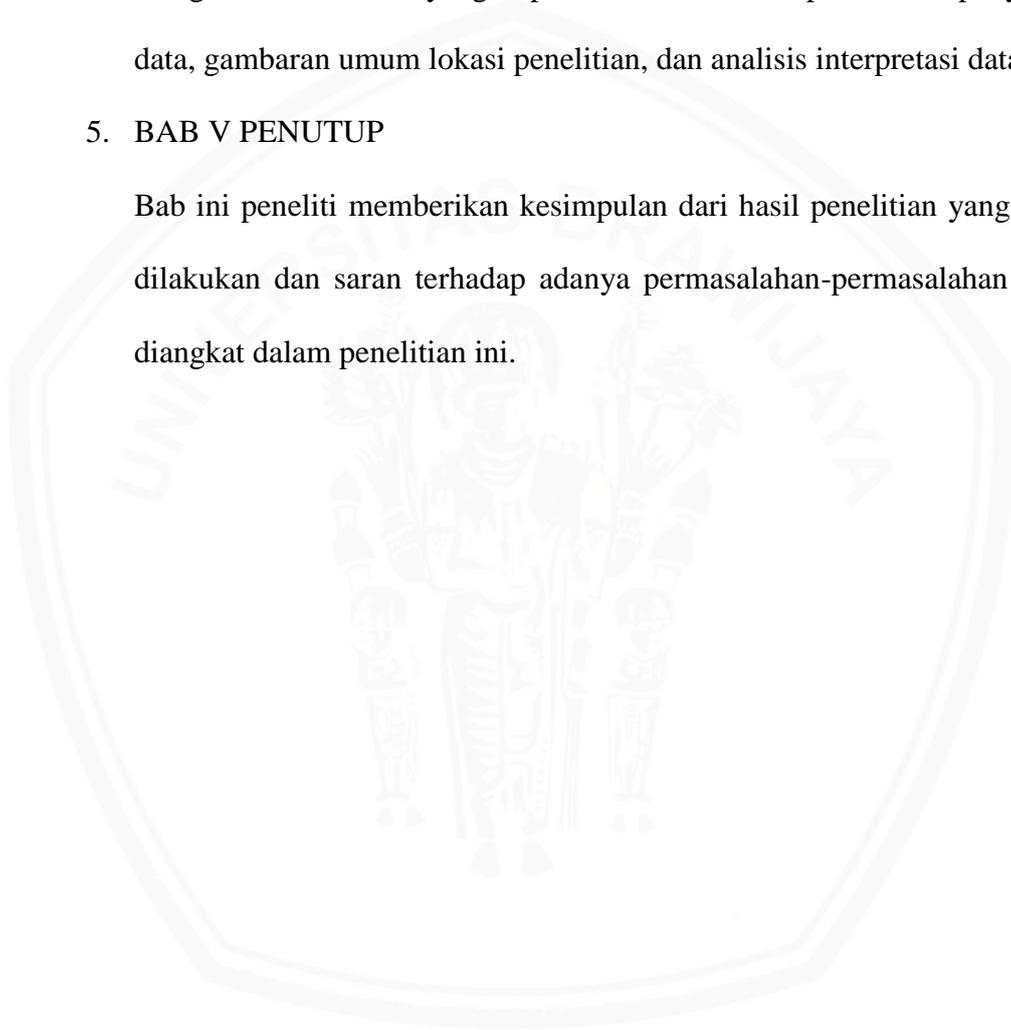
diperoleh , teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data dan keabsahan data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menyajikan diskripsi wilayah penelitian dan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data, gambaran umum lokasi penelitian, dan analisis interpretasi data.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran terhadap adanya permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman, dasar pertimbangan, maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka berfikir yang jelas. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengarahkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul peneliti. Melalui penelitian terdahulu dapat memperkaya sumber referensi pada penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini antara lain:

1. Achmadi dan Agie (2016)

Penelitian ini berjudul “Analisis Sikap dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Desa Wisata”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mendasari sikap dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan di desa wisata dengan cara menggali variabel-variabel yang berhubungan dengan pembentukan desa wisata tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dirancang untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena, serta hubungan antar variabel yang diselidiki dalam pembentukan desa wisata. Untuk mencapai tujuan

didasar, metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif *cross sectional* dengan teknik korelasi antar variabel.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan mayoritas responden menyatakan sangat setuju pada sikap terutama pada sikap afektif yakni sebesar 52,1%. Untuk partisipasi sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dalam pembentukan Desa Wisata Cibuntu sebesar 65,8%. Untuk pembentukan desa wisata sebagian besar responden menyatakan sangat setuju pada transportasi yakni sebesar 54,2%.

2. Yuwono (2015)

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar”. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui proses penyebaran informasi tentang SK Tim Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar tentang penancangan desa Tulungrejo sebagai desa wisata dan harapan masyarakat Desa Tulungrejo terhadap hal tersebut, (2) untuk mengetahui langkah – langkah yang dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata Tulungrejo, (3) untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata di Desa Tulungrejo, serta hambatan - hambatan yang dialami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diawali dengan dicanangkannya Desa Tulungrejo sebagai desa wisata dengan diawali terbitnya Surat Keputusan dari Bupati Blitar. Setelah itu dilanjutkan proses sosialisasi dari

Pemerintah Kabupaten Blitar, Pemerintah Desa Tulungrejo, sampai pada masyarakat Desa Tulungrejo. Pada tahap selanjutnya, setelah mengetahui turunnya Surat Keputusan Bupati Blitar tentang pencangan Desa Tulungrejo sebagai Desa Wisata, mulai banyak elemen Desa Tulungrejo yang ikut berpartisipasi mulai dari Pemerintah Desa, BPD, Seniman setempat, Pengrajin, dan Karang Taruna. Partisipasi masyarakat juga ditandai dengan dibentuknya “Kelompok Sadar Wisata” (Pokdarwis) Desa Tulungrejo.

3. Purmada, dkk (2016)

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif *Community Based Tourism* (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”. Penelitian ini memiliki tiga tujuan penting. Pertama adalah menggambarkan proses pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah. Kedua, mengetahui penerapan *community based tourism* di Desa Wisata Gubugklakah dan yang ketiga adalah mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata.

Penelitian yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Untuk menbatasi lingkup studi peneliti memfokuskan pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah pada pengelolaan sumberdaya pariwisata, pengelolaan pemasaran pariwisata, pengelolaan sumberdaya manusia dan manajemen konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata, pemasaran, manajemen sumberdaya manusia, dan manajemen konflik. Penerapan *community based tourism* dilaksanakan melalui pelestarian alam, pelestarian budaya, jaminan tingkat partisipasi masyarakat dan pemerataan pendapatan. Tingkat partisipasi masyarakat berada dalam tingkatan dalam puncak tertinggi yaitu *citizen control*.

4. Hastosaptyandhan (2016)

Penelitian ini berjudul “Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menjelaskan komunikasi partisipatif dari Pokdarwis; (2) menganalisis hubungan antara karakteristik individu, kredibilitas fasilitator, dukungan kelembagaan dan komunikasi partisipatif; dan (3) menganalisis hubungan antara komunikasi partisipatif dari Pokdarwis dan pengelolaan gunung api purba Nglanggeran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif didesain menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk merangkum berbagai kondisi situasi ataupun berbagai variabel yang timbul di tempat penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menangkap dan mendeskripsikan realita di lapangan yang bisa melengkapi data dari pendekatan kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) Pokdarwis dapat menerima informasi baru, pengetahuan yang lebih tinggi, dan sangat termotivasi. Kejujuran, keahlian, daya tarik dan keakraban fasilitator dapat mendukung pengelolaan pariwisata yang lebih baik. Modal, sarana dan prasarana cukup untuk mendukung kegiatan pengelolaan wisata; 2) Ada hubungan yang signifikan dan positif antara karakteristik individu, kredibilitas fasilitator, dukungan kelembagaan dan komunikasi partisipatif, dan (3) Ada hubungan yang signifikan dan positif antara manajemen pariwisata dan komunikasi partisipatif.

5. Prafitri dan Damayanti (2016)

Penelitian ini berjudul “Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Ketenger, Banyumas)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan dalam pengembangan Desa Wisata Ketenger. Kapasitas yang diteliti meliputi kapasitas organisasi dan kapasitas individu dalam pengembangan Desa Wisata Ketenger. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat organisasi, organisasi telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan potensi wisata, serta aspek promosi desa wisata. Pada aspek kepemimpinan dan koordinasi, POKDARWIS “Ketenger *Adventure*” menunjukkan kapasitas yang

kurang baik. Pada tingkat individu, individu memiliki kapasitas yang baik dalam merintis pengembangan potensi wisata. Individu memiliki kapasitas yang cukup baik dalam pengelolaan atraksi wisata, pengelolaan cinderamata, serta pelayanan terhadap wisatawan. Namun individu memiliki kapasitas yang kurang baik dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep desa wisata. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Desa Ketenger telah mendapatkan program-program peningkatan kapasitas yang didakan baik dari Dinas Pariwisata maupun organisasi lainnya. Namun berdasarkan temuan studi tentang kapasitas insitutional masyarakat ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya program-program lanjutan untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti kebanyakan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat, langkah-langkah, proses pengelolaan desa wisata, dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata. Konteks dalam penelitian tersebut mayoritas subjek yang dikaji adalah peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ataupun Lembaga Desa Wisata (Ladewi) yang dibentuk anggota masyarakat yang merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di desa wisata. Selain itu, mayoritas objek yang dikaji dalam penelitian terdahulu adalah tentang desa wisata. Padahal di dalam desa wisata, komponen yang dikelola masih sangat

banyak seperti daya tarik wisata, akomodasi *homestay* ataupun warung makan, infrastruktur, fasilitas pendukung dan lembaga pengelolanya.

Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti memfokuskan peran Ladewi dalam mengelola salah satu dari komponen desa wisata yaitu daya tarik wisata. Tanpa menghilangkan peran komponen lain, bahwa daya tarik wisata adalah komponen utama yang harus dimiliki dalam sebuah desa wisata. Oleh karena itu, peran Ladewi dalam mengelola daya tarik wisata peneliti jadikan sebagai fokus utama agar dapat terus berkelanjutan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Afiandi dkk (2011:7) pengertian Pariwisata menurut definisi yang luas adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Smith and French dalam Afiandi dkk (2011:8) menjelaskan suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- a. Harus bersifat sementara
- b. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa.
- c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Kesimpulannya, pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya. Maksudnya bukan untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah. Definisi tentang pariwisata yang berkembang di dunia sangat beragam, multidimensi, dan sangat terkait dengan latar belakang keilmuan pencetusnya. Pada dasarnya, definisi-definisi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu yang melihat pariwisata dari sisi *demand* saja, sisi *supply* saja, dan yang sudah menggabungkan sisi *demand* dan *supply* (Afiandi dkk, 2011:7).

Kategori pertama merupakan definisi pariwisata yang didekati dari sisi wisatawan, sangat kental dengan dimensi spasial (tempat dan jarak). Kategori kedua merupakan definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi industri/bisnis, sedangkan kategori ketiga memandang pariwisata dari dimensi akademis dan sosial budaya. Adapun kategori tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

a. Dimensi Spasial

Definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi spasial merupakan definisi yang berkembang lebih awal dibandingkan definisi-definisi lainnya (Gartner, 1996). Dimensi ini menekankan definisi pariwisata pada pergerakan wisatawan ke suatu tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggal dan atau tempat kerjanya untuk waktu yang sementara,

seperti yang dikemukakan oleh Airey pada tahun 1981 (Smith and French, 1994):

“Tourism is the temporary short-term movement of people to destinations outside the places where they normally live and work, and their activities during their stay at these destinations”.

Selain pergerakan ke tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja, Airey menambahkan kegiatan wisatawan selama berada di destinasi pariwisata sebagai bagian dari pariwisata. Definisi pariwisata dari dimensi spasial ini di Indonesia didefinisikan sebagai kegiatan wisata, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1, yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

b. Dimensi Industri

Dari sisi *supply*, pariwisata lebih banyak dilihat sebagai industri/bisnis. Buku-buku yang membahas tentang definisi pariwisata dari dimensi ini merupakan buku dengan topik bahasan manajemen atau pemasaran. Definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi industri/bisnis memfokuskan pada keterkaitan antara barang dan jasa untuk memfasilitasi perjalanan wisata.

Seaton and Bennett (1996) dalam Afiandi dkk (2011:10) mendefinisikan pariwisata sebagai kumpulan usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk memfasilitasi kegiatan bisnis, bersenang-senang, dan memanfaatkan waktu luang yang dilakukan jauh dari lingkungan tempat tinggalnya.

“..the aggregate of all businesses that directly provide goods or services to facilitate business, pleasure, and leisure activities away from the home environment”.

Sementara itu, Smith and French (1994) dalam Afiandi dkk (2011:10) mendefinisikan pariwisata sebagai keterkaitan antara barang dan jasa yang dikombinasikan untuk menghasilkan pengalaman berwisata.

“..a series of interrelated goods and services which combined make up the travel experience”.

Definisi pariwisata sebagai industri/bisnis inilah yang di dalam Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 didefinisikan sebagai pariwisata, yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

c. Dimensi Akademis

Dimensi akademis, mendefinisikan pariwisata secara lebih luas, tidak hanya melihat salah satu sisi (*supply* atau *demand*), tetapi melihat keduanya sebagai dua aspek yang saling terkait dan mempengaruhi satu

sama lain. Pariwisata dari dimensi ini didefinisikan sebagai studi yang mempelajari perjalanan manusia keluar dari lingkungannya, juga termasuk industri yang merespon kebutuhan manusia yang melakukan perjalanan, lebih jauh lagi dampak yang ditimbulkan oleh pelaku perjalanan maupun industri terhadap lingkungan sosial budaya, ekonomi, maupun lingkungan fisik setempat. Definisi tersebut dikemukakan oleh Jafar Jafari, 1977 (Gartner, 1996).

“Tourism is a study of man away from his usual habitat, of the industry which responds to his needs and of the impacts that both he and the industry have on the host sociocultural, economic and physical environment”.

Definisi Jafar Jafari ini mengeliminasi dimensi spasial sebagai faktor pembatas perjalanan wisata. Definisi tersebut menyatakan bahwa begitu seseorang melakukan perjalanan meninggalkan lingkungannya (tempat tinggal, tempat kerja), dia sudah dinyatakan melakukan perjalanan wisata (Afiandi dkk, 2011:10).

d. Dimensi Sosial Budaya

Definisi pariwisata dari dimensi sosial budaya menitikberatkan perhatian pada:

Pertama, upaya memenuhi kebutuhan wisatawan dengan berbagai karakteristiknya, seperti definisi yang dikemukakan oleh Mathieson and Wall dalam Gunn (2002) berikut ini:

“Tourism is the temporary movement of people to destinations outside their normal places of work and residence, the activities undertaken during their stay in those destinations, and the facilities created to cater to their needs”.

Definisi lainnya juga dikemukakan oleh Chadwick dalam Afiandi dkk (2011:13) sebagai berikut:

“...identified three main concepts: the movement of people; a sector of the economy or industry; and a broad system of interacting relationship of people, their needs, and services that respond to these needs”.

Kedua, interaksi antara elemen lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya, seperti yang dikemukakan oleh Leiper, 1981 (Gartner, 1996) yang mendefinisikan pariwisata sebagai:

“an open system of five elements interacting with broader environments; the human element; tourists; three geographical elements: generating region, transit route, and destination region; and an economic element, the tourist industry. The five are arranged in functional and spatial connection, interacting with physical, technological, social, cultural, economic, and political factors. The dynamic element comprises persons undertaking travel which is to some extent, leisure-based and which involves a temporary stay away from home of at least one night”.

Definisi lain yang lebih sederhana dikemukakan oleh Hunziker dalam Afiandi dkk (2011,13) yang mendefinisikan pariwisata sebagai berikut

“.. the sum of the phenomena and relationship arising from the travel and stay of non-residents, in so far as they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity”.

Ketiga, kerangka sejarah dan budaya, seperti yang dikemukakan oleh Mac Cannell (1992) berikut ini

“Tourism is not just an aggregate of merely commercial activities; it is also an ideological framing of history, nature and tradition; a framing that has the power to reshape culture and nature to its own needs”.

Definisi pariwisata dari dimensi akademis dan dimensi sosial budaya dikenal dengan istilah kepariwisataan (UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata), yaitu keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa elemen-elemen penting yang menjadi fokus perhatian pada istilah pariwisata untuk masing-masing dimensi adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Pariwisata Berdasarkan Dimensi

Pariwisata			
Dimensi Spasial	Dimensi Industri	Dimensi Akademis	Dimensi Sosial Budaya
Perjalanan manusia ke luar lingkungan tempat tinggal dan tempat kerjanya Waktu sementara	Keterkaitan antara barang dan jasa untuk membentuk pengalaman berwisata	Studi: Perjalanan manusia ke luar lingkungan yang biasa ditinggalinya Industri untuk melayani kebutuhan wisatawan yang Dampak ditimbulkan	Pemenuhan kebutuhan wisatawan Interaksi antara lingkungan fisik, ekonomi, sosial budaya Kerangka sejarah, alam, dan budaya

Sumber: McChanell (1992)

Berpijak dari definisi-definisi tersebut, dapat diambil satu kesimpulan tentang definisi pariwisata, yaitu sistem yang mengaitkan antara lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya, dan industri dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang yang dilakukan ke luar lingkungan tempat tinggal atau tempat kerjanya dengan motivasi selain mencari nafkah di tempat tujuannya, dan sekaligus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap alam dan budaya (Afiandi dkk, 2011).

2. Pengertian Daya Tarik Wisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Sunaryo (2013:25-28) membagi daya tarik wisata menjadi tiga jenis. Ketiga daya tarik wisata tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Daya Tarik Wisata Alam

Yang dimaksud daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada anugerah keindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam. Contohnya: pantai dengan keindahan pasir putihnya, deburan gelombang ombak serta akses pandangnya terhadap matahari terbit atau tenggelam; laut dengan aneka kekayaan terumbu karang maupun ikannya; danau dengan keindahan panoramanya; gunung dengan daya tarik vulkanonya; hutan dengan

keaslian flora dan faunanya; sungai dengan kejernihan air dan kedasyatan arusnya; air terjun dengan panorama kecuramannya; dan lain sebagainya.

b. Daya Tarik Wisata Budaya

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada hasil karya dan hasil cipta manusia, baik yang berupa peninggalan budaya (*situs/heritage*) maupun nilai budaya yang masih hidup (*the living culture*) dalam kehidupan di suatu masyarakat. Daya tarik wisata budaya ini dapat berupa: upacara/ritual, adat istiadat, seni pertunjukan, seni kriya, seni sastra, seni rupa maupun keunikan kehidupan sehari-hari yang dimiliki oleh masyarakat.

c. Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata minat khusus (*special interest*) adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada aktivitas untuk pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik. Daya tarik wisata minat khusus ini seperti: pengamatan satwa tertentu (*birds watching*), memancing (*fishing*), berbelanja (*shopping*), kesehatan dan penyegaran badan (*spa and rejuvenation*), arung jeram, golf (*sports*), *gambling/casino*, MICE (*meeting, incentive, conference, exhibition*) dan aktivitas wisata minat khusus lainnya yang terkait dengan hobi atau kegemaran wisatawan.

Menurut Yoeti (1982) mengemukakan bahwa daya tarik dari suatu destinasi merupakan faktor yang paling penting dalam rangka mengundang wisatawan untuk mengunjunginya. Agar suatu destinasi dapat menarik wisatawan untuk mengunjunginya paling tidak harus memenuhi tiga syarat utama yaitu:

- 1) Daya Tarik Wisata tersebut harus mempunyai yang disebut “*something to see*”. Maksudnya, objek tersebut harus memiliki daya tarik khusus yang bisa dilihat oleh wisatawan, di samping itu juga harus memiliki atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai “*entertainments*” apabila wisatawan datang mengunjunginya.
- 2) Selanjutnya Daya Tarik Wisata tersebut harus memiliki “*something to do*”. Selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus juga disediakan beberapa fasilitas rekreasi atau *amusements* dan tempat atau wahana yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk beraktivitas seperti olahraga, kesenian maupun kegiatan lain yang dapat membuat wisatawan menjadi betah tinggal lebih lama.
- 3) Kemudian Daya Tarik Wisata tersebut harus memiliki “*something to buy*”. Di tempat tersebut harus tersedia barang-barang cinderamata (*souvenir*) seperti halnya kerajinan masyarakat setempat yang bisa dibeli wisatawan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asalnya.

Oleh Maryani (1991) menambahkan dua syarat suatu Daya Tarik Wisata dapat menarik minat wisatawan yaitu:

- 4) *Something to arrived*. Maksudnya adalah bagaimana wisatawan dapat mencapai suatu daya tarik wisata tersebut. Di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana cara wisatawan dapat mengunjungi daya tarik wisata tersebut, transportasi yang dapat digunakan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata dan estimasi waktu tiba di lokasi daya tarik wisata tersebut.
- 5) *Something to stay*. Maksudnya adalah bagaimana wisatawan akan tinggal selama melakukan kunjungan ke daya tarik wisata tersebut. Oleh karena itu diperlukan penginapan-penginapan yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat sebelum ataupun sesudah mengunjungi daya tarik wisata.

Selanjutnya salah satu pakar desa wisata sekaligus ketua Asosiasi desa Wisata Indonesia (ASIDEWI) Provinsi Jawa Timur, Andi Yuwono (2017) dalam forum sosialisasi pembentukan desa wisata bangun menambahkan syarat suatu destinasi yang kaitannya dalam ini desa wisata adanya "*something to learn*". Maksudnya adalah ada sesuatu pengalaman baru yang diperoleh wisatawan ketika berkunjung sehingga menambah wawasan pengetahuan wisatawan. Pengalaman baru tersebut memberikan pengajaran kepada wisatawan agar semakin peka terhadap kondisi pariwisata yang ada di destinasi tersebut.

3. Kepariwisata sebagai Sistem

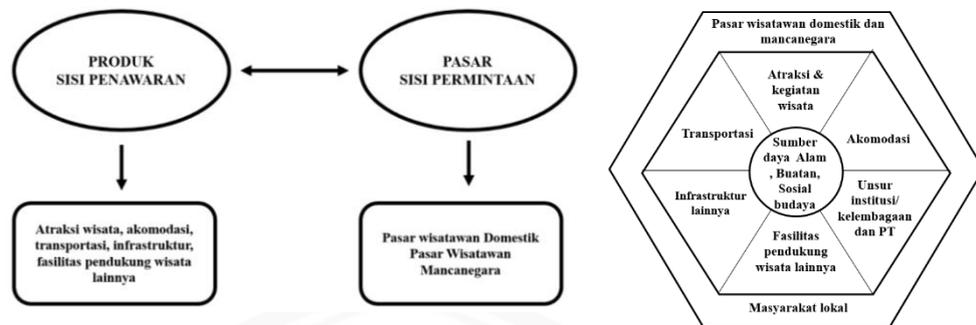
Berdasarkan pada kandungan pengertian pariwisata dari dimensi spasial, dimensi industri, dimensi akademis, dan dimensi sosial budaya pada

hakekatnya akan berimplikasi pada tumbuhnya kegiatan-kegiatan usaha terkait, baik yang ada pada rantai kegiatan ke depan (*forward-linkage*) maupun rantai nilai kegiatan di belakang (*backward-linkage*) dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Sinergi keterkaitan usaha dan kegiatan pariwisata tersebut membentuk suatu kesatuan sistem interaksi antara komponennya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan suatu kegiatan yang bersifat menyatu dan menyeluruh (Sunaryo, 2013:19).

Pendit (2003) salah satu pakar kepariwisataan di Indonesia, dalam satu tulisannya telah menjelaskan adanya pola keterkaitan antara aktivitas kepariwisataan dengan kegiatan terkait lainnya, seperti dikatakan sebagai berikut:

“...Kepariwisataan dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan pembangunan seperti perbaikan pelabuhan (laut ataupun udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya, yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar...”

Untuk mempermudah pemahaman tentang keterkaitan sistemik dari berbagai aktivitas dalam sistem kepariwisataan, berikut dikemukakan model ekonomi yang menggambarkan interaksi antara dua komponen pokok kepariwisataan, yaitu komponen produk (*supply side*) dan komponen pasar (*demand side*). Model tersebut dikemukakan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Komponen Sistem Kepariwisata

Sumber: Sunaryo (2012:24)

Melalui model keterkaitan antara aspek permintaan dan penawaran dalam sistem kepariwisataan yang digambarkan di atas, dapat dielaborasi secara lebih rinci mengenai komponen-komponen yang membentuk sistem kepariwisataan tadi. Sunaryo (2012:24) menjelaskan berbagai komponen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan destinasi pariwisata (*tourism product designing*) adalah sebagai berikut:

a. Daya Tarik Wisata

Daya Tarik Wisata berdasarkan jenis dan temanya diklasifikasikan menjadi tiga jenis daya tarik wisata yaitu: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata minat khusus. Berbagai jenis daya tarik wisata tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting pada sisi produk wisata, terutama dalam rangka menarik kunjungan wisatawan ke destinasi.

b. Amenitas atau Akomodasi

Komponen produk berikutnya yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah fasilitas amenities. Yang dimaksud dengan fasilitas

amenitas atau akomodasi dalam pengertian ini adalah berbagai jenis fasilitas dan kelengkapannya yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat dan bersantai dengan nyaman serta menginap selama melakukan kunjungan ke suatu destinasi. Fasilitas akomodasi pariwisata ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas komplementernya seperti restoran, kolam renang, bar maupun fasilitas *entertainment* yang lain dan dibedakan ke dalam berbagai jenis tingkatan yang merentang mulai dari: *homestay*, penginapan/hotel non bintang (melati), hotel berbintang maupun jenis-jenis akomodasi khusus seperti *resort*, rumah panggung di hutan, rumah tenda (*caravan*) untuk kebutuhan berkemah.

c. Aksesibilitas dan Transportasi

Komponen produk selanjutnya yang juga membutuhkan perhatian untuk dikembangkan adalah aksesibilitas dan transportasi. Yang dimaksud aksesibilitas dan transportasi dalam pengertian ini adalah segenap fasilitas dan moda angkutan yang memungkinkan dan memudahkan serta membuat nyaman wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Beberapa aksesibilitas dan fasilitas transportasi dibedakan ke dalam berbagai matra antara lain: matra transportasi darat termasuk kereta api dan angkutan penyeberangan; matra transportasi laut termasuk kapal pesiarnya dan matra transportasi udara dengan penerbangan komersial maupun penerbangan charter. Semua alat transportasi tersebut berfungsi sebagai sarana dan fasilitas pendukung bagi pergerakan wisatawan dari suatu tempat ke tempat lainnya.

d. Infrastruktur Pendukung

Yang dimaksud infrastruktur pendukung dalam pengertian ini adalah keseluruhan jenis fasilitas umum yang berupa prasarana fisik. Contoh prasarana fisik ini meliputi: komponen pendukung perhubungan seperti pelabuhan (*seaport*), bandara (*airport*), terminal, stasiun kereta api dan jaringan telekomunikasi serta beberapa fasilitas fisik yang lain seperti jaringan listrik, air minum, toilet dan sebagainya.

e. Fasilitas Pendukung Wisata Lainnya

Yang dimaksud fasilitas pendukung lainnya dalam pengertian ini adalah berbagai jenis fasilitas pendukung kepariwisataan yang berfungsi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan selama melakukan kunjungan di suatu destinasi. Contoh fasilitas pendukung ini seperti: keamanan, biro perjalanan, toko cinderamata, rumah makan, pusat informasi wisata, hiburan malam, fasilitas perbankan, dan beberapa skema kebijakan khusus yang diadakan untuk mendukung kenyamanan bagi wisatawan dalam kunjungannya di destinasi.

f. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Yang dimaksud dengan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata dalam pengertian ini adalah keseluruhan unsur organisasi atau institusi pengelola kepariwisataan dan termasuk sumber daya manusia pendukungnya, yang terkait dengan manajemen pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi, baik pemerintah, swasta/industri dan

masyarakat. Beberapa contoh kelembagaan dan SDM pariwisata yang memegang peranan penting dalam manajemen pengelolaan kepariwisataan di Indonesia, misalnya: Dinas Pariwisata beserta keseluruhan unit pelaksana teknisnya, Asosiasi Industri Perjalanan Wisata (ASITA), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) maupun masyarakat pariwisata yang terkait dengan kepariwisataan, baik sebagai tenaga kerja, pelaku usaha maupun sebagai tuan rumah (*host*) dalam suatu destinasi (Sunaryo, 2012:25-31).

Kaitannya dengan organisasi desa wisata, di Jawa Timur kelembagaan yang menaungi desa wisata adalah Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) Provinsi Jawa Timur yang dibentuk pada tahun 2011 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Asidewi Jawa Timur bekerjasama dengan Disbudpar Jawa Timur mengamankan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini diwakili oleh dinas pariwisata masing-masing daerah untuk membentuk Asidewi Kabupaten/Kota bagi yang wilayahnya terdapat potensi pengembangan desa wisata. Asidewi Kabuapten/Kota ini merupakan kepanjangan tangan dari Asidewi Provinsi yang bertugas untuk melakukan pendampingan langsung kepada desa wisata di daerah masing-masing. Dalam pengelolaan sebuah desa wisata, organisasi/kelembagaan yang mengelola desa wisata di desa yang bersangkutan dinamakan Lembaga Desa Wisata atau yang dikenal

dengan singkatan Ladewi. Melalui mekanisme ini, garis koordinasi antara pendamping dan pengelola sangat jelas sehingga pengembangan dan pengelolaan desa wisata tersebut dapat berkelanjutan (Yuwono, 2017).

4. Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Kurniawati (2013:26) menyatakan bahwa Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah sebuah upaya pembangunan suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup. Kurniawati (2013:27-28) menjelaskan pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu:

a. Aspek Ekonomi

Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan. Jadi, jika generasi saat ini bisa maju maka masyarakat bisa mencapai kesejahteraan. Sehingga kemudian terdapat alur ekonomi yang berjalan terus menerus, tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dari generasi ke generasi. Aspek yang terdiri dari ekonomi sebagai berikut:

- 1) memaksimalkan kesejahteraan manusia
- 2) memastikan adanya efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alam
- 3) menciptakan iklim usaha

b. Aspek Sosial

Aspek sosial, maksudnya dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi, interrelasi dan interdependensi. Hal-hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek sosial adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Aspek yang terdiri dari sosial sebagai berikut:

- 1) memastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan disemua aspek kehidupan.
- 2) menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat dan politik, budaya ekonomi dan keamanan.

c. Aspek Lingkungan

Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, aspek ekologi merupakan aspek yang banyak disorot ketika membahas tentang *sustainable design*. Hal ini disebabkan karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi yang kita pijak ini. Sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa. Aspek yang terdiri dari lingkungan sebagai berikut:

- 1) meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan.
- 2) meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.
- 3) melindungi modal alam yang kritis/penting.

Menurut Kurniawati (2013:28) menjelaskan pengertian pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk penambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan. Perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif. Beberapa inisiatif diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan *sustainable tourism* sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber-sumber atau asset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi di masa depan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang. “Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak

secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat” (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai “*resep*” pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Menurut Kurniawati (2013:30) pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

a. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumberdaya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

b. Keikutsertaan Para Pelaku/Stakeholder Involvement

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

c. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel dan restoran seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages)

antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

d. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteriakriteria dan standar internasional.

e. Mewadahi Tujuan Masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

f. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan

lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

g. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

h. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

i. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang

pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik lain yang relevan.

j. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Menurut Kementerian Pariwisata (2016:27) menjelaskan bahwa konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan harus memiliki daya tanggap terhadap minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat setempat dengan tetap menekankan upaya perlindungan dan pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang. Upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika, sekaligus tetap menjaga keutuhan dan/ atau kelestarian ekologi, keanekaragaman hayati, budaya, serta sistem kehidupan (WTO, 1990).

Kemenpar (2016:27-28) menjelaskan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

a. Layak secara ekonomi (*economically feasible*)

Prinsip *economically feasible*, menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi, dilaksanakan secara efisien untuk dapat memberikan nilai manfaat ekonomi yang berarti baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

b. Berwawasan lingkungan (*environmentally viable*)

Prinsip *environmentally viable*, menekankan bahwa proses pembangunan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun budaya), dan seminimal mungkin menghindari dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

c. Dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*)

Prinsip *socially acceptable*, menekankan bahwa proses pembangunan harus dapat diterima secara sosial, dimana upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan agar memperhatikan nilai-nilai, norma-norma, serta adat dan tradisi yang ada di lingkungan masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan tersebut.

d. Dapat diterapkan secara teknologi (*technologically appropriate*)

Prinsip *technologically appropriate*, menekankan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan secara teknis dapat diterapkan, efisien dan memanfaatkan sumber daya lokal dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Secara sederhana pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diintegrasikan dalam 3 (tiga) sasaran utama pencapaian yaitu:

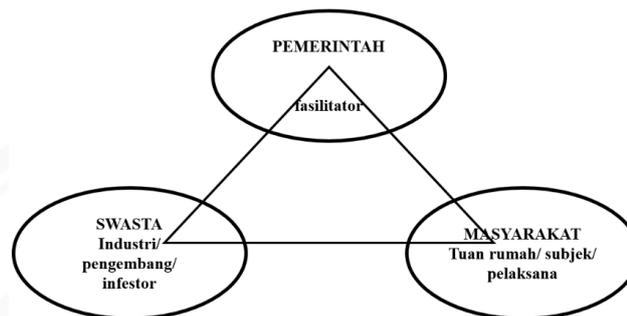
- a. Kualitas sumber daya lingkungan (alam dan budaya), dimana pembangunan pariwisata harus tetap menjaga keutuhan sumber daya alam dan budaya yang ada, serta memperhatikan daya dukung kawasan tersebut apakah masih mampu menerima/ mentolerir pembangunan pariwisata.
- b. Kualitas hidup masyarakat setempat (sosial-ekonomi), dimana pembangunan pariwisata harus mampu memberikan dampak positif (benefit) bagi sosial-ekonomi masyarakat setempat, seperti menumbuhkan kesempatan kerja, atau bahkan menjadikannya sebagai masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
- c. Kualitas pengalaman berwisata (wisatawan), dimana pembangunan pariwisata harus peka terhadap tingkat kepuasan wisatawan, sehingga menjadikan perjalanan wisatanya sebagai sebuah pengalaman yang berharga. Dalam hal ini, kualitas produk wisata serta interpretasinya memiliki peranan sangat penting bagi kualitas pengalaman berwisata seseorang (Kemenpar, 2016).

5. Konsep *Community Based Tourism*

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di lokasi yang menjadi tujuan (destinasi) wisata melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pembangunan kepariwisataan ke depan. Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013:215) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan *power* (daya) atau *empowering* dari golongan masyarakat yang

powerless (tidak berdaya), biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.

Berikut gambar yang menggambarkan ilustrasi pemangku kepentingan dalam, pariwisata (Sunaryo, 2013:217).



Gambar 2.2 Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata

Sumber : Sunaryo (2013:217)

Jabaran peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

- Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (*regulator*) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan;
- Kalangan Swasta (pelaku usaha/ industri pariwisata) dengan sumber daya, modal dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan;
- Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah (*host*), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua stakeholder lainnya. Penyebabnya adalah tidak

adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumberdaya (*resource*) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Murphy, Dawyer, Forsyth dan Dwyer dalam Sunaryo (2013:219) pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut. Sunaryo (2013:218) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan.
- b. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat.

- c. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata (Sunaryo (2013: 219).

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sunaryo (2013: 138) bahwa dalam pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah *community based tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented model*) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi. Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat).

Murphy dalam Sunaryo (2013: 139) menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan

wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* sebagai berikut:

- a. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
- b. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
- c. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Menurut Hudson dan Timothy dalam Sunaryo (2013:139) pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu

pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau *community based tourism*, yaitu:

- a. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- b. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
- c. Pendidikan Kepariwisataan bagi masyarakat lokal (Sunaryo, 2013: 140).

Suansri (2003:21-22) mengembangkan 5 prinsip yang merupakan aspek utama dalam pengembangan *Community Based Tourism* (CBT). Pertama, prinsip ekonomi dengan indikator timbulnya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal. Kedua, prinsip sosial dengan indikator terdapat peningkatan kualitas hidup, adanya peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua dan terdapat mekanisme penguatan organisasi komunitas. Ketiga, prinsip budaya dengan indikator mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal. Keempat, prinsip lingkungan dengan indikator pengembangan *carrying capacity area*, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan adanya kepedulian tentang pentingnya konservasi. Kelima, prinsip politik dengan indikator terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih

luas dan terdapat mekanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kelima prinsip tersebut menurut Suansri merupakan wujud terlaksananya pariwisata yang berkelanjutan.

Suansri (2003) menyebutkan beberapa prinsip dari *Community-Based Tourism* yang harus dilakukan, yaitu: 1) mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata; 2) melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya, 3) mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan; 4) meningkatkan kualitas kehidupan; 5) menjamin keberlanjutan lingkungan; 6) melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal; 7) mengembangkan pembelajaran lintas budaya; 8) menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia; 9) mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat; 10) memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat; dan 11) menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dikembangkan berdasar prinsip keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan stakeholder pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara ideal prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menekan pada pembangunan pariwisata “dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat”. Setiap tahapan

pembangunan, yang dimulai dari perencanaan, pembangunan dan pengembangan sampai dengan pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi, masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

6. Tata Kelola Desa Wisata

Wisata Pedesaan atau *village tourism* telah dikenal secara luas sebagai salah satu bentuk produk wisata yang dikembangkan di kawasan atau area pedesaan (*country side*) di berbagai tempat di dunia, sebagai bentuk kegiatan wisata yang membawa wisatawan pada pengalaman untuk melihat dan mengapresiasi keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya. Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan dapat disebut sebagai aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut. Desa wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.

Menurut Kemenpar (2016:24) terdapat komponen-komponen pembentuk desa wisata yaitu:

- a. Batasan geografis ataupun administratif yang jelas.

- b. Potensi daya tarik wisata baik alam, budaya maupun karya kreatif sebagai unsur penarik kunjungan wisatawan.
- c. Masyarakat yang antusias dan mendukung pengembangan desa wisata.
- d. Fasilitas pariwisata sebagai unsur pendukung wisatawan dalam melakukan aktifitas wisata di desa tersebut (akomodasi/ *homestay*, warung makan yang dikelola oleh masyarakat, pusat informasi wisata dan lainnya).
- e. Sarana prasarana yang berupa jaringan jalan, moda angkutan wisata yang mendukung kemudahan wisatawan dalam mencapai desa tersebut.
- f. Organisasi pengelolaan desa wisata yang berfungsi sebagai unit pengelola kegiatan wisata di desa tersebut (merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengevaluasi/ monitoring kegiatan-kegiatan pengembangan).
- g. Sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak pengelolaan kegiatan wisata di desa tersebut.

Untuk mengembangkan sebuah desa wisata, penting untuk mengetahui terlebih dahulu sejauh mana potensi dan perkembangan yang sudah terjadi di sebuah desa wisata sehingga dapat disusun strategi dan program yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Berdasarkan *Tourism Life Cycle* dan *Product Life Cycle* maka tingkat perkembangan suatu desa wisata sebagai sebuah produk wisata dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tahapan yaitu berpotensi, berkembang, dan maju. Sementara, indikator untuk masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

- a. Berpotensi. Pada tingkatan ini, sebuah desa dicirikan sebagai berikut:
 - 1) Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata
 - 2) Pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas
 - 3) Belum ada kunjungan wisatawan
 - 4) Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh
- b. Berkembang. Pada tingkatan ini, sebuah desa dicirikan sebagai berikut:

- 1) Sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan.
- 2) Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata.
- 3) Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi bagi masyarakat setempat.
- 4) Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh.
- 5) Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).

c. Maju. Pada tingkatan ini, sebuah desa dicirikan sebagai berikut:

- 1) Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan.
- 2) Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai.
- 3) Masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya.
- 4) Sudah terbangun sepenuhnya masyarakat yang sadar potensi wisata.
- 5) Mampu membangun jaringan promosi dan pemasaran secara swadaya maupun kerjasama dengan pihak luar.
- 6) Secara mandiri mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas secara internal (SDM, produk, organisasi, dsb).
- 7) Dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa wisata lainnya.

Sehubungan dengan prinsip pengembangan Desa Wisata, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan adalah aspek Produk, Sumber Daya Manusia (SDM), Manajemen dan Kelembagaan, Promosi dan Pemasaran serta Investasi, yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Produk

Produk, dalam hal pariwisata yang selanjutnya disebut produk pariwisata merupakan komponen penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Secara umum, karakteristik utama produk pariwisata adalah jasa, dengan demikian meningkatkan mutu pelayanan jasa di bidang pariwisata berarti juga meningkatkan mutu produk pariwisata, sehingga cukup sulit untuk menentukan standar mutu produk wisata yang jelas. Mengadaptasi dari Bonita M. Kolb (2006) maka tingkatan produk (*stages of product*) untuk desa wisata dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Produk Inti (*Core Product*)

Produk inti dapat didefinisikan sebagai fitur utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi desa wisata. Contoh: daya tarik wisata yang unik dan spesifik, kehidupan sosial dan budaya dari masyarakat setempat, tempat rekreatif dan kegiatan yang bersifat petualangan.

2) Produk Pendukung (*Supporting Product*)

Produk yang membuat pengalaman kunjungan menjadi lebih menyenangkan. Contoh: *home industries*, galeri, penginapan yang

unik (*homestay, ecolodge*), souvenir, kuliner, dan transportasi tradisional.

3) Produk Pelengkap (*Suplement Product*)

Produk yang menunjang kemudahan dan kenyamanan untuk melakukan kegiatan pariwisata di suatu desa wisata. Contoh: pusat informasi, rambu-rambu, rute perjalanan wisata, dan pemandu wisata.

Produk pariwisata sangat bervariasi dan beragam jenisnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan wisatawan, sehingga diperlukan pengembangan produk-produk wisata yang direncanakan, dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Di samping itu, modifikasi produk lama juga diperlukan untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang cenderung berubah-ubah. Keragaman permintaan terhadap produk pariwisata semakin berkembang sehingga sentuhan kreatifitas dan inovasi dari para ahli atau perencana pariwisata maupun para pengelola yang terlibat langsung sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan produk wisata, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. *Authenticity* (Keaslian)

Seiring dengan berkembangnya trend berwisata, orang cenderung mencari pengalaman yang terkait dengan '*authentic experience*' atau pengalaman yang asli atau otentik. Pengalaman yang otentik ini didapatkan dari warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan secara

turun-temurun oleh masyarakat di suatu destinasi. Pengalaman yang otentik tidak boleh dibuat-buat atau dimanipulatif. Maka dari itu masyarakat setempat harus tetap menjaga keaslian warisan budayanya agar tidak terkontaminasi oleh pengaruh luar yang dapat menyebabkan budaya tersebut mengalami degradasi nilai, dimana hal ini dikhawatirkan akan menghilangkan arti dari keaslian tersebut. Dalam hal pengembangan desa wisata, yang termasuk kedalam hal-hal yang bersifat otentik diantaranya adalah menjaga tradisi kelokalan, sikap atau kegiatan masyarakat sehari-hari, nilai-nilai budaya serta fitur alam yang unik dari suatu desa.

b. *Local Tradition* (Tradisi Masyarakat Setempat)

Tradisi merupakan bagian dari suatu warisan budaya yang berperan penting sebagai daya tarik. Tradisi merupakan segala sesuatu yang berakar dan melekat dengan kehidupan masyarakat di suatu daerah yang menjadi ciri atau karakter budaya yang dipelihara dari waktu ke waktu. Tradisi harus terus dipelihara dan dilestarikan karena selain untuk menjaga identitas dari suatu masyarakat, tradisi yang kuat juga akan menjadi perhatian dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dalam hal desa wisata, tradisi masyarakat ini dapat berupa suatu kearifal lokal (*local wisdom*), adat istiadat, kesenian musik maupun seni tari, pakaian adat serta makanan khas dari suatu desa wisata.

c. *Community involvement* (Keterlibatan Masyarakat)

Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata di suatu destinasi. Kegiatan pariwisata akan lebih menguntungkan dan berkelanjutan karena masyarakat setempat terlibat secara aktif. Masyarakat setempat dapat mengambil bagian aktif dalam semua proses, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, termasuk didalamnya pengusahaan kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan dari desa wisata (*Micro Small and Medium Entrepreneurship*). Dengan demikian masyarakat akan tumbuh rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perkembangan pariwisata di desanya sebagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan.

d. *Attitudes and values* (Sikap dan Nilai)

Sikap dan nilai suatu kebudayaan perlu dijunjung tinggi terutama oleh masyarakat setempat untuk menghindari degradasi nilai akibat pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari kunjungan wisatawan. Apabila wisatawan menghargai sikap dan nilai warisan budaya serta pola kehidupan suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut akan memiliki rasa kebanggaan tersendiri terhadap warisan budayanya, dimana hal ini akan membuat masyarakat menjaga, mempertahankan dan melestarikan warisan budaya mereka. Desa wisata yang memiliki masyarakat dengan sikap dan nilai-nilai yang baik akan membuat citra yang baik pula bagi desa wisata tersebut. Sikap dan nilai yang baik

dapat ditunjukkan dengan perilaku yang baik, ramah terhadap wisatawan, dan tegas terhadap aturan-aturan yang dipegang.

e. *Conservation and Carrying capacity* (Konservasi dan Daya Dukung)

Pengembangan desa wisata harus menerapkan prinsip-prinsip pelestarian serta dalam hal pemanfaatannya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Hal ini penting agar dengan berjalannya pembangunan pariwisata, kapasitas maksimum daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu destinasi dalam menyokong kebutuhan berbagai pemanfaatan tidak akan merusak alam, budaya maupun lingkungan. Dalam pengelolaan desa wisata, upaya konservasi dapat dilakukan dalam bentuk pengaturan pola kunjungan, zonasi kawasan serta penetapan daya dukung fisik (lingkungan) dan non fisik (budaya dan masyarakat).

Desa wisata dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu melalui inisiatif masyarakat lokal (*bottom-up*) dan inisiatif dari pemerintah atau instansi (*top-down*) yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan.

a. Inisiatif masyarakat (*bottom-up*)

Desa wisata terbentuk atas dasar kesadaran dari masyarakat lokal yang ingin berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata di desanya. Pada pendekatan ini, prosedur pembentukan sebuah desa wisata dapat dijelaskan dalam skema berikut:

- 1) Masyarakat setempat bersama-sama Kepala Desa/Lurah berinisiatif untuk membentuk desa wisata sesuai dengan potensi daya tarik yang terdapat di desa tersebut dengan membentuk kelembagaan lokal/Pengurus Desa Wisata.

- 2) Kelembagaan lokal/Pengurus Desa Wisata dengan diketahui Kepala Desa/Lurah mengajukan proposal pembentukan Desa Wisata kepada pemerintah daerah setempat (Dinas Kabupaten/Kota) yang membidangi kepariwisataan selaku pembina/pembimbing untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
- 3) Pengukuhan terbentuknya desa wisata dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kepariwisataan.
- 4) Pencatatan dan pendaftaran desa wisata dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kepariwisataan untuk dilaporkan ke Dinas Provinsi yang membidangi kepariwisataan dan Kementerian Pariwisata.

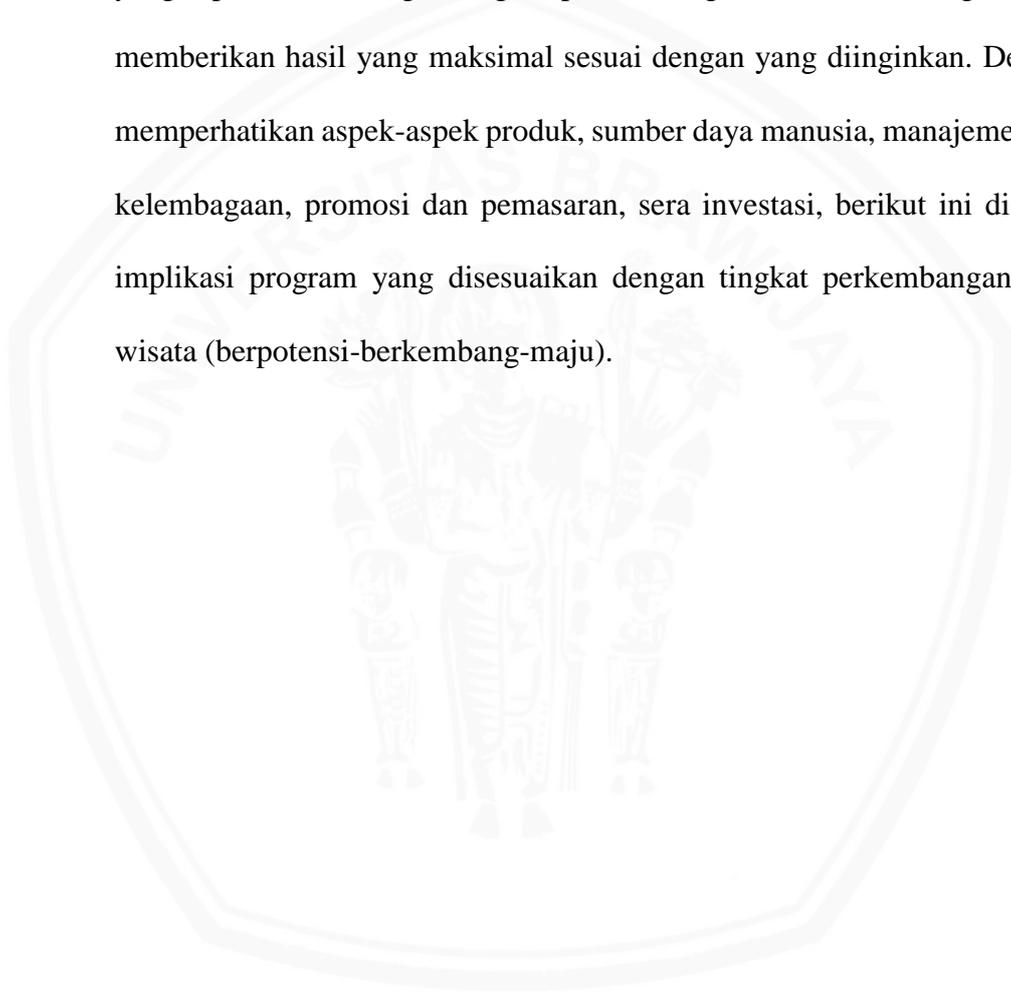
b. Inisiatif pemerintah atau instansi di bidang kepariwisataan (*top-down*)

Desa wisata terbentuk melalui penilaian oleh instansi tersebut yang dilihat berdasarkan potensi dan tingkat kesiapan desa baik dari sisi kesiapan aspek kepariwisataan maupun kesiapan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di desanya. Kesiapan masyarakat ini sangat penting karena dengan adanya desa wisata akan menimbulkan interaksi langsung antara masyarakat dengan wisatawan yang datang ke desa wisata tersebut. Pada pendekatan ini, prosedur pembentukan sebuah desa wisata dapat dijelaskan dalam skema berikut:

- 1) Dinas Pariwisata Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kab/Kota membentuk desa wisata berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan menggalang inisiatif dari masyarakat setempat untuk mengembangkan desanya menjadi desa wisata; atau inisiatif dapat muncul dari Dinas Pariwisata Kab/Kota yang menggalang inisiatif kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan desanya menjadi desa wisata.
- 2) Dinas Pariwisata Kab/Kota atau Propinsi bersama Lurah/Kepala Desa melakukan sosialisasi dan memfasilitasi pertemuan antara kelompok masyarakat desa dengan Dinas Pariwisata untuk menindaklanjuti rencana pembentukan desa wisata.
- 3) Hasil pembentukan desa wisata dengan di ketahui Kepala Desa/Lurah selanjutnya dilaporkan dan dicatatkan ke Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan pengesahan dan pembinaan lebih lanjut.

- 4) Pengukuhan terbentuknya desa wisata dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kepariwisataan.
- 5) Pencatatan dan pendaftaran desa wisata dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kepariwisataan untuk dilaporkan ke Dinas Provinsi yang membidangi kepariwisataan dan Kementerian Pariwisata.

Dalam pengembangan desa wisata dibutuhkan strategi atau langkah yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan desa tersebut agar dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Dengan memperhatikan aspek-aspek produk, sumber daya manusia, manajemen dan kelembagaan, promosi dan pemasaran, serta investasi, berikut ini disusun implikasi program yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa wisata (berpotensi-berkembang-maju).



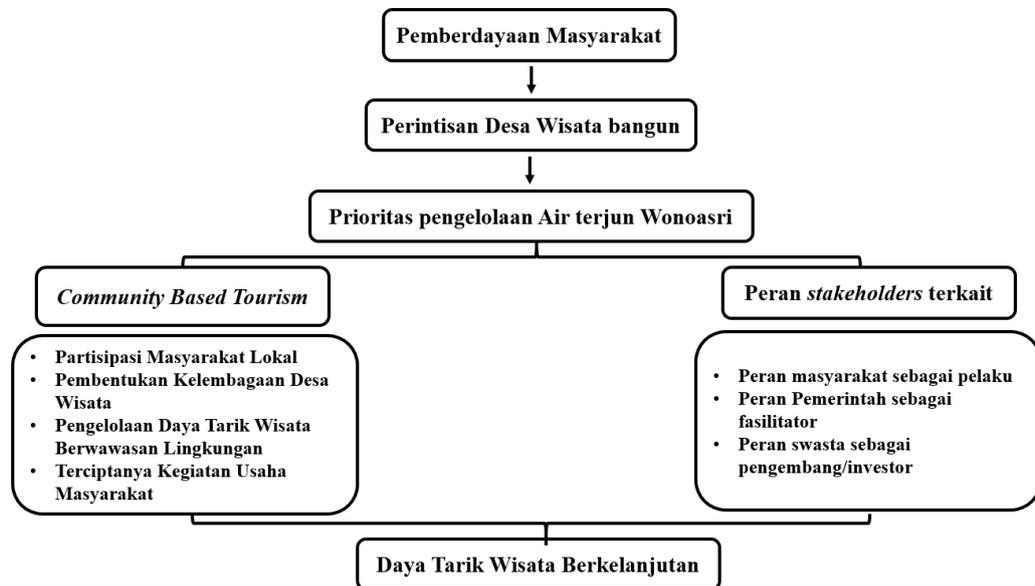
Tabel 2.3 Tahap Perencanaan dan Pengimplementasian Pengembangan Desa Wisata

NO	ASPEK	BERPOTENSI	BERKEMBANG	MAJU
1	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menginventarisir potensi dan karakteristik desa dari semua aspek 2. Mensosialisasikan potensi kepada seluruh masyarakat 3. Menyusun rencana kerja pengembangan desa wisata 4. Merintis pengembangan fasilitas dan sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi rencana pengembangan potensi dan karakteristik desa menjadi daya tarik wisata utama dan pendukung 2. Menyusun paket wisata berdasarkan potensi dan karakter desa 3. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana pendukung wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Inovasi terhadap produk yang ada 2. Memperkaya produk yang ada dengan produk baru yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar 3. Melengkapi fasilitas pendukung yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan wisata
2	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun/ membentuk sumber daya manusia lokal menjadi kelompok masyarakat yang mau bekerja/ berpartisipasi dalam pembangunan desanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat dengan berbagai macam keterampilan sesuai dengan karakter dan potensi produk yang dimiliki desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan kelompok masyarakat yang mandiri dan mampu membangun tim kerja yang kuat 2. Membangun kerjasama antara kelompok masyarakat dengan pihak lainnya
3	Manajemen dan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merintis pengembangan kelembagaan lokal untuk pengelolaan potensi wisata 2. Mensosialisasikan manajemen dan kelembagaan desa wisata kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan tentang kelembagaan dan manajemen yang lebih modern, misalnya koperasi 2. Membentuk Forum Komunikasi Desa Wisata di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan dan manajemen dengan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelayanan 2. Mengembangkan Jaringan kerjasama Desa Wisata di tingkat regional/ nasional

				3. Meningkatkan kompetensi dengan melakukan pelatihan secara rutin dengan yang materi yang lebih tinggi
4	Promosi dan Pemasaran	1. Menyusun informasi mengenai potensi dan karakter serta produk yang akan dipasarkan (profil desa)	1. Menyusun paket wisata dan melakukan promosi dan pemasaran (<i>fam trip, roadshow</i> , penyebaran bahan promosi) 2. Membangun sistem promosi dan pemasaran melalui (brosur, leaflet, proposal, website statis, papan/peta petunjuk dan informasi di tempat yang strategis)	1. Memperluas pemasaran paket wisata 2. Mempresentasikan informasi mengenai potensi dan keunggulan/karakteristik produk 3. Membangun kerjasama dan jaringan dengan berbagai pihak (ASITA, PHRI, BPW, dll)
5	Investasi	1. Mengidentifikasi semua potensi lokal sebagai modal bersama (SDM, Kelompok Masyarakat, Aset Desa, Sarana dan Prasarana)	1. Mengembangkan potensi lokal menjadi modal dalam bentuk daya tarik, produk wisata dan fasilitas pendukung	1. Membuka peluang investasi baik di lingkup internal maupun eksternal desa dengan prinsip saling menguntungkan (<i>win win solution</i>).

Sumber: Kemenpar (2016:48)

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

Kerangka pemikiran ini secara garis besar menjelaskan bahwa pengelolaan Daya Tarik Wisata berkelanjutan yang diterapkan di desa wisata bangun berasal dari partisipasi masyarakat lokal yang memiliki kesadaran terhadap pembangunan pariwisata. Hal ini sejalan dengan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (CBT). Masyarakat berperan aktif bersama *stakeholders* terkait dengan membentuk wadah resmi Lembaga Desa Wisata Bangun yang penerapannya melakukan pembangunan daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan. Sejalan dengan pembangunan pariwisata yang digalakkan masyarakat, memunculkan kegiatan usaha masyarakat yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa Bangun. Hal ini sesuai dengan kaidah pembangunan pariwisata berkelanjutan bahwa pariwisata berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2006:5), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2013).

Jenis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan membuat dekripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, factual dan akurat. Penelitian ini sering juga digunakan untuk menguji suatu hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan mengenai berbagai peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat (Wardiyanta, 2006:5).

Penelitian ini menggunakan model penelitian *Community Based Research* yang sering disingkat dengan CBR. Model penelitian CBR sebagaimana dikemukakan oleh Sarah Banks dari Center for Social Justice and Community Action, Durham University (2012) adalah penelitian

yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka, dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. Inisiatif penelitian bisa juga datang dari para ilmuwan atau peneliti setelah melihat permasalahan dan potensi yang ada dalam masyarakat, untuk memberi solusi rumusan teknis instrumentatif penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, baik disadari atau tidak oleh mereka, sehingga mereka terbawa dalam arus perubahan dan kemajuan.

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti melihat dan mengamati ketika melakukan pra penelitian, bahwa penelitian deskriptif (*descriptive research*) ini dapat mengatasi permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti secara sistematis, factual dan akurat sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat di desa wisata Bangun. Selain itu, dengan model penelitian CBR yang diterapkan oleh peneliti, maka masyarakat desa wisata Bangun yang dalam hal ini Lembaga Desa Wisata Bangun sekaligus *stakeholders* pariwisata yang ada di sana akan dilibatkan dalam setiap penelitian. Hal ini akan memberikan dua peran sekaligus kepada peneliti, bahwa selain melakukan penelitian untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang akan diberikan, peneliti juga bertindak sebagai fasilitator kepada Ladewi Bangun maupun *stakeholders* sehingga pengelolaan Daya Tarik Wisata di sana dapat berkelanjutan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2006:7) adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dengan mempersepsikan maupun mengkaji permasalahannya. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan konsep *Community Based Tourism* dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berkelanjutan, dalam hal ini terkait:
 - a. Partisipasi masyarakat lokal
 - b. Pembentukan kelembagaan Desa Wisata
 - c. Pengelolaan Daya Tarik Wisata berwawasan lingkungan
 - d. Terciptanya kegiatan usaha masyarakat.
2. Bentuk peran yang dilakukan *stakeholders* terkait dalam mengelola Daya Tarik Wisata yang berkelanjutan meliputi:
 - a. Peran Kelompok Masyarakat sebagai pelaku pengelolaan Daya Tarik Wisata
 - 1) Peran Lembaga Desa Wisata Bangun
 - 2) Peran Karang Taruna Desa Bangun
 - 3) Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan

- b. Peran Pemerintah sebagai fasilitator pengelolaan Daya Tarik Wisata
 - 1) Peran Pemerintah Desa Bangun
 - 2) Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek
- c. Peran Swasta sebagai pengembang / investor dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau letak dimana peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi ini, peneliti akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah, serta fokus penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Sedangkan situs penelitian ini adalah Daya Tarik Wisata Air Terjun Wonoasri yang terletak di Dusun Rampal Desa Bangun.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Satori, 2009:103). Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer diperoleh dari data observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti ketika berkunjung langsung ke Desa Wisata Bangun, wawancara dengan seluruh *stakeholders* yang ada di Desa Wisata Bangun dan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antar *stakeholders* yang difasilitasi oleh peneliti.
2. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi berupa foto maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bangun, Lembaga Desa Wisata Bangun maupun data kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang menunjang pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Bangun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Menurut Satori (2009:105) observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengamatan/observasi langsung ke Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Tujuannya yaitu untuk mengamati dan memperoleh data mengenai peran lembaga desa wisata dalam pengelolaan daya tarik wisata yang berkelanjutan sesuai dengan konsep *community based tourism*.

2. Wawancara

Menurut Satori (2009:130) wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian ini teknik wawancara berguna untuk mendapatkan data dan informasi mengenai peran lembaga desa wisata dalam pengelolaan daya tarik wisata sekaligus bentuki kerjasama antar *stakeholders* yang sudah diterapkan maupun yang akan diterapkan kedepanya untuk menghadapi pariwisata saat ini.

Pada penelitian ini peneliti membuat daftar wawancara dengan beberapa *stakeholders* terkait yang nantinya dapat menunjang pengumpulan data yaitu:

- a. Pengurus Lembaga Desa Wisata Bangun.
- b. Pengurus Asosiasi Desa Wisata Indonesia Kabupaten Trenggalek.
- c. Kepala Desa ataupun Perangkat Pemerintah Desa Bangun.
- d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
- e. Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Bangun.
- f. Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Desa Bangun.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan

dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi diambil dari data-data yang terdapat di Pemerintah Desa Bangun, Regulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait kepariwisataan, arsip Lembaga Desa Wisata Bangun maupun foto yang dilakukan oleh peneliti maupun dari sumber lain.

4. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD merupakan suatu teknik pengumpulan data dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit dimaknakan sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti. Bungin (2012) mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan siapa saja yang akan menjadi anggota FGD antara lain: (a) keahlian atau kepakaran seseorang dalam kasus yang akan didiskusikan, (b) pengalaman praktis dan kepedulian terhadap fokus masalah, (c) pribadi terlibat dalam fokus masalah, (d) tokoh otoritas terhadap kasus yang didiskusikan, (e) masyarakat awam yang tidak tahu dengan masalah tersebut namun, ikut merasakan persoalan sebenarnya. Pelaksanaan

diskusi dipimpin oleh peneliti sendiri yang akan mencatat jalannya diskusi, bahan diskusi dicatat dalam transkrip yang lengkap, termasuk komentar peserta kepada peserta lain dan kejadian khusus saat diskusi berlangsung. Dalam penelitian ini, komponen FGD yang dilibatkan adalah

1. Pengurus Ladewi Desa Bangun
2. Perangkat Pemerintahan Desa Bangun
3. Lembaga Masyarakat desa Hutan (LMDH) Desa bangun
4. Kelompok organisasi kepemudaan Karang Taruna Desa Bangun
5. Asidewi Trenggalek

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk membantu dan mempermudah dalam pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dengan satu metode dapat digunakan satu atau lebih instrument demikian pula sebaliknya, satu instrument dapat digunakan untuk satu atau lebih metode (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000).

Penelitian ini menggunakan instrumen yang meliputi:

1. Instrumen observasi (berupa mengamati objek)

Peneliti menggunakan instrumen observasi atau pengamatan dengan mencatat informasi pada objek yang diteliti. Objek peneliti yaitu Desa Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.

2. Instrumen wawancara

Peneliti menggunakan instrumen ini untuk mendapatkan informasi dari subyek yaitu manusia dengan menggunakan pedoman wawancara dengan menggunakan alat bantu catatan dan perekam suara. Bertujuan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti terarah dan sesuai dengan keadaan aktual yang terjadi di Desa Wisata Bangun.

3. Instrumen dokumentasi

Peneliti menggunakan tulisan dan foto dalam instrumen penelitian ini. Hal tersebut diperoleh peneliti saat melakukan observasi dan wawancara baik di Desa Bangun maupun dengan stakeholders terkait yang berada di luar Desa Bangun.

4. Instrumen FGD

Peneliti menggunakan pedoman FGD berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan fokus penelitian. Dalam FGD ini peneliti menggunakan alat bantu catatan dan perekam suara sehingga hasil yang dibahas dalam FGD dapat terdokumentasi dengan baik.

G. Analisis Data

Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2013: 88) mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Miles and Huberman (2014:33) yang meliputi :

1. Pengumpulan data, yaitu semua data yang terkumpul dari hasil interview, observasi, dokumentasi dan FGD. Dalam proses ini, peneliti memulai dengan membuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan fokus serta mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai instansi terkait di desa wisata Bangun.
2. Kondensasi Data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Dalam reduksi ini dituangkan dalam laporan yang lengkap. Kemudian laporan ini akan direduksi, dirangkum, diseleksi dan difokuskan hal-hal pokok, kemudian diperoleh tema, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian yang berlangsung.
3. Penyajian data, merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk dapat memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Melihat penyajian data tersebut, peneliti dapat memahami apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan, merupakan verifikasi data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data yang telah dikumpulkan yaitu mencari pola, tema hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagiannya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat sementara.

H. Keabsahan Data

Validitas instrument penelitian adalah suatu hasil penelitian yang menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu mengukur variable-variabel yang akan diukur dalam penelitian yang bersangkutan (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000). Peningkatan keabsahan hasil penelitian, peneliti dapat melakukan croscek pada prosedur penelitian yang sudah ditempuh, serta telaah terhadap substansi penelitian (Satori, 2009: 100). Triangulasi merupakan teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Moleong (2012:330-332) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Denzin dalam Moleong (2007:333) membedakan empat macam triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, keabsahan data (validitas) dilakukan dengan:

1. Mengajukan berbagai variasi pertanyaan kepada informan kunci yaitu Ladewi Bangun, Karang Taruna, LMDH dan pemerintah Desa Bangun
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Desa Wisata Bangun merupakan desa yang berada di lembah Pegunungan Kidul Kabupaten Trenggalek. Sebuah desa terpencil yang jauh dari suasana keramaian perkotaan. Desa Wisata Bangun secara administrasi masuk dalam kawasan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Letak Desa Bangun ini dikelilingi oleh pegunungan yang sangat hijau, asri dan alami serta menawarkan eksotisme keindahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di sektor pariwisata.

Desa Wisata Bangun memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata. Potensi tersebut meliputi potensi alam, keunikan budaya, tatanan masyarakat, kesenian tradisional, tata cara pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Selain itu sikap dan perilaku masyarakatnya masih sangat menjunjung nilai-nilai kearifan lokal seperti keramah tamahan masyarakatnya dan perilaku gotong royong yang membudaya sampai saat ini. Antusias masyarakat dalam membangun desanya juga sangat besar. Hal ini dibuktikan walaupun letak Desa Bangun sangat terpencil, masyarakatnya memiliki antusias dan etos kerja yang tinggi dalam memaksimalkan pembangunan potensi pariwisata yang ada.

Menyadari akan seluruh potensi tersebut, Desa Bangun pada Tahun 2016 mengikrarkan diri menjadi sebuah desa wisata. Pembangunan potensi pariwisata



berupa desa wisata mulai memberikan manfaat yang besar bagi pemberdayaan masyarakat Desa Bangun melalui penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan menumbuhkan perekonomian rakyat di pedesaan.

1. Wilayah Administrasi

Desa Wisata Bangun merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Munjungan yang mempunyai luas 2.194,8 ha, yang terbagi menjadi empat dusun meliputi Dusun Bangunsari, Dusun Jajar, Dusun Ngrampal dan Dusun Parang.



Gambar 4.1 Peta desa Bangun

Sumber: Pemerintah Desa Bangun (2016)

Batas desa yang ada di Desa Bangun yaitu:

- a. Sebelah barat : Desa Tawing Kecamatan Munjungan
- b. Sebelah timur : Desa Sawahan Kecamatan Watulimo
- c. Sebelah utara : Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak
- d. Sebelah selatan : Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan

Wilayah Desa Wisata Bangun mempunyai kontur tanah sebagian besar pegunungan untuk area cocok tanam dan perkebunan dengan ketinggian 300 mdpl. Kontur tanah untuk area pemukiman memiliki ketinggian 50-100 mdpl karena dekat dengan pesisir pantai selatan. Suhu di Desa Bangun berkisar antara 23-27⁰C serta kelembapan 10% dan berada di lereng gunung.

Berdasarkan data yang ada, keadaan geologi tanah di Desa Bangun secara umum terdapat 2 (dua) jenis tanah yaitu:

- a. Regosol Kelabu, tanah ini terbentuk dari dua bahan induk abu vulkanik intermedie, fisiografi vulkanik, bentuk wilayah pegunungan, kedalaman tanah sedang dan drainase cepat. Jenis tanah ini terdapat di daerah pegunungan.
- b. Andosol Coklat, tanah ini terbentuk dari abu dan tufa vulkanik, intermedie, drainase tanah yang baik, menempati punggung gunung.

Dilihat dari formasi geologi di atas bahwa Desa Bangun merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan pegunungan yang mengelilingi Desa Bangun, sehingga di Desa Bangun mata pencaharian penduduk didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan hutan.

Dilihat dari letaknya, Desa Bangun merupakan desa paling ujung timur di Kecamatan Munjungan. Lama jarak tempuh dari ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor sekitar 20 menit. Sedangkan lama jarak tempuh dari ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor sekitar 2 jam. Dan lama

jarak tempuh dari ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor sekitar 10 jam.

2. Klimatologi

Desa Wisata Bangun terletak di wilayah lereng pegunungan sekaligus berdekatan dengan pesisir pantai selatan dengan kombinasi hawa yang sejuk dan panas dengan suhu udara berkisar antara 23⁰C hingga 27⁰C. Rata-rata kelembapan nisby 96% dengan kecepatan angin 10,73 km/jam. Curah hujan yang terjadi yaitu 1.500 – 3.500 mm dengan jumlah bulan hujan selama 6 bulan.

3. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan lahan di Desa Wisata Bangun untuk lahan terbangun atau pemukiman sekitar 52 ha dari seluruh pola penggunaan lahan yang ada. Sisanya merupakan lahan yang belum terbangun yang meliputi lahan pertanian, perkebunan dan hutan lindung. Hal ini disebabkan karena wilayah Desa Bangun sebagian besar merupakan kawasan dengan topografi yang cenderung pegunungan, sehingga penggunaan lahan didominasi oleh hutan dan pertanian.

Dari seluruh lahan yang ada pola penggunaan lahan di Desa Wisata Bangun terdiri dari 28 ha merupakan lahan pertanian, 116 ha merupakan ladang perkebunan, hutan lindung 1.903,8 ha, serta untuk permukiman sebanyak 52 ha. Lebih detailnya jenis penggunaan lahan dijelaskan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Pola Penggunaan Lahan Desa Bangun Tahun 2016

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Jumlah (ha)
1	Pemukiman	52
2	Sawah Irigasi	19
3	Sawah Non Irigasi	9
4	Ladang Perkebunan	116
5	Pekarangan	60
6	Lahan Fasilitas Umum	35
7	Hutan Lindung	1.903,8
	Total Lahan	2.194,8

Sumber: Profil Desa Bangun (2016)

4. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Wisata Bangun pada Tahun 2016 sebanyak 4.638 jiwa yang terdiri dari laki- laki sebanyak 2.358 jiwa dan perempuan sebanyak 2.280 jiwa dan terdiri dari 1.436 kepala keluarga.

a. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data tentang jumlah penduduk menurut pencaharian diperlukan untuk mengetahui tingkat perekonomian penduduk di Desa Wisata Bangun, terutama dari mata pencaharian yang dominan. Dengan demikian akan tergambar pola ekonomi penduduk maupun tingkat pendapatannya. Dilihat dari struktur mata pencaharian penduduk Desa Bangun, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kondisi ini ditunjang oleh faktor potensi alam yang mendukung untuk kegiatan pertanian.

Dari data monografi desa terlihat bahwa 97,7% penduduk Desa Bangun bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 3.641 orang, hal ini ditunjukkan oleh rasio antara penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan penduduk yang bekerja di sektor non pertanian. Penduduk yang

bekerja pada sektor non pertanian sebanyak 84 orang yang tersebar di berbagai sektor seperti buruh migran, PNS, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, peternak, bidang swasta dan pensiunan TNI/POLRI.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Bangun Tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	1.415	1.467	2.882
2	Buruh Tani	376	383	759
3	Buruh migran	9	7	16
4	Pegawai Negeri Sipil	15	5	20
5	Pengrajin rumah tangga	27	2	29
6	Pedagang	1	3	4
7	Peternak	3	-	3
8	Bidang swasta	2	2	4
9	Pensiunan TNI/POLRI	7	-	7
	Jumlah	1.855	1.869	3.724

Sumber: Profil Desa Bangun (2016)

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia di wilayah Desa Wisata Bangun. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang tamat tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 375 orang serta penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 298 orang. penduduk yang terbesar adalah tamat SMP/ sederajat sebanyak 436 orang. Lebih detailnya jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dijelaskan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Bangun Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	156	142	298
2	Tamat SD	175	200	375
3	Tamat SMP	185	251	436
4	Tamat SMA	183	182	365
5	Tamat DI/DII/DIII	23	19	42
6	Tamat S1/S2	4	6	10
8	Belum masuk sekolah	20	17	37
9	Usia 3-6 sedang TK/playgroup	95	92	187
10	Usia 7-18 sedang sekolah	205	200	405
11	Usia 7-18 tidak pernah sekolah	4	2	6
12	Usia 18-56 tidak pernah sekolah	432	157	589
13	Usia 18-56 tidak tamat SD/SMP/SMA	769	891	1.660
		2.251	2.159	4.410

Sumber: Profil Desa Bangun (2016)

c. Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja Produktif

Berdasarkan data tentang jumlah penduduk menurut tenaga kerja produktif di Desa Wisata Bangun, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non produktif. Penduduk yang mempunyai usia produktif di Desa Bangun sebanyak 53,3% dari jumlah penduduk. Berikut data penduduk berdasarkan tenaga kerja produktif:

Tabel 4.4 Jumlah penduduk tenaga kerja produktif Desa Bangun Tahun 2016

No	Usia (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 0-6 th	214	208	422
2	Usia 7-18 th masih sekolah	228	222	450
3	Usia 18-56 th yang bekerja	978	939	1.917
4	Usia 18-56 th belum bekerja	321	304	625
5	Usia 56 tahu ke atas	617	607	1.224
	Jumlah	2.358	2.280	4638

Sumber: Profil Desa Bangun (2016)

5. Potensi Desa Wisata Bangun

a. Potensi Pertanian

Berdasarkan data penggunaan tanah Desa Bangun yang telah disampaikan di atas, penggunaan tanah pertanian yaitu sebesar 28 ha. Melihat kondisi di atas dapat dikatakan bahwa potensi pertanian di Desa Bangun cukup kecil karena mayoritas berupa perkebunan hutan. dari data dari profil desa dapat diketahui bahwa produksi terbesar dari sektor pertanian adalah produksi tanaman padi untuk kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.

Tabel 4.5 Potensi Luas lahan Pertanian berdasarkan komoditas Desa Bangun Tahun 2016

No.	Jenis Komoditas	Luas (ha)
1.	Padi	20
2.	Jagung	2
3.	Kacang tanah	3
4.	Kacang panjang	1
5.	Kedelai	2
	Jumlah	28

Sumber: Profil Desa Bangun (2016)

Dari tabel tersebut komoditas pertanian tanaman padi menjadi tanaman yang ditanam masyarakat selama satu tahun penuh. Berhubung lahan persawahan di Desa Bangun hanya kecil, maka hasil dari tanaman padi digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat desa sendiri. Untuk tanaman lainnya seperti jagung, kacang tanah, kacang panjang dan kedelai merupakan tanaman pendukung yang sebagian hasilnya diperjualbelikan dan sebagian hasilnya lagi digunakan untuk konsumsi pribadi para petani.

b. Potensi Perkebunan hutan

Sumber pendapatan utama masyarakat Desa Wisata Bangun adalah di sektor perkebunan hutan. Luas keseluruhan perkebunan hutan atau masyarakat setempat menyebutnya tanah goplah adalah 815 ha. Tanah goplah adalah tanah hutan milik pemerintah yang dimanfaatkan masyarakat untuk ditanami tanaman produktif dengan sistem bagi hasil. Komoditas perkebunan hutan terbesar adalah tanaman cengkeh seluas 500 ha. Adapun lebih detail tanaman hasil perkebunan hutan dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Potensi Luas lahan Perkebunan hutan Berdasarkan Komoditas Desa Bangun Tahun 2016

No.	Jenis Komoditas	Luas (ha)
1.	Kelapa	100
2.	Kopi	10
3.	Cengkeh	500
4.	Pala	5
5.	Durian	200
	Jumlah	815

Sumber: Profil Desa Bangun (2016)

Tanaman cengkeh menjadi sumber pendapatan masyarakat Desa Bangun. Luas lahan cengkeh seluas 500 ha maka nilai produksi yang dihasilkan selama satu kali panen mencapai 15 milyar. Selain itu, Desa Bangun juga menjadi penghasil durian terbaik di Trenggalek dengan luas lahan 200 ha. Mayoritas masyarakat dalam satu lahan mengkombinasikan tanaman cengkeh dengan tanaman durian sehingga mereka dalam satu tahun dapat memanen keduanya di jenjang waktu yang berbeda.

c. Potensi Peternakan

Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2016 jenis ternak yang terdapat di Desa Wisata Bangun terdiri dari ternak besar (sapi dan kambing) dan ternak kecil (unggas). Dari data yang ada mengindikasikan bahwa perkembangan ternak besar tersebut secara keseluruhan di Desa Bangun terus mengalami peningkatan.

Tabel 4.7 Banyaknya Jenis populasi Ternak Desa Bangun Tahun 2016

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Jumlah Populasi (ekor)
1.	Sapi	8	12
2.	Kambing	225	675
3.	Ayam kampung	360	3.600
	Jumlah	593	4.287

Sumber: Profil Desa Bangun (2016)

Ternak kambing menjadi jenis populasi ternak terbesar di Desa Bangun. Mayoritas kepala keluarga di rumahnya memiliki kambing. Hal ini dikarenakan ternak kambing oleh masyarakat dijadikan sebagai tabungan masa depan. Selain itu ayam kampung sebagai jenis ternak kecil juga hampir dimiliki oleh setiap kepala keluarga di Desa Bangun dikarenakan ayam kampung memiliki pertumbuhan yang cepat dan dibutuhkan untuk konsumsi pribadi masyarakat.

d. Potensi Seni, Budaya dan Sosial Kemasyarakatan

Sebagai layaknya desa di Pulau Jawa, Desa Wisata Bangun masih memegang teguh budaya-budaya khas desa di Jawa, seperti gugur gunung, rembug desa, gotong royong, kerjabakti dan adanya majelis-majelis taklim yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Bangun. Dalam

konteks pembangunan desa, kelembagaan sosial masyarakat Desa Bangun yang masih sangat kental tersebut merupakan modal sosial bagi masyarakat dan bisa dijadikan *trigger* untuk peningkatan pembangunan Desa Bangun.

Aspek yang termasuk ke dalam masalah sosial kemasyarakatan meliputi: karakter sosial dan budaya setempat, sikap, kebiasaan dan perilaku masyarakat.

1) Karakter sosial budaya

Karakter sosial budaya masyarakat Desa Bangun masih mencirikan karakteristik sosial budaya masyarakat cenderung bersifat kekeluargaan dan tidak bersifat *individualistic*. Karakter sosial dan budaya masyarakat ini mengupas masalah sikap, kebiasaan dan perilaku masyarakat serta masalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dengan karakter yang demikian akan mampu mendukung kegiatan pengembangan desa wisata dan dalam jangka panjang kondisi sosial budaya masyarakat ini harus tetap dipertahankan sebagai daya tarik wisata desa.

2) Sikap, Kebiasaan dan Perilaku Masyarakat

Sikap, kebiasaan dan perilaku masyarakat mencerminkan pola kehidupan masyarakat. Masyarakat Desa Bangun mempunyai sikap, kebiasaan dan perilaku yang sangat ramah, bersahabat dan kekeluargaan yang tinggi.

3) Seni dan Keunikan Adat Istiadat

Selain kondisi sosial kemasyarakatan di atas Desa Bangun mempunyai potensi budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan, seperti seni jaranan, wayang, tayuban, ritual tahunan yang berupa “sedekah bumi” dimana dalam acara tersebut mempunyai tujuan untuk mensyukuri karunia Sang Pencipta dalam satu tahun yaitu panen raya dan sebagai ritual bersih desa. Acara- acara tersebut diselenggarakan sekali dalam setahun dan sudah dilaksanakan turun temurun.

Selain itu juga ada Tari Gandhong yaitu tarian yang telah lama vakum dan dihidupkan masyarakat untuk melestarikan budaya lokal. Hal ini dapat dikembangkan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk menyaksikan acara tersebut. Dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai atraksi wisata budaya.

e. Potensi Wisata

Desa Wisata Bangun memiliki potensi wisata beragam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Potensi wisata tersebut terdiri potensi wisata alam, budaya maupun minat khusus. Berbagai potensi wisata tersebut ada yang mulai dikembangkan oleh masyarakat dan ada yang belum dikembangkan sama sekali. Keseluruhan potensi wisata tersebut apabila dapat dikembangkan maka dapat menjadi sumber perekonomian baru bagi masyarakat di sektor pariwisata. Berdasarkan pemetaan potensi wisata yang telah dilakukan oleh peneliti dengan

pengurus Lembaga Desa Wisata Bangun terdapat berbagai jenis potensi wisata yaitu:

1) Potensi Wisata Alam

a) Air Terjun Wonoasri

Air Terjun Wonoasri salah satu wisata alam yang berada di Desa Bangun. Secara tata letak Air terjun Wonoasri berada di Dusun Ngrampal RT. 10 RW 04 Desa Bangun. Arah menuju Air Terjun Wonoasri dari pertigaan Desa Bangun belok kiri atau menuju sebelah utara.

Air Terjun Wonoasri memiliki ketinggian sekitar 30 meter. Kondisi debit air pada musim penghujan sangat besar sedangkan pada musim kemarau debit airnya sedang. Bentuk Air Terjun Wonoasri memiliki cekungan terdapat jalan aliran air yang membentuk ukiran alam yang indah. Area sekitar air terjun ini luas sehingga sangat bagus untuk area pengambilan foto wisatawan yang berkunjung.



Gambar 4.2 Air Terjun Wonoasri
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)

Keindahan yang ditawarkan di Air Terjun Wonoasri berupa keindahan alam yang asri dikelilingi oleh berbagai tanaman durian dan cengkeh. Selain itu para wisatawan yang singgah ke air terjun akan merasa tenang dan tentram karena udara di sekitar air terjun sangat sejuk dan belum tercampuri dengan polutan. Wisatawan dapat melakukan aktifitas berenang maupun bermain di sekitar wahana air terjun.

b) Air Terjun Jurug Tundo

Air Terjun Jurug Tundo terletak di Dusun Bangunsari tepatnya berada di Dukuh Lancur. Arah menuju Air Terjun Jurug Tundo dari pertigaan Desa Bangun belok kanan dan menuju ke Timur. Jurug Tundo berasal dari kata jurug yaitu air terjun dan tundo yaitu tangga. Apabila digabung maka memiliki arti jurug dengan dua tundakan atau tangga. Aliran air yang bertangga dua menjadikan keunikan Air Terjun Jurug Tundo ini.



Gambar 4.3 Air Terjun Jurug Tundo
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)

Air Terjun Jurug Tundo memiliki ketinggian sekitar 40-50 meter. Kondisi air terjun ini bertingkat dua dan masing-masing tingkatnya hampir memiliki ketinggian yang sama. Diantara tingkatan air terjun tersebut terdapat batu lempeng yang tidak dialiri air dan konon kata masyarakat setempat adalah tempat bertapa.

Keindahan yang ditawarkan jurug tundo yakni panorama alam yang membentang luas serta keasrian hutan yang masih alami, didukung dengan aliran air yang bersih dan dingin serta udara sejuk. Akses menuju air terjun ini harus melewati jalan setapak sempit dan hutan durian yang naik turun. Hal ini memberikan pengalaman baru bagi wisatawan yang dapat menguji adrenalin mereka untuk menaklukkan medan jalan tersebut.

2) Potensi Wisata Budaya

a) Seni Tari Gandhong

Tari Gandong merupakan tarian klasik yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Bangun. Tarian yang berasal dari kata Gandong (Gandul Dong) yang artinya kentongan yang diletakkan bergantung kemudian dipukul hingga berbunyi “dong”. Tarian ini dapat dimainkan oleh semua usia baik muda maupun tua dikarenakan gerakannya yang sederhana namun memiliki nilai-nilai filosofi luhur masyarakat Jawa.

Tari Gandhong menggunakan alat peraga utama berupa kentongan. Kentongan sendiri pada masa dahulu sangatlah berarti bagi masyarakat Desa Bangun yakni sebagai sarana komunikasi antar warga. Pemukulan bunyi kentongan tersebut untuk menandai adanya rembuk desa, kegiatan jaga malam, kegiatan gotong royong, dan penanda bahaya.



Gambar 4.4 Seni Tari Gandhong

Sumber: Dokumentasi Ladewi Bangun (2016)

Secara garis besar Tari Gandhong merupakan tarian kolosal bertema tentang kehidupan masyarakat desa bercocok tanam, mulai dari menanam suatu palawija hingga memanennya. Gerakan Tari Gandhong mengambil gerakan petani mulai dari aktivitas membuka lahan, menyiapkan benihnya, menanam tanamannya, menyemai dan merawat tanamannya, memanen hasilnya hingga mengusir para hama perusak tanaman. Tari Gandhong juga sebagai perwujudan tari ucapan terima kasih kepada leluhur terhadap apa yang telah diperoleh dari hasil pertanian masyarakat Desa Bangun. Atraksi Tari Gandhong terletak di Dukuh Lancur Dusun Bangunsari Desa Bangun.

Lokasi latihan rutin Tari Gandhong berada di rumah Bapak Sukir. Beliau adalah tokoh masyarakat sekaligus saksi hidup yang mengetahui tentang sejarah Tari Gandhong. Tarian ini sempat mati suri selama 33 tahun dan terakhir dipentaskan pada tahun 1984. Setelah adanya inisiatif dan komitmen dari masyarakat untuk memajukan desanya melalui sektor pariwisata, maka pada awal tahun 2017 tarian ini dihidupkan kembali sebagai bentuk melestarikan kearifan lokal dan menjadikan sebagai daya tarik wisata budaya. Dalam atraksinya, pengunjung tidak hanya melihat saja melainkan juga dapat ikut menari bersama masyarakat karena gerakannya yang sederhana mudah dipahami namun memiliki nilai filosofi Jawa yang tinggi.

b) Seni Tari Jaranan Turonggo Yakso

Tari Turonggo Yakso merupakan kesenian asli Kabupaten Trenggalek, yang pada awalnya kesenian ini berasal dari “BARITAN” yaitu sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dongko sejak lama. Berkat jasa Bapak Puguh yang juga merupakan warga Dongko, dengan memperkenalkan kesenian Turonggo Yakso akhirnya kesenian ini mulai dikenal sebagai kesenian asli Trenggalek yaitu pada tahun 80-an. Setelah dipatenkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2013, maka tarian ini menyebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek salah satunya Kecamatan Munjungan. Tari Jaranan

Turonggo Yakso ini menceritakan tentang kemenangan warga desa dalam mengusir marabahaya atau keangkaramurkaan yang menyerang desanya.



Gambar 4.5 Tari Turonggo Yakso

Sumber: Dokumentasi Humas Trenggalek (2017)

Tari Turonggo Yakso ini berbeda dengan Kesenian Jaranan yang ada di daerah lain. Perbedaan itu terletak pada kuda-kudaan yang ditungganginya. Jika pada kesenian jaranan, kuda tersebut menggambarkan kuda yang benar-benar berbentuk kuda, sedangkan pada Tari Turonggo Yakso, kuda yang dipakai untuk tampil adalah kuda yang berbentuk Buto.

Tari Turonggo Yakso sendiri menyebar dan meluas di wilayah Trenggalek, sampai ke pelosok pedesaan. Ini semua berkat kerja keras warga Trenggalek sendiri untuk memajukan seni kebudayaannya. Hal ini akan menjadi faktor positif bagi generasi penerus yang akan datang dan menjadi salah satu wahana sebagai simbol dan daya tarik wisata budaya dari Kota Trenggalek sendiri.

c) Seni Tari Tayub

Tayub merupakan kesenian yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Banyak kisah yang menggambarkan tentang tayub. Keberadaan tayub juga masih bertahan di Desa Bangun. Tayub ini hasil campuran dari mitos dan tradisi mengantar kesenian rakyat ini menjadi legenda dan seni yang terus digandrungi warga masyarakat di pedesaan Jawa. Salah satunya menyatakan bahwa pada awal kelahirannya, tayub merupakan ritual sesembahan demi kesuburan pertanian. Tayub sendiri berasal dari kata dalam bahasa Jawa jarwo dhosok “ditata kareben guyub” (diatur agar tercipta kerukunan).



Gambar 4.6 Seni Tayub

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)

Secara filosofi yang ditanamkan pada tayub sebagai kesenian untuk pergaulan. Nilai dasarnya adalah kesamaan kepentingan untuk mengapresiasi kemampuan, jiwa, dan bakat seni baik kemampuan sebagai penabuh gamelan (pengrawit) ataupun penarinya. Kesamaan ini akan melahirkan keselarasan-serasian tayub sebagai suatu bentuk tarian, hentakan kaki sesuai dengan bunyi kendang, lambaian tangan seirama gambang, atau lenggok

kepala tiap pukulan gongnya. Meski pada perkembangannya, “pergaulan” dimaknai secara luas sebagai bentuk silaturahmi.

Tari Tayub biasa disebut tayuban adalah kesenian tradisional Jawa dengan memperlihatkan unsur keindahan dan keserasian gerak. Unsur keindahan dalam tayuban ini diikuti dengan kemampuan penari dalam memainkan tari yang dibawakan. Tayuban di Desa Bangun biasanya dipertunjukkan pada acara bersih desa, hajatan dan acara-acara kebesaran. Tari Tayub merupakan tarian pergaulan yang disajikan untuk menjalin hubungan sosial masyarakat. Pada saat menarikan tari tayub sang penari yang disebut tledek mengajak penari pria dengan cara mengalungkan selendang yang disebut dengan sampur kepada pria yang diajak menari tersebut.

3) Potensi Wisata Minat Khusus

a) Agrowisata Kebun Durian

Desa Wisata Bangun memiliki mayoritas lahan berupa hutan lindung seluas 1.903,8 ha. Selain digunakan sebagai hutan lindung, lahan tersebut oleh masyarakat ditanami tanaman durian dengan sistem bagi hasil dengan Perhutani. Desa Bangun merupakan desa penghasil buah durian terbesar di Kabupaten Trenggalek. Setiap musim panen durian, Desa Bangun selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Tak hanya dari daerah sekitar, namun tak sedikit

diantaranya yang datang dari luar kota untuk mampir membeli buah durian.



Gambar 4.7 Kebun Durian Bangun
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2015)

Sebelum dicanangkan konsep desa wisata, buah durian kebanyakan dibeli oleh pemborong dengan harga yang murah dan dijual ke luar kota. Setelah dicanangkan desa wisata, maka kebanyakan petani durian menjualnya langsung kepada para wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang lebih baik daripada dijual kepada pemborong. Kebun durian tersebut merupakan potensi yang dapat dijadikan sebuah daya tarik wisata baru berupa Agrowisata Kebun Durian.

Di desa yang berada di Kecamatan Munjungan atau sekitar 30 km dari pusat Kota Trenggalek ini, pengunjung bisa jalan-jalan menikmati suasana alam Desa Wisata Bangun di lereng gunung yang sejuk, sekaligus menikmati aneka buah durian yang banyak ditanam di setiap halaman rumah warga maupun di pekarangan belakang rumah. Ketika musim panen tiba, wisatawan bisa

langsung mampir dan memetikinya dengan sangat mudah berdasarkan arahan dari pemilik pohon.

b) Agrowisata Kebun Cengkeh

Penghasilan utama masyarakat Desa Bangun adalah di sektor perkebunan dengan memanfaatkan lahan hutan lindung yang ada. Sektor perkebunan tersebut berupa komoditi cengkeh. Masih banyak masyarakat menggantungkan hidup pada komoditi tersebut, meskipun harganya sering mengalami naik turun. Akan tetapi tidak mengurangi semangat masyarakat untuk melestarikan budaya "*tanam cengkeh*". Umumnya masyarakat di Desa Bangun menganggap bahwa merawat cengkeh itu sama saja dengan mempertahankan harga diri keluarga serta keberlangsungan hidup orang banyak. Bahkan tingkat kekayaan seseorang dapat juga diukur dengan melihat berapa banyak pohon cengkeh yang dimiliki.

Masyarakat Desa Bangun memiliki kebiasaan menanam cengkih, ini dapat dibuktikan dengan mayoritas setiap pria dewasa sudah memiliki pohon cengkeh, yang disiapkan untuk mempertahankan hidupnya ke depan dengan cara menjual hasilnya. Pada satu lahan, penanaman pohon cengkeh dikombinasikan dengan penanaman pohon durian. Selama satu tahun, Desa Wisata Bangun memiliki dua panen raya besar yaitu panen raya durian dan panen raya cengkeh.



Gambar 4.8 Panen Raya Cengkeh

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2015)

Perintisan desa wisata di Desa Bangun memberikan potensi baru juga sebagai daya tarik wisata minat khusus berupa Agrowisata Kebun Cengkeh yang bersifat musiman. Wisatawan bersama petani cengkeh dapat melakukan aktifitas merawat pohon cengkeh, melakukan petik cengkeh pada saat musim panen dan melakukan pengeringan cengkeh serta melakukan proses penyulingan minyak cengkeh.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Penerapan Konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan

Desa Bangun merupakan salah satu desa di Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Bangun sangat beragam meliputi potensi daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus. Potensi daya tarik wisata alam yang dimiliki berupa Air Terjun Wonoasri dan Air Terjun Jurug Tundho. Potensi daya tarik wisata budaya yang dimiliki berupa seni tari Gandhong, seni tari Tayub dan seni tari Jaranan Turonggo Yakso. Dan potensi daya tarik

minat khusus yang dimiliki berupa Agrowisata Kebun Durian dan Agrowisata Kebun Cengkeh.

Masyarakat Desa Bangun dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata menggunakan konsep *Community Based Tourism*. CBT merupakan pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. CBT menekankan kepada pemberdayaan masyarakat untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki seperti kebudayaan, adat istiadat, kuliner, gaya hidup dan potensi alam. Dalam konteks pembangunan wisata, masyarakat secara mandiri melakukan mobilisasi aset dan nilai tersebut menjadi daya tarik utama untuk dijual kepada wisatawan (Arida, 2016:34).

a) Partisipasi Masyarakat Lokal

Penggunaan konsep CBT ini, pada awal perintisannya telah dilaksanakan oleh masyarakat lokal Desa Bangun untuk menggagas pembangunan di sektor pariwisata. Perintisan desa wisata oleh masyarakat Desa Bangun dimulai pada akhir tahun 2015 oleh sekelompok masyarakat yang bernaung dalam komunitas *Bangun Motor Community* (BMC). Mereka mulai sadar untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Bangun. Potensi daya tarik wisata yang pertama kali digagas adalah Air Terjun Wonoasri. BMC secara rutin menggerakkan anggotanya

untuk melakukan kerja bakti pembukaan akses menuju Air Terjun Wonoasri.



Gambar 4.9 Kerja bakti awal pembukaan Air Terjun Wonoasri
Sumber: Dokumentasi Ladewi Bangun (2015)

Latar belakang perintisan Desa Wisata Bangun atas partisipasi masyarakat lokal diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Marjuni sebagai berikut ini.

“...pada awalnya saya bersama teman-teman *Bangun Motor Community* memiliki gagasan untuk membuka Jurug Coban (Air Terjun Wonoasri) menjadi objek wisata di Desa Bangun. Atas inisiatif sendiri dan di dukung oleh Bapak Lurah, kami bekerja bakti untuk membuka akses jalan menuju ke lokasi. Mengingat akses menuju ke Jurug Coban sulit karena masih hutan belantara, maka kami melakukan kerja bakti secara rutin. Kami juga mengajak masyarakat dusun sekitar untuk ikut kerja bakti karena manfaatnya nanti juga akan dinikmati oleh mereka..” (wawancara Bapak Marjuni Pokja DTW Ladewi Bangun, 24 April 2017 pukul 13.19 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, partisipasi yang pada awalnya digerakan hanya oleh sekelompok masyarakat, mulai mendapat dukungan secara luas oleh masyarakat Desa Bangun. Hal ini memunculkan kesadaran bersama bahwa keterlibatan seluruh komponen masyarakat dibutuhkan untuk membangun desanya menjadi sebuah desa wisata.

Kesadaran bersama yang telah ada di masyarakat mendapatkan dukungan dari pemerintah Desa Bangun dengan mengagendakan program

kerjabakti rutin setiap satu minggu sekali untuk membuka dan melebarkan jalan menuju air terjun dan menata bebatuan sungai yang ada di sekitar air terjun. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Puguh selaku kepala desa terkait bagaimana menyadarkan masyarakat lokal sebagai berikut.

“...setelah adanya wacana masyarakat untuk membuka Jurug Coban (Air Terjun Wonoasri), maka kami dari pemerintah desa membuat program kerjabakti rutin setiap satu minggu sekali dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dengan semangat gotong royong, maka pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Tujuannya masyarakat pun juga mulia agar desanya dapat dikenal oleh masyarakat luas dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata. Jadi kami mendukung penuh atas inisiatif masyarakat tersebut...” (wawancara dengan Bapak Puguh Kepala Desa Bangun, 9 Mei 2017 pukul 11.25 WIB).

Pemerintah Desa Bangun melihat bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk membangun desanya di sektor pariwisata. Melalui budaya gotong royong yang masih melekat, masyarakat bahu membahu bekerja tanpa pamrih demi keberlangsungan desanya dapat dikunjungi oleh wisatawan. Partisipasi masyarakat lokal mendorong kesadaran bersama bahwa masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan adalah subjek pelaksana pembangunan yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil dalam sektor pariwisata.



Gambar 4.10 Pemerintah Desa Bangun mendukung kerjabakti

Sumber: Dokumentasi Ladewi Bangun (2015)

Upaya bersama untuk membuka daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri mulai menampakkan hasil dengan adanya wisatawan dari luar desa yang berkunjung. Air Terjun Wonoasri menjadi daya tarik wisata baru yang diminati oleh masyarakat di Kecamatan Munjungan. Setiap akhir pekan selalu ada wisatawan dari masyarakat desa sendiri maupun tetangga desa yang berkunjung. Nama Air Terjun Wonoasri semakin populer karena informasi dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial.

Melihat antusiasme wisatawan mulai banyak yang berkunjung ke Air Terjun Wonoasri, maka komunitas BMC berkordinasi dengan LMDH Desa Bangun melakukan pengajuan pengelolaan air terjun yang merupakan kawasan hutan Perhutani. Hal ini diperkuat wawancara dengan Bapak Mursyid terkait pelibatan LMDH yang mengatakan.

“...Air Terjun Wonoasri terletak di kawasan hutan yang menjadi wewenang Perhutani. Maka dalam mengelola Air Terjun Wonoasri harus ada perjanjian kerjasama antara Perhutani dengan siapapun pihak yang akan mengelolanya. Hal ini dilakukan agar pihak yang mengelola dapat memiliki tanggung jawab dalam pelestarian hutan maupun tanggung jawab secara ekonomi kepada negara...” (wawancara dengan Bapak Mursyid wakil ketua LMDH Desa Bangun, 8 Mei 2017 pukul 19.24 WIB).

Sesuai dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kesadaran masyarakat mulai masuk pada tahap perencanaan daya tarik wisata. komunitas BMC sebagai pelopor awal tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat mulai merencanakan langkah pengelolaan Air Terjun Wonoasri dengan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) kepada Perhutani difasilitasi oleh LMDH Desa Bangun. Partisipasi masyarakat ini

merupakan bentuk bukti antusiasme masyarakat lokal agar pengelolaan daya tarik wisata di Desa Bangun tersebut dapat dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini semakin memberikan harapan kepada masyarakat bahwa tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui sektor pariwisata dapat terwujud.



Gambar 4.11 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan
Sumber: Dokumentasi LMDH Bangun (2015)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata yang berasal dari inisiatif masyarakat lokal sendiri atau istilahnya *bottom up* memberikan keuntungan tersendiri dalam mengelola desa wisata ke depan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Dina selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disparbud Kabupaten Trenggalek terkait dukungan dinas untuk membantu Ladewi Bangun yaitu

“...kami dalam melakukan pembangunan wisata memiliki dua pola pendekatan yaitu *top down* (inisiatif pemerintah) dan *bottom up* (inisiatif masyarakat). Dalam pembangunan desa wisata yang berbasis CBT, pola inisiatif *bottom up* atau yang berasal dari kesadaran masyarakat memiliki semangat berkelanjutan. Pengelolaan yang bersumber dari partisipasi masyarakat akan memberikan semangat rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap daya tarik wisata yang dikelola...” (wawancara dengan Bu Dina, 25 April 2017 pukul 11.38 WIB).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, masyarakat Desa Bangun telah melakukan pendekatan pembangunan desa wisata atas inisiatif sendiri. Melalui pendekatan *bottom up* ini, masyarakat lebih mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi dan solusi mengatasinya.

Melalui partisipasi masyarakat, masyarakat Desa Bangun lebih memahami tentang keadaan lingkungan, sosial, maupun ekonominya. Mereka sebagai subyek pembangunan sehingga nilai manfaat dari kegiatan pariwisata akan semakin mereka rasakan. Selain itu dengan kesadaran yang muncul dari masyarakat sendiri, mereka dapat lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelestarian daya tarik wisata yang mereka kelola. Hal ini memberikan dampak bahwa pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun dapat berkelanjutan.

b) Pembentukan Kelembagaan Desa Wisata

Kelembagaan merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Kelembagaan berperan dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata di Desa Bangun. Pentingnya keberadaan kelembagaan dalam bidang pariwisata di Desa Bangun karena kelembagaan dapat berperan sebagai wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata. Di dalam pengembangan kelembagaan desa wisata, perlu adanya perencanaan awal yang tepat dalam menentukan usulan program atau kegiatan.

Adanya partisipasi masyarakat untuk mengelola daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri dalam upaya perintisan Desa Wisata Bangun merupakan langkah awal yang baik agar pengelolaannya dapat terarah dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan tentunya dibutuhkan wadah kelembagaan yang tepat dan terfokus menata seluruh potensi pariwisata yang ada. Berawal dari situ, BMC mengusulkan pengajuan pengelolaan Air Terjun Wonoasri dalam bentuk PKS (Perjanjian Kerjasama) kepada Perhutani. Usulan ini tidak mendapatkan dukungan oleh masyarakat sekitar karena BMC merupakan organisasi sosial masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan bukan di bidang pariwisata. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Puguh terkait kendala pemerintah desa dalam menghadapi kendala ketidaksepahaman antar masyarakat melalui wawancara sebagai berikut.

“...teman-teman dari komunitas BMC telah mengajukan pengelolaan air terjun wonoasri yang difasilitasi LMDH kepada Perhutani. Namun hal tersebut tidak mendapat dukungan masyarakat karena komunitas tersebut tidak bergerak di sektor pariwisata. Masyarakat memerlukan organisasi/lembaga yang memang bergerak di bidang pariwisata agar pengelolaannya tidak salah arah dan bertanggung jawabannya jelas...” (wawancara dengan Bapak Puguh Kepala Desa Bangun, 9 Mei 2017 pukul 11.31 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat lokal memerlukan kelembagaan yang dapat mengatur, merencanakan dan mengelola potensi wisata yang dimiliki Desa Bangun. Kelembagaan yang dikehendaki oleh masyarakat Desa Bangun merupakan kelembagaan yang dapat mengelola dan mengintegrasikan seluruh potensi wisata menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk desa wisata. Dalam menangani seluruh

potensi wisata yang ada, tentunya tidak lepas dari peran kelembagaan yang memang bergerak di bidang yang bersangkutan. Oleh karena itu, kelembagaan yang sesuai dengan kapasitasnya mutlak diperlukan agar langkah ke depan dalam menangani desa wisata dapat terencana dengan baik.

Peran kelembagaan yang sesuai dengan pembangunan desa wisata menjadi sangat krusial dibutuhkan karena harus dapat menaungi seluruh kebutuhan masyarakat Desa Bangun dalam mempersiapkan perintisan desa wisatanya secara terarah dan berkelanjutan. Peran kelembagaan yang dibutuhkan mencakup kepemimpinan dan kordinasi, kemitraan eksternal, kapasitas untuk mengembangkan atraksi wisata, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Prafitri, 2016). Semua peran tersebut harus dapat diakomodir oleh kelembagaan yang akan dibentuk. Maka untuk membentuk kelembagaan tersebut, semua komponen masyarakat di Desa Bangun dilibatkan antara lain Pemerintah Desa Bangun, Karang Taruna Desa Bangun, komunitas BMC, LMDH, BPD Desa Bangun, dan tokoh masyarakat. Pelibatan ini bertujuan untuk merumuskan bentuk kelembagaan yang tepat dan menyiapkan orang-orang yang tepat untuk menjalankan roda kelembagaan.

Pemerintah Desa Bangun mengundang Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Trenggalek (ASIDEWI) untuk terlibat membentuk kelembagaan yang tepat. Asidewi Kabupaten Trenggalek merupakan wadah jejaring bersama para pelaku desa wisata yang dibentuk untuk

mengakomodir segala kebutuhan pelaku desa wisata, menjembatani pelaku desa wisata dengan pemerintah dan melakukan pendampingan rutin terhadap desa wisata baik bagi desa wisata yang berpotensi, berkembang maupun maju di Kabupaten Trenggalek. Pelibatan Asidewi Kabupaten Trenggalek dalam membantu proses pembentukan kelembagaan desa wisata di Desa Bangun dimulai dengan pemberian wawasan tentang kepariwisataan, konsep pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata (CBT) dan kelembagaan desa wisata.

Melalui pemberian wawasan tersebut, masyarakat semakin paham dan terbuka pikirannya tentang perkembangan dunia pariwisata dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat ke depan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Heru ketua Asidewi Kabupaten Trenggalek terkait dukungan dalam perintisan Desa Wisata Bangun sebagai berikut

“...dalam melakukan pengelolaan potensi wisata maka diperlukan kelembagaan yang tepat. Hal ini bertujuan agar arah pengelolaan potensi wisata tersebut dapat berkelanjutan. Masyarakat Desa Bangun sudah memulainya dengan inisiatif sendiri. Maka proses selanjutnya adalah memberikan wawasan tentang pariwisata. Setelah masyarakat paham tentang pariwisata, maka wadah untuk mengakomodir tujuan masyarakat tersebut harus dibentuk. Dalam hal ini adalah Lembaga Desa Wisata dengan kepengurusan yang tepat. Lembaga tersebut harus mampu berkomunikasi dengan stakeholders lain dan mampu membuat pola pengelolaan potensi wisata secara baik. Ladewi yang dibentuk, kepengurusannya harus dapat terus mau belajar agar kualitas SDM nya dalam pariwisata terus meningkat...” (wawancara dengan Bapak Heru Ketua Asidewi Kabupaten Trenggalek, 15 Mei 2017 pukul 20.05 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan kelembagaan desa wisata memperhatikan aspek kepengurusan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Desa

Bangun. Melalui rembug desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Bangun, seluruh komponen masyarakat sepakat untuk membentuk Lembaga Desa Wisata Bangun. Kepengurusannya dipilih berdasarkan musyawarah bersama dan anggota di dalamnya melibatkan seluruh perwakilan komponen masyarakat yang ada di Desa Bangun.

Pembentukan kelembagaan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat memberikan manfaat terjalannya komunikasi yang baik dengan organisasi di tingkat desa yang ada. Ladewi Bangun dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Pemerintah Desa, Karang Taruna maupun organisasi lainnya sehingga kerukunan dan kordinasi dapat terjalin dengan baik. Selain itu, pendampingan yang dilakukan Asidewi Trenggalek memberikan manfaat kepada Ladewi Bangun untuk dapat berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek maupun dengan pelaku desa wisata yang berada di naungan Asidewi Indonesia.

SUBURAH PENGURUS KELOMPOK SADAN WISATA (PONDARWIS) "DEWI BANGUN" DESA BANGUN KECAMATAN BULJUNDAN KABUPATEN TRENGGALIK		
NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/ PEJABAT
1	Penasehat	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALIK
2	Pembina	Sani
3	Ketua	Agus Purwadi
	Wakil Ketua	Wahyu Purwanto
	Sekretaris	Anas Mithachusia
		Eka Entarto
	Bendahara	Dei Nurcahyo
4	Divisi	
	a. Divisi Pertanian	Sulhono
		Kusnin
	b. Divisi Daya Tarik Wisata	Mujoko
		Martani
	c. Divisi Homestay	Sulhono
		Dansar Ratih
	d. Divisi Tour Guide	Ash Winarti
		Siti Murtah
		Ika
		Safri Maarif
	e. Divisi Humas	Hari Susanto
		Supeni
		Yoni Wahyudi
		Totok Hidayat
	f. Divisi Seni dan Budaya	Rendi Cahyo Permadi
		Teguh Yasmi
		Daryono
		Supri
	g. Divisi Marketing	Carlos Sireh
		Yohanes Adi Pratama

Gambar 4.12 Kepengurusan Ladewi Bangun

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

Musyawarah pembentukan lembaga desa wisata yang telah dilakukan mengamanatkan kepada Ladewi Bangun untuk mengelola seluruh potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Bangun. Pengurus Ladewi didampingi oleh Karang Taruna dan Asidewi Trenggalek melakukan pemetaan potensi wisata yang akan dikembangkan. Hasil pemetaan potensi wisata tersebut mengklasifikasikan potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Bangun ke dalam kategori potensi wisata alam, budaya dan minat khusus. Dari hasil pemetaan tersebut, Ladewi juga bersepakat bahwa yang akan dijadikan prioritas pengelolaan pertama adalah memunculkan produk wisatanya berupa Air Terjun Wonoasri.

Pemilihan Air Terjun Wonoasri ini didasari bahwa sebelum pembentukan Ladewi Bangun, masyarakat telah memulainya lebih dulu. Maka oleh Ladewi program yang dimulai oleh masyarakat tersebut diteruskan menjadi program prioritas Ladewi Bangun untuk mengelola Air Terjun Wonoasri. Agar tugas pengelolaan tersebut bisa terfokus, maka Ladewi Bangun membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Dusun Rampal untuk mengurus pengelolaan Air Terjun Wonoasri. Pokja Dusun Rampal keanggotannya diambil dari seluruh masyarakat Dusun Rampal yang memiliki semangat dan antusias membangun desanya melalui pariwisata.

Prioritas kedua yang dijalankan oleh Ladewi Bangun adalah menghidupkan daya tarik wisata budaya. Di Desa Bangun terdapat kesenian asli desa yang telah punah dan dihidupkan kembali. Kesenian tersebut bernama Tari Gandhong yang terletak di Dusun Bangunsari.

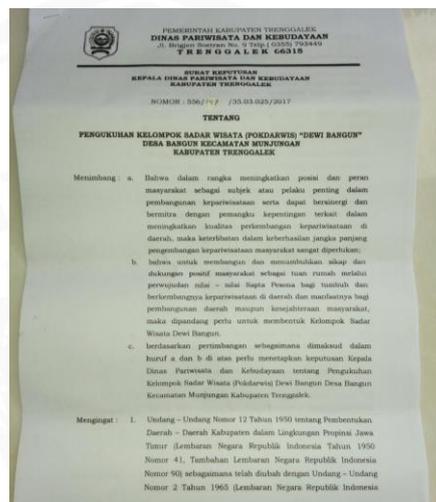
Untuk menghidupkan kesenian tersebut, Ladewi Bangun membentuk kepengurusan Tari Gandhong yang keanggotannya diambil dari masyarakat Dusun Bangunsari. Masyarakat Dusun Bangunsari sangat antusias mendukung program Ladewi Bangun.

Program prioritas yang dijalankan Ladewi Bangun berupa pengelolaan Air Terjun Wonoasri dan menghidupkan kembali kesenian Tari Gandhong. Hal ini sesuai dengan wawancara yang diberikan Bapak Agus selaku Ketua Ladewi Bangun terkait program Ladewi Bangun.

“...pembentukan Ladewi Bangun memberikan harapan baru dalam pembangunan desa. Setelah terbentuk kepengurusan, kami melakukan kordinasi dengan seluruh komponen masyarakat untuk ikut membantu mewujudkan pembangunan desa melalui desa wisata. atas dampingan dari Asidewi Trenggalek, kami juga memulai berkomunikasi dengan dinas pariwisata maupun dengan kawan-kawan pelaku desa wisata lainnya. Prioritas awal yang kami lakukan adalah mengelola Air Terjun Wonoasri dan menghidupkan kesenian Tari Gandhong. Kemudian kami juga mulai melakukan peningkatan kualitas SDM kami dengan mengikuti program-program pelatihan yang diselenggarakan dinas pariwisata maupun program pelatihan rutin yang dilakukan oleh Asidewi Trenggalek. Sembari melaksanakan peningkatan skill kami, kami juga mulai mempromosikan air terjun yang kami kelola...” (wawancara dengan Bapak Agus ketua Ladewi Bangun, 8 mei 2017 pukul 23.56 WIB).

Berdasarkan keterangan yang diberikan dari beberapa narasumber, pembentukan kelembagaan desa wisata memberikan wadah yang tepat kepada masyarakat untuk membangun desa wisatanya. Fungsi kepengurusan dalam Ladewi Bangun berhasil menggerakkan masyarakat untuk mengembangkan dua potensi daya tarik wisata untuk dikembangkan yaitu Air Terjun Wonoasri dan kesenian Tari Gandhong. Kemitraan dengan *stakeholders* lain juga berjalan baik. Terbukti dalam mengelola daya tarik wisatanya, Ladewi Bangun selalu didampingi oleh Karang

Taruna, LMDH, Asidewi Trenggalek, Pemerintah Desa Bangun dan Disparbud Kabupaten Trenggalek. Hal yang sama dalam peningkatan kualitas SDM juga terus dilakukan oleh Ladewi Bangun melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi terkait maupun pendampingan rutin Asidewi Trenggalek.



Gambar 4.13 SK Pembentukan Ladewi Bangun
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

Dalam perkembangannya menjalankan fungsi kelembagaan, terjadi kendala kurang harmonisan antara Ladewi Bangun dengan Pokja Dusun Rampil. Hal ini disebabkan adanya komunikasi yang tidak berjalan diantara kedua belah pihak. Penyebabnya adalah rasa saling curiga terhadap laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Kekurang harmonisan ini menyebabkan kelembagaan yang seharusnya dalam menjalankan tugasnya menjadi satu kesatuan, malah berjalan sendiri-sendiri. Dampaknya pengelolaan daya tarik wisata yang telah berjalan menjadi terhambat.

Kekurang harmonisan ini menemukan solusi penyelesaian dalam kegiatan *Focus Group Discussion* yang dilakukan peneliti bersama seluruh komponen masyarakat terkait. Hasil penyelesaian tersebut disampaikan oleh Bapak Agus selaku Ketua Ladewi Bangun terkait kendala dan cara mengatasinya dalam wawancara sebagai berikut.

“...kami sempat jalan ditempat dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Disebabkan karena miskomunikasi kami Ladewi Bangun dengan temen-temen Pokja Dusun Rampal. Akibatnya banyak kegiatan yang seharusnya berjalan menjadi terhenti. Melalui rembukan yang difasilitasi oleh peneliti, akhirnya permasalahan tersebut menemukan solusinya. Adapun solusi tersebut bahwa kami sepakat mengadakan pertemuan rutin satu bulan sekali untuk laporan pertanggung jawaban pengelolaan, sistem keuangan sekaligus upgrading pengetahuan anggota tentang kepariwisataan...” (hasil FGD tanggal 10 Juni 2017 pukul 19.45 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat yang memiliki antusias tinggi dalam menjalankan kelembagaan mengalami kurang kordinasi antar pengurus. Konflik yang terjadi tidak segera diatasi sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan antar pengurus. Musyawarah bersama melalui FGD yang difasilitasi oleh peneliti memberikan jalan keluar untuk mengatasi ketidak harmonisan tersebut. Di dalam penyelesaiannya juga memberikan hasil kesepakatan agar antar pengurus lebih sering melakukan pertemuan sehingga menghindari kesalahpahaman melalui agenda rembuk rutin setiap tanggal 10. Kesepakatan kedua yaitu pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan bulanan yang selama ini menjadi akar permasalahan yang terjadi. Dan kesepakatan terakhir yaitu setiap sebulan sekali memberikan pemahaman tentang kepariwisataan kepada seluruh pengurus

Ladewi Bangun maupun komponen masyarakat lainnya agar semakin paham tentang pariwisata.

c) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan pada intinya berkaitan usaha menjamin agar sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang (Sunaryo, 2013:48). Sudah menjadi kewajiban kepada Ladewi Bangun maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk selalu mengupayakan agar hubungan antara kepariwisataan dan lingkungan berjalan secara sinergis. Ladewi Bangun dalam mengamankan tupoksi pengelolaan daya tarik wisata di Air Terjun Wonoasri kepada Pokja Dusun Rampal selalu menekankan agar terciptanya hubungan saling menguntungkan antara kegiatan pariwisata dengan kondisi alam sekitar air terjun.

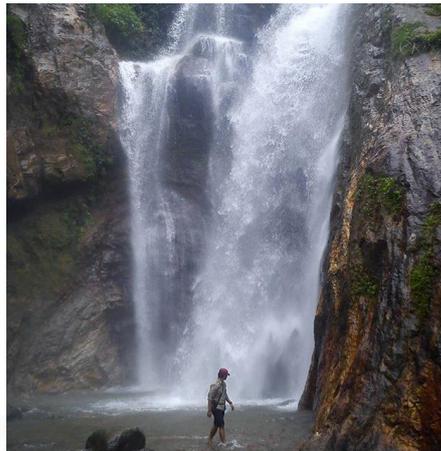
Setelah ditentukan prioritas pembangunan desa wisata yaitu salah satunya pengelolaan Air Terjun Wonoasri, maka Ladewi Bangun menunjuk Pokja Dusun Rampal sebagai kepanjangan tangan dari Ladewi Bangun dalam pengelolaan daya tarik wisata di sana. Segala aktifitas pengelolaan Air Terjun Wonoasri ditangani oleh Pokja yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sulih selaku Ketua Pokja Dusun Rampal sebagai berikut.

“...saya dalam kepengurusan Ladewi Bangun diamanatkan untuk mengelola Jurug Coban (Air Terjun Wonoasri). Kemudian saya mengajak masyarakat Dusun Rampal untuk melaksanakan program ini. Keikutsertaan masyarakat Dusun Rampal adalah kesadaran sendiri bahwa

mereka ingin dusunnya bisa ramai dan apabila nanti sudah ramai, bisa meningkatkan pendapatan para warga di dusun rampal. Setelah itu terbentuklah Pokja dusun Rampal. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah memperbaiki akses jalannya biar bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Setelah itu kami menata lokasinya mulai dari tempat parkir sampai ke objek utamanya dengan konsep yang berbeda-beda...” (wawancara dengan Bapak Sulih, 24 april 2017 pukul 15.23 WIB).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Air Terjun Wonoasri dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Bahkan dalam pelaksanaannya masyarakat ikut berperan aktif membantu Pokja Dusun Rampal untuk kerjabakti melebarkan akses jalan maupun penataan di dalam lokasi air terjun. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sekitar air terjun wonoasri sangat terbuka menerima pembangunan pariwisata di sana. Pokja Dusun Rampal sangat gencar melakukan pengelolaan di sana karena mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar.

Pokja Dusun Rampal membuat arah pengelolaan Air Terjun Wonoasri mampu berlanjut secara lingkungan. Mereka dalam memperlebar akses jalan sangat memperhatikan dan memilah pohon-pohon yang bisa ditebang ataupun tidak bisa ditebang. Bebatuan disekitar sungai juga dirapikan tanpa menghancurkan bebatuan tersebut. Pokja Dusun Rampal membuat komitmen bahwa ketika menebang pohon di sekitar lokasi, maka wajib mengganti dengan menanam pohon baru. Berbagai fasilitas yang dibangun mayoritas menggunakan bahan yang dari alam dan tidak permanen, sehingga kelestarian dan kealamian di sekitar air terjun tetap terjaga.



Gambar. 4.14 Kondisi Air Terjun Wonoasri

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)

Penataan lokasi Air Terjun Wonoari oleh Pokja Dusun Rampal dibagi menjadi beberapa wilayah zonasi. Hal ini sesuai dengan wawancara Mas Riki terkait konsep pengelolaan Air Terjun Wonoasri sebagai berikut.

“...pengelolaan air terjun ini tidak dapat berjalan baik tanpa adanya dukungan masyarakat sekitar. Kami dalam mengelola wilayah Air Terjun Wonoasri, kami bagi dalam tiga wilayah pengelolaan. Masukan ini kami dapat dari temen-temen Asidewi Trenggalek. Wilayah tersebut antara lain wilayah perekonomian yang terdiri dari warung-warung dan area parkir. Wilayah kedua adalah daya tarik wisata pendukung seperti Kedung Prau yang bisa digunakan untuk mandi maupun berenang dan lahan area kosong yang rencananya akan kami buat area outbond. Wilayah ketiga adalah air terjunnya sendiri dengan kami tambah rumah pohon, taman bunga dan tempat duduk yang terbuat dari kayu...” (wawancara dengan mas riki anggota Pokja Dusun Rampal, 24 April 2017 pukul 16.36 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pokja Dusun Rampal memperhatikan zonasi wilayah pengelolaan. Melalui sistem zonasi tersebut mereka telah memilah dan menempatkan pengelolaan sesuai tempatnya masing-masing.

Sistem zonasi atau Pokja Rampal menyebutnya istilah wilayah membuat alur perjalanan ketika wisatawan berkunjung dapat tertata secara rapi. Selain itu, daya tarik wisata utamanya dengan adanya sistem zonasi tersebut dapat menunjukkan pesona kealamiannya dan terhindarkan dari dampak kesemrawutan pengelolaan. Ketika masuk ke wilayah Air Terjun Wonoasri langsung disambut masuk ke dalam zonasi pertama yaitu wilayah perekonomian. Pokja Dusun Rampal memberikan lokasi yang bisa dibuat untuk menambah pendapatan masyarakat sekitar. Dari situ akhirnya muncul warung-warung tidak permanen yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Selain itu, lokasi parkir juga dibuat untuk memberikan fasilitas penitipan kendaraan bagi wisatawan agar lebih aman.



Gambar 4.15 Zona Perekonomian

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

Zonasi yang kedua adalah wilayah daya tarik wisata pendukung. Kedung yang semula tidak ada daya tariknya dikelola menjadi sebuah daya tarik wisata pendukung. Kedung tersebut dinamakan Kedung Prahu. Bebatuan disekitar kedung ditata sehingga kedung tersebut dapat digunakan berenang oleh wisatawan. Pengelola menyediakan jasa penyewaan pelampung untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan

yang mau mandi tetapi tidak dapat berenang. Di samping Kedung Prahu oleh pengelola dibuatkan jembatan penyeberangan untuk memudahkan akses menuju air terjun wonoasri. Jembatan tersebut dibuat secara alami berasal dari kayu. Pengerjaan jembatan tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar. Di sekitar Kedung Prahu, juga terdapat lahan kosong yang rencana ke depan akan dibuat wahana *outbond* oleh pengelola.



Gambar 4.16 Zona daya tarik wisata pendukung
Sumber: Dokumentasi pesona bangun (2017)

Zonasi yang ketiga adalah wilayah air terjun wonoasri. Pengelola melakukan penataan lokasi di wilayah air terjun dengan membuat taman yang ditanami berbagai jenis bunga. Di sepanjang jalan ditanami bunga hias sehingga menambah estetika Air Terjun Wonoasri. Pokja Dusun Rampal juga memanfaatkan pohon disekitar untuk dijadikan rumah pohon. Pohon yang sudah tua ditebang untuk dijadikan tempat duduk. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian hutan, pohon yang dimanfaatkan tersebut direboisasi dengan menanam pohon baru.

Penerapan sistem zonasi ini juga dijelaskan oleh Mas Eka selaku Sekretaris Ladewi Bangun terkait program yang dibuat sebagai berikut.

“...kami mengelola Air Terjun Wonoasri ini menerapkan sesuai konsep pariwisata yang pernah diberikan dalam pelatihan yang kami ikuti. Kami tidak ingin dampaknya pariwisata malah akan merusak lingkungan kami. Oleh karena itu kami buat zonasi untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Dengan penataan zonasi yang baik, pastinya juga akan memberikan kesan alur perjalanan yang baik kepada wisatawan. Dan yang tidak kalah penting, zonasi ini semakin mempermudah kami untuk melakukan pembangunan ke depan karena masing-masing wilayah/zona sudah jelas arahnya...” (wawancara dengan Mas Eka Sekretaris Ladewi Bangun, 22 April 2017 pukul 14.05 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut didapatkan kesimpulan bahwa dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata, masyarakat Desa Wisata Bangun telah memulai penataan objek wisatanya menggunakan kaidah pariwisata berwawasan lingkungan. Terbukti dari masyarakat lokal telah mendukung bahkan ikut membantu pengelolaan di Air Terjun Wonoasri dengan adanya kerjabakti rutin baik yang diselenggarakan pihak pemerintah desa maupun diselenggarakan oleh pengelola sendiri. Perhatian terhadap pelestarian alam di sekitar air terjun juga diperhatikan.

Berdasarkan observasi peneliti, pengelola dalam melakukan pembenahan lokasi yang memanfaatkan pohon yang sudah tua dan mengganggu kenyamanan ditebang untuk digunakan membangun fasilitas pendukung. Tetapi penebangan tersebut diimbangi dengan menanam kembali dengan pohon yang baru sehingga usaha pelestarian hutan benar-benar dapat dijaga dengan baik. Dan yang terakhir melalui pembuatan zonasi, pengelola dapat membedakan wilayah yang memang digunakan untuk kegiatan pariwisata dan wilayah yang dapat digunakan untuk usaha ekonomi masyarakat serta wilayah yang harus dijaga kelestariannya.



Gambar 4.17 Zona inti (daya tarik utama)

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

Tetapi dalam perjalanannya, pelaksanaan pengelolaan tersebut terjadi kendala sempat terhambat dikarenakan kurang adanya kordinasi antara Ladewi Bangun dengan Pokja Dusun Rampal. Hal ini dibenarkan dalam wawancara dengan Bapak Agus Ketua Ladewi Bangun terkait kendala yang dihadapi sebagai berikut.

“...pengelolaan yang dilakukan oleh teman-teman Ladewi Bangun dengan Pokja Dusun Rampal sebenarnya masih kurang maksimal karena adanya kurang kordinasi. Kami sempat berjalan sendiri-sendiri karena adanya rasa saling curiga diantara kami. Pokja dalam menjalankan tugasnya tidak berkordinasi dengan kami (Ladewi), dan kami pun dalam menjalankan tugas kami, tidak berkordinasi dengan Pokja...” (wawancara dengan Bapak agus ketua Ladewi Bangun, 9 Mei 2017 pukul 24.38 WIB).

Akibat dari kurang kordinasi tersebut, ketika pengelolaan Air Terjun Wonoasri mengalami permasalahan seperti terjadinya kecelakaan wisatawan, penekanan pembukaan tiket oleh Perhutani dan jumlah wisatawan yang mengalami penurunan tidak dapat segera teratasi. Hal ini ditambah dengan fasilitasi untuk mencari solusi jalan keluar tidak terlaksana.

Berdasarkan hal tersebut, melalui musyawarah bersama yang difasilitasi oleh peneliti dalam bentuk FGD mulai dapat menemukan titik temu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengelola. Ladewi Bangun dengan Pokja Dusun Rampal membangun komitmen untuk dapat bekerja bersama-sama kembali. Belajar dari kesalahan, arah dan tujuan pengelolaan semakin diperjelas dalam bentuk membangun komunikasi yang baik diantara pengelola. Arah pengelolaan dibuatkan prioritas dengan melanjutkan pengelolaan Air Terjun Wonoasri yang berwawasan lingkungan.

d) Terciptanya Kegiatan Usaha Masyarakat

Peningkatan dan pemerataan perekonomian di sektor pariwisata merupakan cita-cita masyarakat Desa Wisata Bangun. Melalui inisiatif perintisan desa wisata yang dilakukan oleh masyarakat Bangun membuktikan bahwa selain untuk kemajuan desanya, masyarakat memiliki kesadaran untuk menangkap peluang perekonomian di desa wisata. Pembentukan wadah pengelola dalam bentuk Ladewi Bangun menjadi penggerak dan penampung aspirasi masyarakat untuk memanfaatkan peluang perekonomian tersebut.

Perekonomian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang digerakkan oleh Ladewi Bangun berupa kegiatan usaha masyarakat. Dalam kepengurusan Ladewi Bangun terdapat Pokja yang dapat memunculkan kegiatan usaha masyarakat antara lain Pokja Daya Tarik Wisata, Pokja Tour Guide, Pokja Pertanian atau agrowisata, Pokja

Homestay dan Pokja Kuliner. Keseluruhan Pokja tersebut merupakan peluang usaha yang akan memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat Desa Bangun. Diantara Pokja tersebut yang mulai berjalan untuk kegiatan usaha masyarakat yaitu Pokja Daya Tarik Wisata dan Pokja Kuliner. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Agus terkait kegiatan usaha masyarakat yang muncul sebagai berikut.

“...Ladewi Bangun memiliki struktur kepengurusan yang nantinya dapat menampung kegiatan usaha masyarakat sekitar dalam bentuk Pokja. Tentunya untuk menghidupkan seluruh Pokja yang berkaitan dengan usaha masyarakat butuh proses dan waktu. Pokja daya tarik wisata dan pokja kuliner menjadi prioritas untuk kami dahulukan pengembangannya. Hal ini kami dasari bahwa untuk saat ini kami memprioritaskan untuk memunculkan daya tarik wisata yang ada di Desa Bangun. Dari situ kami beranggapan bahwa kedua Pokja tersebut harus kami hidupkan dahulu baru nanti ke Pokja yang lain...” (wawancara dengan Bapak Agus ketua Ladewi Bangun, 9 Mei 2017 pukul 24.20 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, Ladewi Bangun dalam menjalankan fungsinya memprioritaskan Pokja Daya Tarik Wisata dan Pokja Kuliner untuk dihidupkan terlebih dahulu. Ladewi Bangun dalam membangun desa wisata menerapkan pembangunannya melalui *step by step*. Nama Desa Wisata Bangun menjadi bentuk produk akhir yang nantinya akan mereka wujudkan. Mereka memprioritaskan pengelolaan Daya Tarik Wisata satu per satu dimulai dengan pengelolaan Air Terjun Wonoasri dan menghidupkan usaha kuliner di wilayah air terjun tersebut. Tujuan mereka melakukan prioritas tersebut agar masyarakat dapat benar-benar fokus menyiapkan produk wisatanya sampai dapat memberikan hasil keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi tersebut.



Gambar 4.18 Kegiatan usaha masyarakat

Sumber: Dokumnetasi Peneliti (2017)

Pengelolaan Air Terjun Wonoasri melalui prioritas tersebut mulai memberikan hasil berupa munculnya nilai ekonomi di sana. Nilai ekonomi yang muncul berupa adanya jasa penitipan sepeda motor, jasa penyewaan pelampung dan berdirinya warung di lokasi Air Terjun Wonoasri. Jasa penitipan sepeda motor ini bernominal Rp. 2.000,00 setiap motor. Dan untuk jasa penyediaan pelampung ini bernominal Rp. 5.000,00. Sedangkan untuk pendirian warung ini pihak pengelola hanya menyediakan lahan dan tidak menarik retribusi kepada pemilik warung. Terdapat tiga warung yang telah didirikan masyarakat. Walaupun Pokja Dusun Rampal tidak menarik retribusi, pemilik warung atas inisiatif sendiri setiap seminggu sekali memberikan sedikit keuntungannya untuk dimasukkan dalam khasnya pengelola.

Melalui informasi mulut ke mulut dan media sosial, wisatawan selalu berdatangan untuk melihat keindahan Air Terjun Wonoasri. Air Terjun Wonoasri selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap akhir pekan dan hari libur nasional. Sejalan dengan adanya pengunjung yang terus

datang, pendapatan pengelola dalam penyediaan jasa penitipan sepeda motor dan penyediaan pelampung juga terus meningkat. Demikian juga hasil penjualan dari usaha warung makan tersebut semakin meningkat. Masyarakat mulai mendapatkan manfaat secara ekonomi dengan adanya pengelolaan Air Terjun Wonoasri walaupun manfaat tersebut masih belum besar.

Hasil dari kegiatan usaha yang dirintis tersebut keuntungannya oleh pengelola dimanfaatkan untuk membenahi Air Terjun Wonoasri. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Mas Riki anggota Pokja Dusun Rampal terkait kegiatan usaha masyarakat yang muncul sebagai berikut.

“...untuk saat ini kami pihak pengelola sudah mulai mendapatkan pemasukan dari Air Terjun Wonoasri. Pemasukan tersebut berupa jasa penitipan sepeda motor yang kami buat dan kami menyewakan pelampung bagi wisatawan yang ingin berenang di Kedung Prahu. Hasil pemasukan tersebut kami kumpulkan dan kami alokasikan lagi untuk menambahkan fasilitas di sana. Kami tidak menerima bayaran karena dalam pengelolaan ini masih dalam tahap berjuang. Kami juga menyediakan lahan kepada masyarakat yang ingin berjualan makanan. Dan saat ini sudah ada tiga warung makan yang sudah berdiri...” (wawancara dengan Mas Riki anggota Pokja dusun Rampal, 24 April 2017 pukul 16.59 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, meskipun pihak pengelola sudah mulai mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang diciptakan, mereka tidak mengambilnya untuk upah pribadi. Mereka beranggapan pengelolaan ini masih dalam tahap rintisan/perjuangan, jadi hasil pendapatan tersebut mereka kembalikan untuk menambah fasilitas maupun mempercantik lokasi Air Terjun Wonoasri.

Kegiatan usaha masyarakat mulai tumbuh walaupun masih dalam skala kecil. Ladewi Bangun yang dalam hal ini diwakili Pokja Dusun

Rampal tidak segera ingin menikmati hasil dari aktifitas pariwisata yang telah ada. Mereka berinvestasi dalam bentuk *asset* fasilitas agar wisatawan semakin nyaman berkunjung ke Air Terjun Wonoasri. Untuk saat ini mereka tidak keberatan hasil dari usaha tersebut belum dapat mereka nikmati. Tetapi suatu saat ketika fasilitas yang mereka investasikan telah mencukupi kenyamanan wisatawan, mereka berkeyakinan akan mendapatkan hasil yang berlipat.

Masih banyak kegiatan usaha masyarakat yang berpeluang bisa ditumbuhkan di sekitar Air Terjun Wonoasri. Tetapi masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan masih mengalami keterbatasan pendanaan. Jadi melalui keterbatasan pendapatan yang ada saat ini, perlahan-lahan kegiatan usaha wisata yang lain akan dihidupkan. Mereka berkeyakinan, melalui semangat kebersamaan hal yang tidak mungkin suatu saat akan mungkin. Semangat seperti itu yang tumbuh di masyarakat Desa Bangun sehingga walaupun mereka belum memperoleh manfaat secara signifikan dari kegiatan usaha tersebut, mereka tetap tidak putus semangat dalam mewujudkan desa wisata di Desa Bangun.

2. Peran *Stakeholders* terkait dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan

a. Peran Masyarakat sebagai pelaku pengelolaan Daya Tarik Wisata

Melalui konsep pariwisata berkelanjutan masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Lebih jauh, pariwisata juga diharapkan memberikan peluang dan akses kepada

masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti toko kerajinan, toko cindramata (souvenir), warung makan dan *homestay* agar masyarakat lokalnya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya (Hermanto, 2016). Masyarakat Desa Bangun yang bermukim di sekitar Air Terjun Wonoasri mulai mendapatkan kontribusi walaupun masih kecil dengan keberadaan obyek wisatanya.

Peran masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun sangat besar. Masyarakat berinisiatif sendiri untuk mengelola potensi wisatanya. Masyarakat Desa Bangun pada awal perintisannya menjadi penggerak utama dari kegiatan pariwisata yang ada di sana. Dalam perjalanannya, fungsi penggerak tersebut diwadahkan dalam bentuk Ladewi Bangun. Ladewi Bangun dalam menjalankan tupoksinya tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang lainnya yaitu Karang Taruna dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Mereka selalu berkordinasi dan saling mengisi dalam menjalankan tugasnya dalam kegiatan pariwisata.

Masyarakat lokal yang diwakili oleh Ladewi Bangun memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Agus terkait koordinasi dengan kelompok lain sebagai berikut.

“...Ladewi Bangun dalam menjalankan fungsinya selalu menggandeng Karang Taruna dan LMDH. Bagaimanapun juga kami membutuhkan mereka untuk bersama sama membangun desa kami. Kedudukan kami semua baik dengan Karang Taruna, LMDH maupun dengan pemerintah desa sama pentingnya. Dalam menjalankan kegiatan apapun kami selalu berkordinasi dengan mereka...” (wawancara dengan Bapak Agus Ketua Ladewi Bangun, 9 Mei 2017 pukul 24.45 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, seluruh kelompok masyarakat dilibatkan membangun pariwisata di Desa Wisata Bangun. Keterlibatan mereka sebagai tuan rumah sekaligus subjek pengembangan yang turut aktif dalam memberikan peran kontribusinya sesuai dengan bidangnya masing-masing.



Gambar 4.19 Kerjabakti seluruh kelompok masyarakat
Sumber: Dokumentasi Kepala Desa Bangun (2017)

Karang Taruna Desa Bangun yang bergerak di bidang sosial dan kepemudaan juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan daya tarik wisata. Ketika ada kegiatan yang diselenggarakan Ladewi Bangun seperti kerjabakti, Karang Taruna selalu terlibat untuk membantu jalannya kegiatan tersebut. Karang Taruna melalui bidang kepemudaannya terlibat dalam menyelenggarakan *event* peresmian Tari Gandhong dan peresmian Air Terjun Wonoasri. Selain itu, Karang Taruna juga terlibat aktif dalam mempromosikan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun kepada Karang Taruna daerah lain.

Peran aktif Karang Taruna dalam membantu Ladewi Bangun ini dijelaskan oleh Bapak Marjuni sebagai berikut.

“...Karang Taruna memiliki peran penting juga dalam pengelolaan daya tarik wisata di Desa Bangun. Kami membantu Ladewi Bangun dalam kegiatan kerjabakti maupun penyelenggaraan *event-event* untuk menunjang promosi Desa Wisata Bangun. Kami juga mengenalkan daya tarik wisata di Desa Bangun kepada teman-teman Karang Taruna desa lain...” (wawancara dengan Bapak Marjuni sekretaris Karang Taruna, 24 Mei 2017 pukul 14.20 WIB).

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa peran Karang Taruna juga sangat penting dalam keberlangsungan pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun. Karang Taruna menjadi lembaga yang berkolaborasi dengan Ladewi Bangun yang turut aktif dalam memberikan perannya untuk mensukseskan terwujudnya pengelolaan daya tarik wisata yang berkelanjutan.

Selain Karang Taruna, Lembaga Masyarakat Desa Hutan juga memiliki peran yang strategis pula dalam pengelolaan daya tarik wisata. Terutama pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri. Peran LMDH sebagai fasilitator dalam melakukan kerjasama pengelolaan kepada Perhutani. LMDH yang merupakan kepanjangan tangan dari Perhutani dalam rangka menjaga pengelolaan hutan di Desa Wisata Bangun ikut berperan membantu Ladewi Bangun memperlancar perjanjian kerjasama dengan pihak Perhutani. LMDH juga rutin mengikuti kerjabakti pembangunan fasilitas yang ada di Air Terjun Wonoasri. Dalam penataan lokasi, LMDH juga terlibat mengarahkan pembangunan berbagai fasilitas agar tidak merusak fungsi hutan yang ada di sana.

Peran LMDH dalam pengelolaan daya tarik wisata dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Suwarni anggota LMDH sebagai berikut.

“...kami dari LMDH Desa Bangun ikut serta membantu Ladewi Bangun dalam pengelolaan khususnya air terjun wonoasri. Kami juga selalu ikut kerjabakti untuk membangun segala fasilitas yang ada di air terjun. Pihak Ladewi Bangun juga selalu berkonsultasi kepada kami ketika mau membangun fasilitas. Kami selalu mengarahkan pembangunan fasilitas agar tidak mengganggu keberlangsungan fungsi hutan. Akhirnya munculah zonasi yang dilakukan seperti sekarang. Dengan begitu keberlangsungan kelestarian hutan bisa terus terjaga walaupun dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan pariwisata...” (wawancara dengan Bapak Suwarni anggota LMDH, 8 Mei 2017 pukul 19.38 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa LMDH memiliki peran untuk menjaga keberlangsungan kelestarian hutan di sekitar Air Terjun Wonoasri. Melalui peran tersebut, pengelolaan yang digagas oleh Ladewi Bangun dapat lebih memperhatikan aspek terjaganya fungsi hutan. Melalui kolaborasi dengan LMDH, Ladewi pun dalam merencanakan pengelolaan maupun mengerjakan pengelolaannya dapat semakin terarah dan terencana dengan baik sesuai kaidah pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan peran masyarakat sebagai pelaku pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun telah berjalan. Mulai pada tahap perencanaan semua komponen masyarakat terlibat. Ladewi Bangun yang dalam hal ini pengelolaan Air Terjun Wonoasri dikerjakan oleh Pokja Dusun Rampal selalu bersinergi dengan Karang Taruna dan LMDH. Dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, maka rencana yang disusun dapat terkonsep secara matang sesuai kaidah berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya pengelolaan, semua kelompok masyarakat juga terlibat melalui bentuk kerjabakti bersama. Dalam tahap evaluasi, mereka sering

melakukan diskusi bersama/duduk bersama untuk membahas apakah program yang dijalankan sudah tepat atau tidak. Diskusi bersama yang menjadi agenda rutin mereka selenggarakan adalah musyawarah setiap satu bulan sekali.

b. Peran Pemerintah sebagai fasilitator pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pembangunan pariwisata tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Hal ini juga berlaku di Desa Bangun dalam melakukan perintisan desa wisata. Dalam kegiatan pariwisata, pemerintah berperan menjadi fasilitator pembangunan. Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun melibatkan peran Pemerintah Desa Bangun dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Peran sebagai fasilitator yang mereka lakukan dengan membuat kebijakan pembangunan pariwisata di tingkat atas maupun bawah, memberikan pembinaan sumber daya manusia dan membuat rencana maupun strategi dalam menumbuhkan iklim pariwisata yang ada di Desa Wisata Bangun.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menunjang pembangunan pariwisata memiliki strategi dan rancangan yang tersusun dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021. Di dalam RPJMD tersebut terdapat program unggulan yaitu membuka akses pariwisata dengan membranding produk pariwisata yang bertagline *Trenggalek Southern Paradise*. Program unggulan tersebut diterjemahkan dalam delapan prioritas pembangunan kewilayahan yang salah satunya adalah program pengembangan desa wisata. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang

diberikan oleh Ibu Dina selaku Kabid Destinasi Pariwisata Disparbud Kab.

Trenggalek terkait kebijakan program pemerintah yang berbunyi.

“...Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada masa pemerintahan Pak Emil ini memiliki prioritas pembangunan di bidang pariwisata. Hal itu telah ada dalam RPJMD tahun 2016-2021. Salah satu poinnya pemerintah menggalakkan pembangunan di desa wisata. Penerapannya di lapangan kami (Disparbud) diperintahkan untuk menginisiasi maupun membina desa wisata yang telah ada maupun masih merintis. Pembinaan yang kami lakukan melalui peningkatan kualitas SDM, membuatkan regulasi maupun mendampingi dalam hal kerjasama...” (wawancara dengan Ibu Dina Disparbud Kabupaten Trenggalek, 25 Mei 2017 pukul 11.45 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang diwakili oleh Dinas Pariwisata terkait berperan memfasilitasi masyarakat dalam menginisiasi Desa Wisata Bangun. Setelah terbentuk kelembagaan Ladewi Bangun, Disparbud mengesahkan menjadi lembaga resmi yang bernaung di bawahnya. Setelah menjadikan Ladewi Bangun sebagai lembaga resmi, Disparbud mengadakan peningkatan kualitas SDM kepada para anggota Ladewi Bangun. Selain itu, Disparbud juga selalu mengundang perwakilan Ladewi Bangun untuk mengikuti pembinaan di tingkat provinsi.

Di bidang infrastruktur, peran pemerintah untuk menunjang kegiatan pariwisata adalah membangun Jalur Lintas Selatan melewati Desa Wisata Bangun. Pembangunan Jalur Lintas Selatan ini merupakan pembangunan jalan baru yang membentang sepanjang pesisir selatan Jawa Timur mulai dari Kabupaten Pacitan sampai dengan Kabupaten Banyuwangi. Tujuan pembangunan JLS ini adalah untuk mengungkit kegiatan ekonomi di wilayah pesisir selatan Jawa Timur. Meskipun dalam pelaksanaannya

pembangunan ini belum selesai, ke depan Desa Wisata Bangun dapat menerima manfaat terbukanya akses bagi seluruh wisatawan untuk berkunjung ke sana.



Gambar 4.20 Kunjungan Disparbud Kab. Trenggalek
Sumber: Dokumentasi Ladewi Bangun (2017)

Disparbud Kabupaten Trenggalek juga bekerjasama dengan Asidewi Trenggalek untuk melakukan pendampingan pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun. Melalui Asidewi Trenggalek, banyak program pelatihan SDM oleh Disparbud yang diarahkan ke Desa Wisata Bangun. Disparbud mengarahkan program pelatihan tersebut karena Desa Wisata Bangun merupakan rintisan desa wisata yang benar-benar muncul dari masyarakat sehingga membutuhkan perhatian lebih agar dalam pengembangannya dapat terarah dan sesuai kaidah pariwisata berkelanjutan.

Pendampingan Disparbud yang diamanahkan kepada Asidewi Trenggalek dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Heru terkait program pendampingan yang dijalankan sebagai berikut.

“...dalam melakukan pendampingan di Desa Wisata Bangun, kami sering berkordinasi dengan Disparbud Kabupaten Trenggalek. Disparbud selama

perintisan ini telah melakukan program pembinaan peningkatan kualitas SDM dengan mengundang seluruh komponen masyarakat Desa Bangun mulai Ladewi, Karang Taruna, LMDH, bahkan perangkat Desa Bangun. Melalui pembinaan tersebut masyarakat semakin paham tentang bagaimana mengelola desa wisata yang mereka rintis...” (wawancara dengan Bapak Heru Ketua Asidewi Trenggalek, 25 mei 2017 pukul 10.15 WIB).

Pembinaan yang dilakukan Disparbud kabupaten Trenggalek tidak hanya dalam bentuk pembinaan langsung, tetapi juga selalu mengirim perwakilan Ladewi Bangun untuk mengikuti kegiatan di tingkat provinsi seperti Rembuk Desa Wisata Jawa Timur agar dapat berjejaring dan bertukar pengalaman dengan pengelola desa wisata di daerah lain. Selain itu, Disparbud juga mengirim perwakilan Ladewi Bangun untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di bidang kependamuan desa wisata. Dengan mengikuti pembinaan tersebut, *skill* dan wawasan kepariwisataan anggota Ladewi Bangun dapat semakin terasah.

Selain peran dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Desa Bangun juga memiliki peran besar dalam mendampingi perintisan Desa Wisata Bangun. Pemerintah Desa Bangun sangat mendukung inisiatif masyarakat untuk mengembangkan desanya menjadi sebuah desa wisata. Mulai dari awal sebelum terbentuknya Ladewi, Pemerintah Desa Bangun menjadi fasilitator dalam setiap pertemuan untuk merintis desa wisata. Pemerintah desa memfasilitasi pertemuan pada saat melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan Air Terjun Wonoasri dengan pihak Perhutani.

Pemerintah Desa Bangun juga selalu menampung aspirasi dari masyarakat dalam bentuk pengadaan program kerjabakti yang diselenggarakan rutin setiap seminggu sekali untuk membenahi sarana akses jalan menuju Air Terjun Wonoasri maupun pembangunan fasilitas yang ada di dalamnya. Peran dukungan Pemerintah Desa Bangun ini dijelaskan oleh Bapak Puguh selaku Kepala desa Bangun sebagai berikut.

“...kami selalu menampung aspirasi masyarakat untuk kemajuan desa kami. Aspirasi masyarakat itu salah satunya membangun Desa Bangun menjadi sebuah desa wisata. kami selalu memfasilitasi ketika ada pertemuan untuk membahas keberlangsungan pariwisata di Desa Bangun. Seperti kami memfasilitasi musyawarah untuk perjanjian kerjasama pengelolaan dengan Perhutani dan pembentukan kelembagaan desa wisata. kami juga mengundang Asidewi Trenggalek untuk memberikan wawasan kepariwisataan kepada masyarakat. Tetapi yang menjadi kendala kami, kami masih belum bisa membangun berbagai fasilitas karena belum kami anggarkan pada rancangan program kerja desa. InsyaAlloh dengan melihat semakin antusiasnya masyarakat, tahun depan akan kami anggarkan. Tetapi walaupun belum kami anggarkan, kami selalu berusaha untuk melobi temen-temen pengusaha untuk mau menghibahkan rejekinya membangun fasilitas pariwisata...” (wawancara dengan Bapak Puguh Kepala Desa Bangun, 9 Mei 2017 pukul 11.46 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, Pemerintah Desa Bangun selalu berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam merintis desa wisata. Fasilitasi yang pemerintah desa berikan dalam bentuk pertemuan-pertemuan, program kerja bakti dan pembinaan kualitas SDM pariwisata kepada masyarakat. Peran yang dilakukan pemerintah tentunya sangat bermanfaat dalam memupuk semangat masyarakat untuk mewujudkan Desa Bangun menjadi desa wisata. Tentunya Pemerintah Desa Bangun sebagai pemangku kebijakan di tingkat lokal terus berupaya berkordinasi dengan pemangku kebijakan di atasnya yaitu Pemerintah Kabupaten

Trenggalek. Adanya koordinasi tersebut memberikan manfaat bahwa pembangunan Desa Wisata Bangun mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten trenggalek seperti pembangunan infrastruktur jalan dalam bentuk Jalan Lintas Selatan dan pembinaan kualitas SDM serta kelembagaan.

Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun dapat disimpulkan bahwa mendapatkan perhatian dari pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Trenggalek. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu berupaya mendampingi dalam bentuk membuat kebijakan yang mendukung program desa wisata. Selain itu, program pembangunan wilayah dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan juga pemerintah gencarkan agar dapat memudahkan wisatawan menuju ke Desa Wisata Bangun dan membuka akses ekonomi baru di wilayah selatan Trenggalek. Tidak kalah penting, pemerintah juga melakukan program pembinaan dalam bentuk peningkatan kualitas SDM masyarakat Desa Bangun agar masyarakat semakin terasah *skill* dan wawasannya dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan.

c. Peran Swasta sebagai pengembang / investor dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun tidak lepas dari peran *stakeholders* pariwisata. Pemangku kepentingan tersebut antara lain masyarakat, pemerintah dan swasta. Dalam mengupayakan

pembangunan di sektor pariwisata membutuhkan peran swasta sebagai pengembang sehingga pembangunannya dapat terlaksana secara cepat. Dengan adanya pihak swasta, beban masyarakat dalam segi modal dapat teratasi (Arida, 2016). Tetapi dalam pelaksanaannya di Desa Wisata Bangun dalam pengelolaan daya tarik wisata masih belum adanya peran swasta.

Berdasarkan observasi peneliti, belum adanya peran swasta didasari pada pembangunan desa wisata di Desa Bangun masih pada tahap rintisan sehingga masih belum adanya pihak swasta yang berminat ditambah akses ke Desa Bangun masih sulit karena belum selesainya program pembangunan Jalan Lintas Selatan. Masyarakat juga tidak mengharapkan sektor swasta untuk masuk mengelola daya tarik wisata karena semangat yang masyarakat Desa Bangun adalah semangat pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Desa Bangun ingin menjadi tuan di desanya sendiri.

Belum adanya peran swasta dalam pengelolaan daya tarik wisata di desa Bangun dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Agus Ketua Ladewi bangun sebagai berikut.

“...dalam membangun desa wisata, semangat kami adalah pemberdayaan masyarakat. Kami ingin dan berupaya agar pengelolaan daya tarik wisata yang ada semua dapat dikelola oleh masyarakat tanpa campur tangan pihak swasta. Kami tidak ingin asset yang kami rintis dikuasai oleh pihak swasta. Kami yang mengawali, kami juga yang harus mengelolanya...” (wawancara dengan Bapak Agus Ketua Ladewi Bangun, 8 Mei 2017 pukul 24.10 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, masyarakat tidak ingin daya tarik wisatanya dikelola oleh sektor swasta. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengawali perintisannya dan masyarakat yang berjuang keras membangunnya. Apabila pengelolaannya diserahkan kepada swasta, maka akan mencederai semangat pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Desa Bangun pun akhirnya hanya akan menjadi penonton dan pekerja, bukan pemiliknya. Padahal masyarakat desa bangun sendiri yang merintis sampai dapat dikunjungi oleh wisatawan.

Dalam pengelolaan daya tarik wisata di Air Terjun Wonoasri, peran swasta masih belum ada. Pembangunan fasilitas yang ada saat ini mengandalkan dana dari pemasukan jasa penitipan sepeda motor dan penyewaan pelampung. Selain itu, pembangunan tersebut juga disumbang oleh beberapa orang pengusaha Desa Bangun tetapi sumbangan tersebut sifatnya tidak mengikat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Mas Riki anggota Pokja Dusun Rampal terkait peran pihak swasta sebagai berikut.

“...dalam melakukan pembangunan fasilitas di Air Terjun Wonoasri, selain mengandalkan dana dari pemasukan penitipan sepeda motor dan penyewaan pelampung, kami juga menerima dana sumbangan dari beberapa pengusaha di Desa Bangun. Sumbangan tersebut murni bantuan yang tidak mengikat dan tidak ada perjanjian/kesepakatan apapun sebagai timbal balik. kami menolak pengelolaan Air Terjun Wonoasri dikelola oleh investor karena kami yang membangun tetapi kok malah orang lain yang menikmati hasilnya...” (wawancara dengan Mas Riki anggota Pokja Dusun Rampal, 24 April 2017 pukul 16.58 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, pengelola dalam mengelola Air Terjun Wonoasri menerima sumbangan dari luar kelompok. Pengelola mau menerima bantuan tersebut karena tidak adanya kesepakatan timbal

balik yang diberikan. Dengan begitu pengelolaan air terjun wonoasri tetap masyarakat yang memiliki andil penuh.



Gambar 4.21 Fasilitas hibah dari masyarakat

Sumber: Dokumentasi peneliti (2017)

Meskipun terkendala akses jalan menuju Desa Bangun yang rusak dan jauh dan pembangunan JLS yang masih belum rampung, sudah ada beberapa calon investor yang mulai melirik pengelolaan di Air Terjun Wonoasri. Pengelolaan tersebut bukan pengelolaan air terjunnya secara keseluruhan, tetapi atraksi pendukung di dalamnya seperti wahana *outbond*. Pengelola yang diwakili oleh Pokja Dusun Rampal menolak karena tidak sesuai dengan semangat masyarakat yang ingin mandiri mengelola Air Terjun Wonoasri. Masyarakat tetap berkomitmen memegang kendali penuh dalam pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun.

Terkait investasi fasilitas pendukung Desa Wisata Bangun yang ada di luar daya tarik wisata juga masih belum ada. Hal ini disebabkan Desa Bangun dalam membangun desa wisatanya masih pada tahap rintisan. Kebanyakan wisatawan yang datang ke Desa Wisata Bangun adalah wisatawan lokal sekitar wilayah Kecamatan Munjungan. Jadi pihak

investor pun juga masih berpikir ulang untuk menginvestasikan dananya membangun fasilitas pendukung desa wisata seperti penginapan ataupun toko cinderamata. Untuk saat ini segala kebutuhan dalam pembangunan daya tarik wisata maupun fasilitas pendukungnya benar-benar dibangun oleh masyarakat sendiri melalui semangat gotong royong yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Wisata Bangun.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Konsep *Community Based Tourism* dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan

Desa Wisata Bangun merupakan desa wisata rintisan yang masuk dalam kategori desa wisata berpotensi yang masyarakatnya memiliki antusias tinggi dalam mengelola daya tarik wisata yang ada di dalamnya. Perintisan Desa Wisata Bangun ini bersumber dari kesadaran masyarakatnya yang melihat bahwa Desa Bangun memiliki banyak potensi wisata yang bisa dimunculkan mulai dari alam, budaya maupun minat khususnya. Kesadaran tersebut pada awalnya dimunculkan oleh beberapa orang yang memiliki kepedulian untuk membangun desanya melalui sektor pariwisata. Dari kesadaran beberapa orang tersebut menumbuhkan kesadaran kolektif/bersama seluruh masyarakat Desa Bangun untuk ikut terlibat juga membangun desanya melalui pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan yang berasal dari kesadaran masyarakat sendiri diistilahkan dengan *Community Based Tourism*. Menurut Murphy (1988) dalam Sunaryo (2013:139) memberikan pengertian CBT adalah wujud

tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada. Dalam perintisan Desa Wisata Bangun, masyarakat lokal menjadi motor penggerak dan terlibat aktif dalam pengelolaan daya tarik wisata yang ada. Hal ini dibuktikan dari awal mula munculnya kegiatan pariwisata Desa Bangun diawali oleh gerakan kecil dari komunitas *Bangun Motor Community* (BMC) untuk menata dan mengelola daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri. Setelah melalui proses musyawarah yang panjang antar kelompok masyarakat akhirnya menemukan solusi untuk membentuk kelembagaan desa wisata bernama Ladewi Bangun sebagai wadah yang bertanggung jawab mengelola seluruh potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Bangun.

Suansri (2003) dalam Sunaryo (2013:140) menjelaskan bahwa dalam penerapan CBT, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu destinasi wisata, tidak dapat dipungkiri sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem ekologi kepariwisataan yang saling kait mengkait. Untuk itu, dalam melakukan perencanaan harus bermuara pada prinsip yang mengutamakan adanya hubungan yang lebih seimbang antar wisatawan, masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sekitar. Masyarakat Desa Wisata Bangun dalam merencanakan pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri telah memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar air terjun. Melalui penataan zonasi di Air Terjun Wonoasri, membuktikan bahwa masyarakat tidak ingin merusak keasrian lingkungan sekitar yang dijadikan

sebagai kegiatan pariwisata. Mereka berusaha meminimalisir dampak negatif kerusakan lingkungan melalui perencanaan dari awal yang memperhatikan kaidah berkelanjutan sehingga keseimbangan lingkungan alam tetap terjaga.

Hausler (2007) dalam Sunaryo (2013:139) juga menjelaskan bahwa CBT pada hakikatnya merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan kepariwisataan yang menekankan pada masyarakat lokal dalam bentuk pemberian akses pada manajemen dan sistem pembangunan kepariwisataan melalui pemberdayaan, termasuk pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata secara lebih adil bagi masyarakat lokal. Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun mulai memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal. Keuntungan tersebut dibuktikan dari mulai tumbuhnya kegiatan usaha masyarakat seperti penitipan sepeda motor dan warung makan di sekitar Air Terjun Wonoasri walaupun masih dalam skala kecil. Dari kegiatan usaha yang muncul tersebut, dapat menjadi penyemangat bahwa usaha masyarakat untuk membangun desanya melalui pariwisata mulai menampakkan hasil yang nyata.

Pengelolaan daya tarik wisata berbasis CBT yang ada di Desa Wisata Bangun, membuktikan bahwa masyarakat dapat menjadi subjek dalam pembangunan kepariwisataan. Dengan adanya peran aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, memberikan rasa percaya diri dan kebanggaan kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki kontribusi yang besar dalam perintisan Desa Wisata Bangun. Kontribusi masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan di Desa Wisata Bangun dikategorikan dalam

bentuk partisipasi masyarakat lokal, pembentukan kelembagaan desa wisata, pengelolaan daya tarik wisata berwawasan lingkungan dan terciptanya kegiatan usaha masyarakat.

a. Partisipasi Masyarakat Lokal

Partisipasi masyarakat Desa Bangun dalam perintisan desa wisatanya ditandai dari munculnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata yang ada di Desa Bangun. Partisipasi masyarakat menurut Arnstein dalam Arida (2016:38) adalah redistribusi kekuasaan (*redistribusi of power*) yang memungkinkan masyarakat yang tidak mampu, secara perlahan dan penuh kehati-hatian dapat berpartisipasi. Artinya, mereka bisa mendorong terjadinya perubahan sosial yang sangat berarti, yang memungkinkan mereka ikut memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Dalam pengertian ini, satu hal yang sangat penting dalam keikutsertaan seseorang dalam berpartisipasi adalah tingkat distribusi kekuasaan kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat untuk merintis Desa Wisata Bangun tidak muncul begitu saja. Hal ini membutuhkan proses penyadaran yang panjang kepada seluruh masyarakat untuk ikut terlibat membangun desanya dalam sektor pariwisata. Proses penyadaran masyarakat sampai dengan kesepakatan untuk merintis desa wisata membutuhkan waktu selama hampir 2 tahun lamanya. Hal ini dilihat berdasarkan proses awal wacana sekelompok masyarakat memiliki ide membuka peluang pariwisata dimulai akhir tahun 2015 dan kesepakatan pembentukan kelembagaan desa

wisata pada akhir tahun 2016. Pada awal penyadarannya, beberapa kelompok masyarakat melakukan kerjabakti atas inisiatif sendiri untuk mencoba membuka akses daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri.

Inisiatif menurut Suryana (2016) adalah kemampuan dalam menemukan peluang, menemukan ide, mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu problema. Berani berinisiatif sama dengan sikap proaktif. Untuk mengambil inisiatif harus mendahulukan aksi dibanding reaksi. Hal ini yang dilakukan oleh beberapa beberapa kelompok masyarakat dalam mewacanakan membuka peluang sektor pariwisata di Desa Bangun.

Kesuksesan sebuah program pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun akan sangat tergantung seberapa besar porsi yang diberikan kepada masyarakat untuk berperan di dalamnya. Masyarakat yang bisa berperan dalam sebuah program pengelolaan adalah masyarakat yang telah berdaya dan memahami posisi serta perannya secara jelas. Dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut maka upaya pemberdayaan masyarakat Desa Bangun menemukan peran sentralnya. Menurut Korten (2004) dalam Arida (2016:35) pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*people centered development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas potensi sumber daya yang ada.

Arida (2016:35) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berarti proses membangun dan mengembalikan kepercayaan diri masyarakat, bahwa mereka mampu membangun potensi pariwisata yang dimiliki untuk menjadi daya tarik wisata dalam memenuhi kebutuhan dasar, mencapai kehidupan yang lebih baik dan terus berkembang secara berkelanjutan. Proses pemberdayaan dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh masyarakat Desa Bangun untuk meningkatkan kapasitas sebagai sumberdaya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan masyarakat Desa Bangun. Menurut Wrihatnolo (2003) proses partisipasi masyarakat Desa Bangun dalam bentuk pemberdayaan diklasifikasikan dalam 3 tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Pada tahap penyadaran, Desa Bangun sendiri sebelum munculnya kegiatan pariwisata merupakan salah satu desa pelosok yang jauh dari suasana keramaian. Akses menuju ke Desa Bangun pun juga sulit karena dari segi geografis terletak di pesisir selatan Kabupaten Trenggalek dan dikelilingi pegunungan. Mayoritas masyarakatnya juga masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan perkebunan. Berangkat dari geografis desa yang tergolong pelosok dan ditambah peluang baru yang muncul dengan adanya pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) maka ide yang dimunculkan beberapa kelompok masyarakat Desa Bangun dengan menangkap peluang merintis desa wisata.

Beberapa kelompok masyarakat memulai dengan aksi kerjabakti membuka jalan dan menata bebatuan di sekitar air terjun agar mudah untuk dilewati. Setelah terbukanya akses menuju air terjun akhirnya mulai banyak wisatawan yang berdatangan untuk mengunjunginya. Dari situ masyarakat mulai terbuka wawasannya bahwa Desa Bangun memiliki potensi pariwisata yang dapat membuat desanya ramai dikunjungi oleh banyak orang. Akhirnya masyarakat atas dukungan dari Pemerintah Desa Bangun secara sukarela ikut membantu kegiatan kerjabakti untuk membuka Air Terjun Wonoasri. Dengan adanya bentuk aksi nyata oleh beberapa kelompok masyarakat akhirnya menjadi pendongkrak kesadaran masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam merintis desa wisata dimulai dengan pengelolaan Air Terjun Wonoasri.

Pada tahap peningkatan kapasitas, masyarakat Desa Bangun dituntut untuk memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kepariwisataan dan memiliki ketrampilan untuk mengelola daya tarik wisata yang ada. Setelah masyarakat mulai sadar dengan potensi wisata yang dimiliki Desa Bangun, masyarakat berinisiatif untuk menggali pengetahuan tentang kepariwisataan melalui bermitra dengan Asidewi Trenggalek. Peran pemerintah desa memfasilitasi diskusi masyarakat dengan Asidewi Trenggalek membahas tentang isu-isu perkembangan pariwisata dan potensinya apabila dikembangkan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Bangun. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Asidewi Trenggalek melakukan sosialisasi tentang kepariwisataan, memasukkan

beberapa perwakilan masyarakat Desa Bangun untuk berjejaring dengan pelaku desa wisata lainnya, maupun membuka jalan masyarakat Desa Bangun untuk berkomunikasi dengan Disparbud Kabupaten Trenggalek.

Setelah mulai memahami tentang seluk beluk kepariwisataan dan fasilitas pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Asidewi Trenggalek maupun Disparbud Kabupaten Trenggalek, masyarakat Desa Bangun mulai percaya diri untuk mengelola daya tarik wisatanya secara berkelanjutan. Bentuk rasa percaya diri tersebut diaplikasikan oleh masyarakat Desa Bangun dengan membentuk kelembagaan yang dapat menjadi wadah resmi dalam mengelola seluruh daya tarik wisata yang ada. Peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan semakin menumbuhkan semangat dan pengelolaan yang lebih terarah sehingga prinsip keberlanjutan dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat dalam membangun sektor pariwisata di Desa Wisata Bangun.

Pada tahap pendayaan, masyarakat Desa Bangun diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan. Partisipasi tersebut ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitasnya. Kegiatan yang telah diterapkan dalam pendayaan tersebut adalah dengan terbentuknya kelembagaan desa wisata bernama Ladewi Bangun. Semua komponen masyarakat Desa Bangun seperti Karang Taruna, LMDH, pemerintah desa maupun tokoh masyarakat dilibatkan untuk pembentukan

Ladewi Bangun dan dalam merumuskan arah berjalannya roda organisasi ke depan.

Perwakilan dari seluruh komponen masyarakat dimasukkan menjadi pengurus Ladewi Bangun sebagai upaya *check and balance*. Dalam kepengurusan dibagi tupoksi yang jelas dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja). Salah satu Pokja yang sudah berjalan tupoksinya adalah Pokja Dusun Rampal yang memiliki tugas untuk mengelola daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri. Pokja Dusun Rampal memiliki kewenangan untuk mengelola Air Terjun Wonoasri sebagai bentuk kepanjangan tangan dari Ladewi Bangun. Kewenangan tersebut dalam bentuk penataan zonasi, pembangunan fasilitas pendukung maupun menciptakan kegiatan usaha masyarakat.

Masyarakat Desa Bangun yang dalam hal ini diwakili oleh Ladewi Bangun dalam setiap bulan sekali mengagendakan pertemuan rutin. Agenda ini merupakan bentuk *self evaluation* atau evaluasi diri terhadap kinerja yang telah dilaksanakan masyarakat dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata. Melalui wadah evaluasi tersebut masyarakat Desa Bangun memiliki keterbukaan terhadap permasalahan atau kendala yang dihadapi di lapangan sehingga memunculkan aspirasi-aspirasi masyarakat untuk memperbaiki arah pengelolaannya ke depan. Klasifikasi tahapan pemberdayaan dalam rangka melihat partisipasi masyarakat Desa Bangun dalam pengelolaan daya tarik wisata diringkas dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 4.8 Klasifikasi tahap pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Bangun

Penyadaran	Tahap pemberdayaan	
	Peningkatan kapasitas	Pendayaan
1. Inisiatif/ide beberapa kelompok masyarakat	1. Bermitra dengan Asidewi Trenggalek	1. Pembentukan Ladewi bangun
2. Aksi nyata kerja bakti	2. Sosialisasi sadar wisata	2. Memperjelas tupoksi antar pengurus
3. Pemberian wawasan kepada masyarakat lainnya	3. Pendampingan rutin	3. Pembentukan Pokja dusun rampal mengelola air terjun wonoasri
4. Kesadaran kolektif seluruh masyarakat	4. Pelatihan dalam rangka peningkatan skill pengelolaan DTW	4. Pelibatan karang taruna, LMDH, tokoh masyarakat sebagai mitra membantu pengelolaan
5. Seluruh masyarakat secara Sukarela berpartisipasi ikut kerjabakti	5. Berjejaring dengan pelaku desa wisata lainnya	5. Evalusai rutinan setiap satu bulan sekali

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan klasifikasi tahapan pemberdayaan dalam rangka melihat partisipasi masyarakat Desa Bangun, menurut Tosun (1999) dalam Arida (2016:38) maka bentuk partisipasi yang diterapkan adalah partisipasi masyarakat secara spontan (*spontaneous participation*). Partisipasi spontan ini merepresentasikan suatu tipe partisipasi yang ideal, yang menyediakan tanggung jawab manajerial dan kekuasaan kepada masyarakat. Ciri-ciri partisipasi spontan ini bahwa inisiatif berasal dari masyarakat (*bottom up*). Hal ini dibuktikan pada tahap penyadaran menjelaskan awal mula penyadaran masyarakat Desa Wisata Bangun bersumber dari inisiatif/ide beberapa kelompok masyarakat lokal yang memiliki kesadaran bahwa Desa Bangun memiliki peluang untuk dikembangkan sektor pariwisatanya.

Partisipasi spontan juga ditandai dengan masyarakat terlibat sebagai pembuat keputusan yang dibuktikan dalam pembentukan kelembagaan dan pengelolaan daya tarik wisata yang ada, seluruh komponen masyarakat Desa Wisata Bangun terlibat dan punya peran masing-masing sesuai kapasitasnya. Dan dalam partisipasi spontan, masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan evaluator. Dalam penerapannya di lapangan, setiap perencanaan dalam menentukan arah pengelolaan daya tarik wisata selalu diadakan musyawarah bersama yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Bangun maupun inisiatif masyarakat sendiri melalui agenda pertemuan rutin setiap satu bulan sekali.

Tentunya dalam penerapan partisipasi masyarakat ditemukan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Permasalahan yang muncul adalah kurang adanya koordinasi antar komponen masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri. Akibatnya tidak terjadi keterbukaan antar komponen masyarakat sehingga pengelolaan daya tarik wisata menjadi jalan di tempat. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang difasilitasi oleh peneliti mulai memberikan solusi mencairkan kebuntuan komunikasi sehingga antar komponen masyarakat menjadi lebih terbuka dalam berperan melakukan pengelolaan sesuai kapasitasnya masing-masing. Ketransparasian dan keterbukaan dalam melakukan perannya masing-masing menjadi kunci terjaganya keharmonisan antar kelompok masyarakat sehingga pengelolaan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

b. Pembentukan Kelembagaan Desa Wisata

Menurut Inskeep (1991) dalam Prafitri (2016), dalam konteks pariwisata, kelembagaan adalah komponen penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Kelembagaan berperan dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata. Urgensi keberadaan kelembagaan dalam bidang pariwisata adalah kelembagaan dapat berperan sebagai wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata. Di dalam pengembangan kelembagaan desa wisata, perlu adanya perencanaan awal yang tepat dalam menentukan usulan program atau kegiatan agar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui program yang dijalankan (Arida, 2016: 188).

Pada umumnya perkembangan sebuah atraksi wisata akan diikuti oleh tumbuhnya bentuk-bentuk kelembagaan baru di masyarakat lokal guna merespon perkembangan pariwisata yang terjadi. Kalaupun tidak tumbuh lembaga baru, minimal lembaga yang sudah ada akan mengalami penguatan dan perluasan peran (Arida, 2016:135). Begitupun hal ini terjadi dalam perintisan Desa Wisata Bangun. Setelah masyarakat Desa Bangun pada tahap pendayaan ditandai dengan mulai paham dan tahu tentang kepariwisataan, mereka membutuhkan wadah yang dapat menaungi aspirasi dan langkah mereka dalam membangun sektor pariwisata di Desa Bangun. Wadah yang disepakati oleh masyarakat lokal dalam mengelola

daya tarik wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Bangun adalah Lembaga Desa Wisata (Ladewi) Bangun.

Ladewi Bangun dibentuk untuk menampung aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat yang ada di Desa Bangun agar terjadi kesamaan arah dan tujuan dalam mengelola daya tarik wisata yang ada. Kepengurusan Ladewi Bangun diambilkan dari perwakilan berbagai kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, LMDH, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan lainnya di bawah Karang Taruna. Mereka saling bekerjasama untuk mengelola seluruh potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Bangun. Ladewi Bangun memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola seluruh daya tarik wisata yang ada di Desa Wisata Bangun. Tugas dan tanggung jawab tersebut yang digali oleh peneliti adalah kaitannya dengan tugas menjalankan kepemimpinan, kemitraan eksternal, mengembangkan atraksi wisata dan peningkatan Sumber Daya Manusia (Prafitri, 2016).

Pada tugas kepemimpinan yang dijalankan oleh Ladewi Bangun yang dimaksud disini adalah terkait tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pengurus untuk menjalankan tugasnya secara baik. Kepemimpinan menurut Sutarto (1998) adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ladewi Bangun dibentuk pada akhir tahun 2016 dengan melalui proses musyawarah panjang antar kelompok masyarakat.

Proses panjang tersebut diakibatkan karena adanya ketidaksepahaman BMC sebagai inisiator awal yang ingin mengelola daya tarik wisata dengan masyarakat di sekitar Dusun Rampal tempat Air Terjun Wonoasri berada. Pada akhirnya munculah solusi untuk mengatasi ketidaksepahaman tersebut dengan membentuk Ladewi Bangun.

Ladewi Bangun memiliki struktur kepengurusan mulai dari pengurus inti hingga Kelompok Kerja (Pokja). Pengurus inti terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan Pokja terdiri dari pokja pertanian, pokja daya tarik wisata, pokja *homestay*, pokja kependudukan, pokja humas, pokja seni dan budaya, pokja pemasaran, pokja kuliner dan pokja wirausaha. Konsep kepemimpinan yang dijalankan oleh Ladewi Bangun selalu mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam tata kehidupan masyarakat Desa Bangun sendiri yang memiliki budaya gotong royong tinggi dan mengedepankan rembukan setiap ada permasalahan. Sehingga kepengurusan Ladewi Bangun dalam menjalankan tugasnya juga selalu menjunjung tinggi rasa kebersamaan.

Pada tugas kemitraan eksternal, Ladewi Bangun dalam mengelola daya tarik wisatanya bekerjasama dengan kelompok masyarakat lainnya yaitu Karang Taruna dan LMDH. Menurut Notoatmodjo (2003) dalam Prafitri (2016), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Kemitraan yang dibangun oleh Ladewi

Bangun dengan Karang Taruna dan LMDH adalah melibatkan mereka dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi bulanan pengelolaan daya tarik wisata. Ladewi Bangun menyadari bahwa dalam membangun pariwisata di tingkat desa, mereka tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan dari kelompok masyarakat lainnya untuk saling memberikan masukan dan saling mengisi kekurangan satu sama lain.

Terjalannya hubungan kemitraan yang baik antara Ladewi Bangun dengan kelompok masyarakat memberikan manfaat dalam pengelolaan daya tarik wisata yang ada di sana. Kemitraan yang dibangun memberikan manfaat seperti LMDH membantu Ladewi Bangun dalam proses Perjanjian Kerjasama dengan Perhutani dalam pengelolaan Air Terjun Wonoasri dan LMDH selalu mengarahkan agar pengelolaan Air Terjun Wonoasri tidak merusak kelestarian hutan. Begitupun manfaat yang didapat ketika bermitra dengan Karang Taruna seperti Karang Taruna membantu *launching* Tari Gandhong sebagai bentuk atraksi wisata budaya, selalu ikut serta membantu kegiatan kerjabakti dan terlibat ikut menjaga Air Terjun Wonoasri.

Selain bermitra dengan kelompok masyarakat desa, Ladewi Bangun juga bermitra dengan Asidewi Trenggalek dan Disparbud Kabupaten Trenggalek. Melalui bermitra dengan Asidewi Trenggalek, Ladewi Bangun selalu mendapatkan pendampingan dan rutin berkordinasi tentang bagaimana baiknya arah pengelolaan ke depan dan dapat berjejaring dengan pelaku desa wisata lainnya untuk bertukar pengalaman dan ilmu

dalam mengelola daya tarik wisata yang berkelanjutan. Dan melalui bermitra dengan Disparbud, maka pengurus Ladewi sering mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan akan dunia kepariwisataan.

Pada tugas pengembangan daya tarik wisata, Ladewi Bangun memiliki prioritas di tahun pertama ini untuk mengelola Air Terjun Wonoasri. Menurut Yoeti (dalam Santoso, 2009), pengembangan pariwisata adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki objek wisata yang sedang dipasarkan ataupun yang akan dipasarkan. Agar pengembangan daya tarik wisata dapat terfokus maka Ladewi Bangun bidang daya tarik wisata membentuk Pokja Dusun Rampal yang mengurus pengelolaan Air Terjun Wonoasri.

Pengembangan daya tarik wisata yang berfokus pada pengelolaan Air Terjun Wonoasri merupakan bentuk prioritas yang disepakati dalam musyawarah bersama. Pokja Dusun Rampal memulainya dengan melakukan pembenahan fasilitas jalan menuju air terjun. Penataan lokasi air terjun dengan membuat zonasi, membuat fasilitas pendukung seperti tempat ganti, gazebo tempat beristirahat, rumah pohon dan menciptakan usaha masyarakat berupa penitipan sepeda motor dan pendirian warung makan. Dalam pelaksanaannya, mereka gotong royong dibantu oleh Karang Taruna dan LMDH dalam bentuk kerjabakti.

Berdasarkan siklus hidup pengembangan suatu destinasi, Buttler (1980) dalam Pitana (2009:132) mengemukakan siklus hidup suatu

destinas terdiri dari *exploration* (penemuan), *involvement* (keterlibatan), *development* (pembangunan), *consolidation phase* (konsolidasi), *stagnation* (stagnasi), *decline* (penurunan) dan *rejuvenation* (peremajaan). Kaitannya dengan siklus hidup destinasi tersebut, pengelolaan Air Terjun Wonoasri masuk pada tahap *involvement* (keterlibatan). Hal ini ditandai dengan masyarakat Desa Bangun mulai menyediakan fasilitas yang diperuntukan kepada wisatawan yang datang dan masyarakat Desa Bangun mulai mengubah pola sosial yang ada untuk merespon perubahan ekonomi yang terjadi.

Pada tugas peningkatan Sumber Daya Manusia, Ladewi Bangun beberapa kali mengikuti sosialisasi dan pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Asidewi trenggalek maupun Disparbud Kabupaten Trenggalek. Dikatakan Susanto (1997) dalam Nugroho (2011:154) bahwa *asset* organisasi terpenting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah sumber daya manusia (*human resources*). Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi. Sosialisasi dan pelatihan yang pernah diikuti oleh Ladewi Bangun seperti sosialisasi sadar wisata, sosialisasi pengelolaan daya tarik wisata yang berkelanjutan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di tingkat provinsi seperti rebug desa wisata. Pelatihan yang pernah diikuti seperti pelatihan kepeemanduan ekowisata desa. Sosialisasi maupun pelatihan yang

diselenggarakan membuat SDM Ladewi Bangun semakin terasah dan mumpuni dalam mengelola daya tarik wisata yang ada.

Secara ringkas, tugas kelembagaan Ladewi Bangun dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 Tugas Lembaga Desa Wisata Bangun

No.	Tugas	Penerapan
1.	Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Ladewi Bangun 2. Pelibatan seluruh kelompok masyarakat dan struktur pengurus 3. Penyusunan pengurus inti dan kelompok kerja (Pokja) 4. Pelaksanaan program dengan sistem musyawarah dan gotong royong
2.	Kemitraan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan karang taruna, LMDH dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan 2. Aktivitas kerjabakti melibatkan seluruh kelompok masyarakat 3. Bermitra dengan Asidewi sebagai sarana berjejaring 4. Bermitra dengan Disparbud sebagai sarana peningkatan kualitas SDM dan penentuan kebijakan
3.	Pengembangan daya tarik wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Pokja Dusun Rampil 2. Pembenahan akses jalan 3. Pembuatan zonasi 4. Pembangunan fasilitas dan usaha masyarakat
4.	Peningkatan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang kepariwisataan 2. Pelatihan pemanduan 3. Berjejaring dengan pelaku desa wisata lainnya

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan tabel di atas, kelembagaan telah menjalankan tugasnya berdasarkan fungsi kepemimpinan, kemitraan internal, pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Hal ini

membuktikan bahwa fungsi kelembagaan sudah berjalan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, berjalannya fungsi kelembagaan tersebut masih berjalan stagnan dikarenakan tidak seluruh pengurus memiliki kesadaran dan pengetahuan yang bagus tentang kepariwisataan. Akhirnya beberapa kali terjadi ketidaksepahaman antar pengurus dalam menjalankan fungsi lembaga. Akibatnya setiap pengurus dalam beberapa pelaksanaannya berjalan sendiri-sendiri. Beberapa pengurus memiliki konsep pengelolaan yang berbeda sehingga tidak jarang masing-masing pihak mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diperlukan komunikasi yang lebih baik dan sering melakukan kordinasi antar pengurus lembaga agar pengelolaan tidak jalan di tempat dan terus berlanjut ke arah yang lebih baik.

c. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berwawasan Lingkungan

Pola interaksi antara aktivitas kepariwisataan dan lingkungan sekitar yang ada di suatu destinasi akan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan dampak. Faktor lingkungan dimungkinkan akan mendapatkan dampak positif maupun negatif dari aktivitas kepariwisataan. Sebaliknya, faktor kepariwisataan juga akan dimungkinkan mendapat dampak positif maupun dampak negatif dari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu pembangunan kepariwisataan harus mengupayakan hubungan interaksi yang *symbiosis mutualistic* antara kegiatan kepariwisataan dengan lingkungan (Sunaryo, 2013:42).

Menurut Sunaryo (2013) konsep pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan diadopsi oleh Indonesia melalui Piagam Pariwisata Berlanjut yang pada intinya menggariskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang diselenggarakan harus mampu mendapatkan dukungan secara ekologis dan juga layak secara ekonomi, layak secara estetika dan berkeadilan sosial terhadap masyarakat terkait. Dalam kaitannya dengan subbab pengelolaan daya tarik wisata berwawasan lingkungan ini, peneliti membatasi kajiannya pada pembangunan yang berwawasan lingkungan alam. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan alam menekankan bahwa pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian alam sekitar dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan alam dan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada.

Berangkat dari teori tersebut, pengelolaan daya tarik wisata berwawasan lingkungan yang diterapkan di Desa Wisata Bangun dan secara lebih spesifik diterapkan di Air Terjun Wonoasri harus mengedepankan kaidah berwawasan lingkungan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Pokja Dusun Rampal sebagai kepanjangan tangan dari Ladewi Bangun mulai mengarahkan pengelolaannya sesuai dengan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini tidak lepas dari manfaat pengetahuan tentang kepariwisataan yang mereka dapatkan dari sosialisasi maupun pelatihan yang telah mereka ikuti. Penerapan pengelolaan daya

tarik wisata berwawasan lingkungan oleh Pokja Dusun Rampal ditunjukkan melalui pembagian zonasi yang mereka terapkan di kawasan air terjun dan memperhatikan daya dukung (*carrying capacity*).

Zona didefinisikan sebagai suatu wilayah fungsional tertentu dengan batas wilayah yang jelas dan mempunyai tujuan tertentu yang diimplementasikan melalui aturan atau ketentuan tertentu. Zonasi didefinisikan sebagai usaha untuk membagi suatu wilayah pada kawasan wisata tertentu menjadi beberapa *zona* fungsional berbeda yang diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain (permen kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006). Pokja Dusun Rampal dalam pengelolaan Air Terjun Wonoasri membagi wilayah air terjun menjadi tiga zona antara lain zona inti, zona pendukung dan zona perekonomian. Masing-masing zona tersebut memiliki karakteristik pemanfaatan yang berbeda. Tujuan dibentuk zona tersebut agar lokasi Air Terjun Wonoasri dapat tertata secara baik sehingga dapat membedakan wilayah yang khusus untuk berwisata tanpa merusak kelestarian sekitar dan wilayah yang khusus untuk kegiatan usaha masyarakat lokal.

Zona yang pertama adalah zona inti. Yang dimaksud zona inti ini oleh Pokja Dusun Rampal adalah wilayah yang berada di Air Terjun Wonoasri. Pengelolaan yang dilakukan Pokja Dusun Rampal dalam zona inti ini adalah menata bebatuan yang ada di sekitar air terjun dalam bentuk bendungan alami yang dapat menampung air sehingga dapat dimanfaatkan wisatawan untuk mandi. Pohon tinggi yang sudah tua yang dapat

membahayakan wisatawan ditebang dan kayunya dimanfaatkan untuk membangun tempat duduk alami di sekitar air terjun. Penebangan pohon tersebut oleh pengelola diimbangi mengganti dengan pohon baru yang lebih aman dan ditambah penanaman bunga-bunga di ruas kiri kanan jalan. Selain itu pengelola juga menyediakan tempat ganti dari kayu non permanen bagi wisatawan yang ingin berganti pakaian.

Pengelola melakukan pembangunan fasilitas yang ada di zona inti memanfaatkan bahan-bahan yang disediakan dari alam. Tentunya pemanfaatan bahan-bahan dari alam tersebut telah mendapatkan persetujuan dari LMDH selaku kelompok masyarakat yang memiliki kewenangan untuk pengelolaan hutan di Desa Wisata Bangun. Yang menjadi unik, pengelola memanfaatkan ban mobil bekas yang sudah tidak terpakai sebagai pengganti pot tanaman bunga-bunga. Pemanfaatan limbah ban bekas menjadi pot bunga patut diapresiasi karena dapat memanfaatkan limbah menjadi hal yang berguna untuk menunjang keindahan Air Terjun Wonoasri.

Zona yang kedua adalah zona pendukung. Yang dimaksud zona pendukung ini oleh Pokja Dusun Rampal adalah daya tarik wisata tambahan yang dibangun sebelum masuk ke Air Terjun Wonoasri. Daya tarik wisata tersebut adalah kolam pemandian Kedung Prahu. Kedung Prahu ini pada awalnya kedung (sungai yang dalam) biasa yang tidak menarik minat wisatawan. Oleh pengelola kedung tersebut ditata bebantuanya dan dibangun jembatan dari bambu dan kayu. Pengelola menambahkan

fasilitas dalam kedung tersebut dengan ban dalam mobil sebagai pelampung. Akhirnya banyak wisatawan yang tertarik untuk mandi di Kedung Prahu tersebut.

Pembangunan fasilitas lain di zona pendukung ini adalah pemasangan papan informasi wisata berupa tulisan unik dan menarik. Papan tersebut selain memberikan informasi tentang daya tarik wisata yang ada juga memberikan ajakan kepada wisatawan yang berkunjung untuk ikut peduli menjaga kelestarian Air Terjun Wonoasri. Selain itu juga terdapat area lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan *outbond*. Di area *outbond* ini banyak ditanami pohon cengkeh, durian dan kopi. Pohon cengkeh dan durian adalah komoditi utama masyarakat Desa Bangun sehingga selain sebagai area bermain, lahan *outbond* tersebut digunakan sebagai lahan edukasi tentang tanaman cengkeh dan durian.

Zona yang ketiga adalah zona perekonomian. Yang dimaksud zona perekonomian ini oleh Pokja Dusun Rampal adalah wilayah paling luar di kawasan air terjun yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha masyarakat. Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha masyarakat tersebut berupa lahan parkir dan lahan untuk warung makan. Lahan yang ada merupakan lahan goplah (lahan hutan yang dimiliki masyarakat) yang untuk kepentingan bersama dialih fungsikan untuk kegiatan pariwisata. Segala aktivitas jasa jual beli dilakukan di zona perekonomian ini sehingga ketika wisatawan sudah masuk ke dalam, tidak dapat melakukan aktivitas jual beli kecuali jasa penyewaan ban pelampung. Dengan adanya zona

perekonomian ini, kendaraan wisatawan dapat tertata dan penjagaan yang dilakukan lebih mudah. Selain itu, limbah hasil warung makan dapat dikontrol dengan baik dan tidak sampai mencemari air terjun dan alam di sekitar Air Terjun Wonoasri.

Melalui sistem zonasi tersebut, alur perjalanan wisatawan juga lebih jelas. Dimulai mereka parkir kendaraan, kemudian menikmati daya tarik wisata pendukung dulu dan terakhir menikmati daya tarik utamanya berupa Air Terjun Wonoasri. Ketika mereka kembali setelah menikmati daya tarik pendukung maupun utama, mereka dapat menikmati kuliner yang telah disediakan di warung makan. Dari pembagian zonasi yang dilakukan, pengelola telah menata lokasi daya tarik wisata yang ada dengan baik. Tentunya penataan lokasi ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Masih banyak peluang-peluang usaha yang bisa dimunculkan dan daya tarik wisata terus ditingkatkan kualitas pelayanannya serta daya tarik utamanya berupa Air Terjun Wonoasri perlu dijaga daya dukung lingkungannya agar menghindari dampak negatif yang muncul.

Daya dukung lingkungan dalam pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri harus diperhatikan oleh Pokja Dusun Rampal. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian Daya Dukung Lingkungan hidup menurut Undang-Undang tersebut adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Pokja Dusun Rampal dengan menerapkan zonasi di wilayah Air Terjun Wonoasri secara tidak langsung juga mulai memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada. Dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, maka keseimbangan alam Air Terjun Wonoasri yang digunakan untuk kegiatan pariwisata dapat tetap terjaga. Berdasarkan data yang ada, peneliti melihat penerapan daya dukung lingkungan yang dilakukan oleh pengelola mencakup daya dukung sumber daya dalam dan daya dukung populasi wisatawan yang berkunjung.

Penerapan daya dukung sumberdaya alam yang dilakukan oleh Pokja Dusun Rampal dapat dilihat dari pengaturan zonasi yang dilakukan pengelola. Zona inti yang terletak di tengah hutan, dalam pembangunan fasilitasnya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Pemanfaatan bahan ramah lingkungan tersebut menggunakan kayu pohon kelapa yang memang pohonnya sudah tua dan membahayakan bagi pengunjung apabila sewaktu-waktu dapat tumbang. Setelah melakukan penebangan, pengelola menanam kembali dengan pohon baru seperti pohon cengkeh dan pohon kopi. Selain itu, rumput dan semak belukar yang pada awalnya tumbuh di sepanjang jalan dialih fungsikan dengan tanaman bunga.

Pembangunan fasilitas yang dilakukan juga meminimalisir penggunaan bahan material yang permanen seperti beton dan semen. Tempat duduk dan fasilitas ruang ganti menggunakan kayu sehingga kesan kealamiannya tetap ada. Dalam pembangunan fasilitas pengelola selalu melibatkan LMDH Desa Bangun. Dengan adanya pelibatan LMDH tersebut, menghindarkan dari konflik kepentingan antar kelompok masyarakat. Melalui perhatian daya dukung lingkungan alam tersebut, maka keberlanjutan daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri dapat terjaga.

Penerapan daya dukung populasi wisatawan yang berkunjung untuk saat ini belum dilaksanakan oleh Pokja Dusun Rampal. Hal ini dikarenakan wisatawan yang berkunjung ke Air Terjun Wonoasri masih wisatawan lokal sekitar Kecamatan Munjungan. Adapun wisatawan dari luar Kecamatan Munjungan jumlahnya masih sedikit karena kendala akses jalan yang ekstrim dan sulit. Tetapi secara tidak langsung, dengan adanya zona perekonomian sebenarnya sebagai bentuk upaya menata wisatawan. Dengan adanya parkir yang terpusat di penitipan sepeda motor yang disediakan pengelola, maka pengumpulan masa lebih mudah dikondisikan.

Meskipun saat ini daya dukung populasi wisatawan belum menjadi prioritas pengelola, hal tersebut patut diantisipasi. Desa Wisata Bangun dengan daya tarik utamanya Air Terjun Wonoasri diprediksi bakal ramai dikunjungi wisatawan seiring berkembangnya waktu. Ketika pengerjaan Jalan Lintas Selatan sudah rampung, maka akses menuju Desa Wisata

Bangun akan sangat mudah sehingga pasti banyak wisatawan dari berbagai daerah yang datang. Oleh karena itu, aturan tentang daya dukung populasi wisatawan juga harus mulai dipersiapkan agar ketika nanti wisatawan sudah mulai banyak yang berdatangan, pengelola sudah memiliki aturan yang jelas tentang daya dukung populasi wisatawan.

Berdasarkan pembahasan di atas, pengelolaan daya tarik wisata berwawasan lingkungan dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.10 Penerapan daya tarik wisata berwawasan lingkungan

No.	Konsep	Bentuk	Penerapan
1.	Zonasi	1. Zona inti	1. Pembuatan rumah pohon 2. Penataan bebatuan tanpa menggunakan material semen 3. Pembangunan fasilitas ganti pakaian 4. Penanaman bunga
		5. Zona pendukung	1. Daya tarik wisata kedung perahu 2. Area outbond 3. Papan informasi pariwisata
		4. Zona ekonomi	1. Warung makan 2. Penitipan sepeda motor 3. Penyewaan pelampung
2.	Daya Dukung	1. Sumber daya alam	1. Pembangunan fasilitas ramah lingkungan 2. Minimalisir penggunaan material permanen 3. Tebang pilih dan penanaman kembali
		4. Populasi wisatawan	1. Lahan parkir untuk merapikan kendaraan pengunjung 2. Media HT untuk mempermudah komunikasi

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

Kesimpulan dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri sudah diarahkan ke pembangunan berwawasan lingkungan. Yang patut menjadi perhatian bahwa Pokja Dusun Rampal harus dapat terus konsisten melakukan pengelolaan lingkungan. Konsistensi tersebut diuji seiring semakin banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung. Inovasi dan kreatifitas harus terus digali agar wisatawan tidak mengalami kejenuhan dalam menikmati keindahan Air Terjun Wonoasri. Peraturan dalam menerapkan sistem zonasi dan daya dukung lingkungan yang telah diterapkan harus diaati bersama agar keberlanjutan daya tarik wisata dapat terjaga.

d. Terciptanya Kegiatan Usaha Masyarakat

Kegiatan usaha masyarakat di bidang kepariwisataan merupakan salah satu ranah penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi nilai manfaat sosial-ekonomi dari industri pariwisata bagi masyarakat sekitar destinasi. Oleh karena itu, peluang, kesempatan serta akses masyarakat terhadap penerimaan nilai manfaat sosial ekonomi dari industri pariwisata di sebuah destinasi harus dioptimalkan (Sunaryo, 2013:229).

Pada dasarnya, keterlibatan masyarakat Desa Bangun dalam usaha kepariwisataan, oleh peneliti didasarkan pada keterlibatan sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Menurut Sunaryo (2013:230) dalam upaya menciptakan kegiatan usaha masyarakat, prinsip yang harus diperhatikan adalah kualitas produk, lembaga usaha pariwisata dan promosi atau

pendistribusian. Berlatar belakang pada prinsip kegiatan usaha masyarakat yang dikemukakan oleh Sunaryo tersebut, peneliti membatasi objek kajian usaha masyarakat Desa Wisata Bangun berdasarkan ketiga prinsip tersebut.

Upaya peningkatan kualitas produk ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, produk souvenir, produk daya tarik wisata, produk akomodasi, kualitas makanan dan minuman yang dihasilkan oleh usaha-usaha kecil dan menengah dari masyarakat setempat (Sunaryo, 2013:230). Pengelolaan Air Terjun Wonoasri mulai memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat setempat. Kegiatan usaha masyarakat yang mulai tumbuh di Air Terjun Wonoasri adalah kegiatan usaha yang terkait dengan penyediaan makanan dan minuman atau warung makan, usaha penitipan sepeda motor dan usaha penyewaan pelampung.

Berhubung kegiatan usaha masyarakat ini mulai tumbuh, maka masyarakat belum memiliki standarisasi dalam memberikan kualitas pelayanannya. Pelatihan yang telah diikuti oleh pengelola masih pada materi tentang pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata. Kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata yang muncul saat ini menerapkan kualitas kearifan lokal masyarakat khas desa seperti “*suguh, gupuh, lungguh*” dalam menerima kunjungan wisatawan dan selalu ramah / tegur sapa terhadap wisatawan yang berkunjung. Masyarakat Desa Bangun memiliki budaya kearifan lokal dalam bersikap dan berperilaku yang

masih mereka lestarikan hingga saat ini. Meskipun mereka belum mendapatkan wawasan tentang bagaimana menerapkan kualitas SDM pariwisata dalam melayani wisatawan, tetapi perilaku kehidupan mereka sehari-hari secara alami mencerminkan bahwa masyarakat Desa Bangun memiliki kepekaan memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung dengan melakukan tegur sapa terhadap orang baru.

Kaitannya dengan produk daya tarik wisata, pengelola terus berbenah untuk membangun fasilitas dan mempercantik Air Terjun Wonoasri agar wisatawan semakin nyaman dalam mengunjungi air terjun tersebut. Terkait peluang usaha penarikan karcis masuk ke Air Terjun Wonoasri masih belum mereka terapkan karena mereka menyadari bahwa dengan fasilitas yang ada sekarang, masih belum layak untuk ditarik karcis/tiket masuk. Pengelola memanfaatkan peluang usaha lainnya selain tiket dalam bentuk penitipan sepeda motor dan penyewaan pelampung. Setiap motor yang masuk mereka kenakan biaya sebesar Rp. 2.000,- dan untuk penyewaan pelampung mereka kenakan biaya Rp. 5.000,- untuk pelampung kecil dan Rp. 10.000,- untuk pelampung besar. Jasa penitipan sepeda motor dan penyewaan pelampung dimanfaatkan pengelola sebagai bentuk usaha masyarakat yang keuntungannya mereka gunakan untuk penambahan fasilitas di daya tarik wisata yang ada.

Kaitannya dengan usaha makanan dan minuman, masyarakat mulai memanfaatkan keberadaan Air Terjun Wonoasri untuk membuka warung makan yang lahannya ditata dan disediakan oleh pengelola. Dalam segi

produk, mereka menjual berbagai jenis minuman dan makanan siap saji. Belum ada produk kuliner asli desa yang dijual kepada wisatawan. Alasan pengelola belum menjual produk khas desa dikarenakan rata-rata wisatawan yang berkunjung adalah orang satu Kecamatan Munjungan sehingga kuliner khas desa menjadi konsumsi mereka sehari-hari dan tidak ada nilai ketertarikannya bagi wisatawan yang datang. Walaupun kuliner khas desa belum dimunculkan, pengelola semestinya mempersiapkan kuliner lokalnya menjadi produk yang inovatif sehingga wisatawan dapat tertarik untuk menikmatinya.

Kaitannya dengan usaha akomodasi dan produk souvenir, di Desa Wisata Bangun belum muncul karena Desa Wisata Bangun ini tergolong desa wisata rintisan yang masih baru sehingga kebanyakan wisatawan adalah wisatawan lokal yang hanya singgah mengunjungi Air Terjun Wonoasri sebagai produk daya tarik utamanya. Dari situ usaha akomodasi dan usaha souvenir di Desa Wisata Bangun belum dapat berjalan. Meskipun belum dapat berjalan, Ladewi Bangun semestinya mempersiapkan usaha akomodasi dan souvenir tersebut sejak dini. Hal ini dikarenakan usaha akomodasi berupa penginapan warga atau lebih dikenal homestay merupakan salah satu usaha yang sangat berdampak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dan produk souvenir merupakan cinderamata yang dapat memberikan kenang-kenangan bahwa wisatawan pernah datang mengunjungi Desa Wisata Bangun. Dari kedua

produk tersebut, apabila dapat dimaksimalkan pelayannya, dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat Desa Bangun.

Dalam prinsip yang kedua adalah kesiapan lembaga usaha pariwisata. Lembaga usaha pariwisata menekankan pada keseluruhan program penguatan segenap usaha yang muncul di masyarakat akibat dari kegiatan pariwisata (Sunaryo, 2013:231). Ladewi Bangun telah memiliki struktur kepengurusan yang terkait dengan lembaga usaha masyarakat yaitu Pokja homestay, Pokja Kuliner dan Pokja Wirausaha Cinderamata. Ketiga Pokja tersebut sampai saat ini belum dapat berjalan dikarenakan prioritas yang pengelola sepakati bersama pada tahun pertama kepengurusan Ladewi Bangun ini adalah pembangunan daya tarik wisata.

Pengelola cenderung memusatkan programnya pada pengelolaan daya tarik wisata sehingga pokja lain yang seharusnya juga dapat berjalan masih belum mendapat perhatian. Langkah yang diambil oleh Ladewi Bangun tersebut pada satu sisi dapat mempercepat pembenahan maupun pembangunan daya tarik wisata biar semakin layak untuk dikunjungi wisatawan. Tetapi disisi lain fasilitas pendukung lainnya dalam sebuah desa wisata seperti akomodasi *homestay*, kuliner dan souvenir tidak mendapatkan perhatian. Dari hal tersebut menyebabkan usaha masyarakat yang seharusnya banyak tumbuh dalam sebuah desa wisata belum dapat berjalan sehingga masyarakat secara luas belum dapat menikmati nilai manfaat dari kegiatan pariwisata.

Dalam prinsip usaha masyarakat yang ketiga adalah promosi dan distribusi. Promosi dan distribusi menekankan pada program peningkatan kualitas promosi dan distribusi dari semua produk wisata yang dihasilkan oleh segenap usaha pariwisata setempat kepada pasar wisata yang ada (Sunaryo, 2013:231). Promosi dalam bentuk pendistribusian produk yang dilakukan oleh Ladewi Bangun masih menggunakan promosi melalui media sosial. Hal itupun masih belum terlalu intensif pengelola lakukan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan kepada pengelola untuk bagaimana mempromosikan produknya kepada wisatawan. Produk pariwisata yang difokuskan juga masih dalam bentuk daya tarik wisata sehingga bahan berupa produk penunjang lainnya belum dapat dipromosikan karena belum ada produk yang dimunculkan pengelola.

Promosi yang telah dilakukan sebagian besar melalui promosi dari mulut ke mulut sehingga nama Desa Wisata Bangun dengan daya tarik wisata utamanya Air Terjun Wonoasri masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat Trenggalek secara keseluruhan. Beberapa kali sebenarnya pengelola telah mengadakan *event* di Air Terjun Wonoasri dengan maksud mendongkrak kedatangan wisatawan. *Event* tersebut memang mampu mendongkrak kedatangan wisatawan, tetapi hanya sesaat.

Pengelola seharusnya melakukan inovasi dalam kegiatan promosi dan pendistribusian produk pariwisata dengan pembuatan paket wisata dan diperkenalkan kepada *travel agent* ataupun instansi sekolah yang ada. Tetapi hal tersebut juga harus diimbangi dengan menghidupkan produk

pariwisata lainnya sesuai dengan Pokja yang telah dibentuk. Dengan adanya semangat untuk mau bergerak bersama dan punya rasa tanggung jawab terhadap tugas Pokja yang telah disepakati, kedepan produk pariwisata di Desa Bangun dapat semakin variatif. Desa Wisata Bangun tidak hanya menonjolkan produk utamanya saja berupa Air Terjun Wonoasri, tetapi seluruh produk desa yang berpotensi harus dikembangkan secara bersama dan penuh tanggung jawab agar cita-cita menjadi sebuah desa wisata yang dapat mensejahterakan masyarakatnya dapat tercapai.

Terciptanya kegiatan usaha masyarakat lokal akibat dampak dari perintisan Desa Wisata Bangun melalui prioritas pengolahan daya tarik wisata secara ringkas dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.11 Kegiatan usaha masyarakat yang muncul dalam pengelolaan daya tarik wisata

No.	Prinsip usaha masyarakat	Penerapan
1.	Kualitas produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan belum ada standarisasi tetapi secara tidak langsung diterapkan masyarakat bangun melalui keramahannya kepada wisatawan 2. Produk usaha yang muncul berupa jasa penitipan sepeda motor dan penyewaan pelampung 3. Usaha kuliner masih menjual makanan dan minuman cepat saji, belum menjual kuliner lokal 4. Usaha produk pendukung seperti souvenir, dan akomodasi belum muncul
2.	Lembaga usaha pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya pokja yang mengurus usaha produk wisata seperti pokja kuliner, pokja wirausaha souvenir dan pokja homestay 2. Pokja yang mengurus usaha produk tersebut belum berjalan 3. Hanya terfokus pada pokja daya

		tarik wisata
3.	Promosi atau pendistribusian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi melalui mulut ke mulut 2. Penyelenggaraan event untuk mendongkrak jumlah kunjungan 3. Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi tetapi kurang intensif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

Secara keseluruhan dari kegiatan usaha masyarakat yang muncul, pengelola hanya memfokuskan kegiatan usaha di Air Terjun Wonoasri. Padahal Desa Bangun memiliki potensi produk usaha wisata yang banyak bisa dimunculkan mulai usaha souvenir, *homestay* maupun usaha kuliner lokal. Walaupun prioritas pembangunan diarahkan untuk pengelolaan daya tarik wisata, seharusnya produk usaha lainnya tetap dapat dimunculkan karena dalam sebuah desa wisata semua produk wisata dapat saling terkait satu sama lain. Dengan semakin banyaknya produk usaha yang dapat dimunculkan, maka memberikan banyak alternatif pilihan kepada wisatawan untuk menikmati sebuah produk desa wisata. Selain itu dengan semakin banyaknya produk yang muncul, maka semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam menikmati manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata yang ada di Desa Wisata Bangun.

2. Peran *Stakeholders* terkait dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan

Pembangunan kepariwisataan memerlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subjek untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sebuah pengelolaan daya tarik wisata. Pihak yang memiliki peran tersebut dinamakan *stakeholders* pariwisata. Menurut Freeman (1984) dalam Arida (2016)

stakeholders adalah sekumpulan kelompok atau individu yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Secara sederhana *stakeholders* dinyatakan sebagai para pihak yang terkait dengan sebuah *issue* dan pencapaian tujuan bersama. Dalam pembangunan kepariwisataan terdapat *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang memiliki peran sesuai kapasitasnya masing-masing.

Stakeholders atau pemangku kepentingan dalam pariwisata terdiri dari masyarakat, pemerintah dan swasta. Diantara pemangku kepentingan tersebut memiliki perannya masing-masing. Dalam konsep *Community Based Tourism*, masyarakat berperan sebagai pelaku, tuan rumah, pelaksana/subjek pembangunan destinasi pariwisata. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan dalam pembangunan destinasi pariwisata. Sedangkan swasta berperan sebagai pengembang atau investor dalam pembangunan destinasi pariwisata. Dalam tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governace*), hubungan antara pemangku kepentingan tersebut harus berjalan secara setara dan seimbang sehingga pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan baik (Sunaryo, 2013:217).

a. Peran Masyarakat sebagai pelaku pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pentingnya peran masyarakat atau komunitas lokal dalam pembangunan kepariwisataan digaris bawahi oleh Wearing dalam Sunaryo (2013:218) yang menegaskan bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang suatu industri pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal. Oleh karena itu, untuk

memastikan bahwa pengembangan pariwisata dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka yang harus diwujudkan adalah memfasilitasi keterlibatan peran yang luas dari masyarakat atau komunitas lokal. Peran tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebagai bentuk proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat.

Masyarakat Desa Wisata Bangun dalam pengelolaan daya tarik wisata memiliki peran yang sangat besar. Masyarakat Desa Bangun sebagai subjek atau pelaku telah memberikan kontribusi yang nyata untuk merintis sebuah desa wisata. Dimulai dari Desa Bangun yang sama sekali tidak dilirik sebagai destinasi wisata sampai saat ini telah menjadi desa wisata rintisan yang memiliki daya tarik wisata utama Air Terjun Wonoasri yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Desa Wisata Bangun bisa menjadi seperti saat ini karena andil besar dari masyarakatnya yang memiliki inisiatif, kesadaran dan semangat untuk memajukan desanya melalui sektor pariwisata.

Pelibatan peran masyarakat oleh Sunaryo (2013:222) diklasifikasikan dalam perencanaan, implementasi atau pelaksanaan dan monitoring atau evaluasi. Masyarakat Desa Bangun melalui wadahnya berupa Ladewi Bangun dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata sedang melalui proses tahapan tersebut. Oleh karena itu peneliti membatasi kajian peran masyarakat Desa Bangun dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan dengan merujuk pada peran masyarakat dalam

perencanaan, peran masyarakat dalam pelaksanaan dan peran masyarakat dalam evaluasi.

Pada tahap perencanaan, Sunaryo (2013) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal terutama berkaitan dengan identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, analisis dan peramalan terhadap kondisi lingkungan di masa mendatang, pengembangan alternatif rencana dan fasilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang berkaitan dengan identifikasi masalah atau persoalan oleh masyarakat Desa Bangun diaplikasikan dengan tumbuhnya bentuk kesadaran bersama oleh beberapa sekelompok masyarakat yang menyadari bahwa Desa Bangun memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata. Walaupun Desa Bangun tergolong desa yang pelosok, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki Desa Bangun dan terbukanya akses Jalan Lintas Selatan, Desa Bangun akan menjadi desa yang maju dikemudian hari. Keyakinan tersebut akhirnya menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat untuk menangkap peluang memajukan Desa Bangun melalui bentuk desa wisata.

Berkaitan dengan identifikasi potensi pengembangan, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangun adalah mewadahi kesadaran bersama yang muncul di masyarakat dengan membentuk Ladewi Bangun. Setelah terbentuknya Ladewi Bangun, bersama komponen masyarakat lainnya yaitu Karang Taruna, LMDH dan tokoh masyarakat melakukan

pemetaan potensi wisata yang dimiliki Desa Bangun. Setelah terpetakannya potensi wisata tersebut, masyarakat bersepakat untuk melakukan prioritas pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri sebagai daya tarik utama yang dapat menarik kunjungan wisatawan.

Berkaitan dengan analisis lingkungan di masa yang akan datang dan pengembangan alternatif potensi, masyarakat berhati-hati melakukan pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri dengan melakukan sistem zonasi terhadap air terjun. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak kerusakan hutan Bangun akibat dari kegiatan pariwisata dan dilakukan atas arahan dari LMDH. Program prioritas yang ditujukan ke Air Terjun Wonoasri ini juga bertujuan agar pembangunan lebih fokus. Apabila wisatawan telah mengalami kejenuhan dalam berkunjung, masyarakat dapat membuka lagi potensi wisata lainnya yang telah dipetakan sebelumnya oleh mereka.

Pada tahap pelaksanaan, Sunaryo (2013) menjelaskan bentuk keterlibatan peran masyarakat terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan/pembangunan, pengelolaan objek atau usaha yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan. Komponen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun terdiri dari Ladewi Bangun, Karang Taruna dan LMDH yang memiliki porsi masing-masing dalam melakukan tugasnya.

Masing-masing kelompok masyarakat Desa Bangun berkordinasi saling mengisi dan melengkapi perannya. Ladewi Bangun dengan Pokja

yang ada di bawahnya yaitu Pokja Dusun Rampal melaksanakan program prioritas pengelolaan Air Terjun Wonoasri. Karang Taruna sebagai mitra Ladewi Bangun melaksanakan tugasnya dalam bentuk promosi ke desa lain dan menciptakan *event* yang dapat menghidupkan kegiatan pariwisata seperti kegiatan peresmian Tari Gandhong dan ikut membantu Pokja Dusun Rampal untuk menyelenggarakan peresmian Air Terjun Wonoasri. LMDH sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengelola hutan desa bermitra dengan Ladewi Bangun sebagai penyambung komunikasi dengan Perhutani untuk melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan. Selain itu, LMDH juga terlibat aktif mengarahkan pengelolaan Air Terjun Wonoasri agar tidak merusak lingkungan hutan yang ada.

Pada tahap evaluasi, Sunaryo (2013) menjelaskan bentuk partisipasi terwujud dalam peran dan posisi masyarakat dalam tahap evaluasi serta memperoleh nilai manfaat secara ekonomi maupun sosial budaya, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Munculnya kegiatan usaha masyarakat merupakan bentuk manfaat secara ekonomi yang mulai muncul ditandai dengan adanya warung makan dan jasa penitipan sepeda motor. Meskipun nilai manfaat dalam hal pendapatan yang diterima masih kecil, tetapi hal tersebut menjadikan motivasi bagi masyarakat lainnya untuk ikut terlibat menikmati hasil dari aktivitas pariwisata.

Secara sosial budaya, peran masyarakat dalam menangkap peluang kegiatan pariwisata di Desa Wisata Bangun memberikan manfaat pada

sektor budaya dengan dimunculkannya kembali kearifan lokal masyarakat Desa Bangun berupa kesenian Tari Gandhong. Secara sosial, Desa Bangun yang tergolong desa pelosok semenjak adanya aktifitas pariwisata yang dimunculkan oleh masyarakat menjadikan Desa Bangun ramai dikunjungi oleh orang luar desa dan suasana desa menjadi lebih hidup.

Tahap perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Ladewi Bangun dalam pengelolaan daya tarik wisata diimbangi dengan aktivitas evaluasi. Evaluasi ini dalam budaya sehari-hari masyarakat Desa Bangun telah mendarah daging dalam kegiatan bernama musyawarah desa atau rembug desa. Tradisi ini selalu masyarakat gunakan ketikan akan menyelenggarakan kegiatan dan setelah menyelenggarakan kegiatan. Begitupun dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata, masyarakat mengadakan evaluasi rutin setiap bulan sekali dengan menamakan “*rembug wulanan*”.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti meringkas peran masyarakat melalui tabel di bawah ini.

Tabel. 4.12 Peran masyarakat desa Bangun sebagai subjek

No.	Peran	Penerapan di lapangan
1.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyadaran kolektif masyarakat - Pembentukan wadah Ladewi Bangun - Pemetaan potensi wisata - Pembentukan program prioritas pengelolaan air terjun wonoasri - Pembentukan Pokja dusun Rampal
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja bakti bersama antar kelompok masyarakat - Pembagian peran sesuai porsi masing-masing - Pembangunan fasilitas pendukung daya tarik wisata - Pelatihan Sumber Daya Manusia
3.	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Munculnya nilai manfaat ekonomi bagi

		masyarakat - Koordinasi antar kelompok masyarakat - Pertemuan rutin setiap bulan sekali untuk evaluasi pelaksanaan program
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

Masyarakat memiliki peran besar dalam melakukan perintisan desa wisata dan pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi masyarakat selalu terlibat sesuai tugas dan porsinya masing-masing.

Perjalanan masyarakat dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata berjalan lambat. Hal ini dibuktikan selama munculnya proses perencanaan dari Tahun 2015 sampai tahap evaluasi saat ini mereka masih berfokus pada satu daya tarik wisata. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembangunan yang murni menggunakan pendekatan masyarakat sebagai subjek yang harus mengakomodir ide dan kebijakan dari banyak pihak masyarakat sehingga penentuan keputusannya menjadi lama. Oleh karena itu, masyarakat perlu membentuk sistem pengambilan keputusan yang lebih efisien dan lebih terarah agar pengelolaan daya tarik wisata dapat berjalan lebih cepat dan manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata dapat merata dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Wisata Bangun.

b. Peran Pemerintah sebagai fasilitator pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pembangunan pariwisata tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Setelah terjadinya reformasi, pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang pasal 1 ayat 5, menyebutkan bahwa adanya otonomi

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke masing-masing daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) diharapkan dapat menjadikan daerah otonom yang bersangkutan untuk lebih maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Salah satu sektor potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah adalah sektor pariwisata. Pembangunan di bidang pariwisata merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pembangunan pariwisata daerah menurut Arsyad (2004:298) adalah suatu proses saat Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumber daya pariwisata yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan pariwisata (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan pariwisata berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan pariwisata yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan pariwisata di daerah. Peran pemerintah sebagai fasilitator menurut Arsyad (2004:312) diartikan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator untuk mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya, menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan pada Sumber Daya Manusia di tingkat lokal. Dari pengertian tersebut maka peneliti membatasi kajian peran pemerintah sebagai fasilitator di Desa Wisata Bangun dalam pengelolaan daya tarik wisata melalui aspek penyusunan rencana startegis dalam mendukung pariwisata, penetapan kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Kaitannya dengan aspek penyusunan rencana startegis dalam mendukung pariwisata di Desa Wisata Bangun, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 yang di dalamnya terdapat delapan program prioritas kewilayahan. Salah satu diantara delapan program prioritas tersebut adalah program pengembangan desa wisata. Program tersebut diperkuat dengan program unggulan sektor pariwisata yaitu pemenuhan sarana dan prasarana di destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat sadar wisata, eksplorasi destinasi wisata baru dan penataan perencanaan pariwisata dalam bentuk RIPPDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah).

Rencana startegis dalam bidang pariwisata tersebut yang mulai dikerjakan dan bakal berdampak positif terhadap perintisan desa wisata

adalah pemenuhan sarana dan prasarana dalam bentuk pembangunan Jalan Lintas Selatan yang melewati Desa Wisata Bangun. Dengan adanya JLS tersebut, maka akses menuju lokasi Desa Wisata Bangun akan semakin mudah dijangkau oleh wisatawan. Pemberdayaan masyarakat sadar wisata juga gencar dilakukan dengan melibatkan Ladewi Bangun dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi kepariwisataan baik yang dilakukan di tingkat kabupaten maupun mengundang Ladewi Bangun untuk mengikuti kegiatan tersebut di tingkat provinsi.

Eksplorasi destinasi wisata baru juga telah dilakukan oleh Disparbud dengan mengunjungi Desa Wisata Bangun untuk melihat potensi wisata yang dimiliki. Dari situ Disparbud juga mendukung program prioritas yang dikerjakan oleh Ladewi Bangun melalui Pokja Dusun Rampal untuk mengelola daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri. Dengan melihat antusias masyarakat Desa Bangun, akhirnya Disparbud memasukan Desa Bangun sebagai salah satu desa wisata rintisan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Kaitannya dengan penentuan kebijakan, Desa Wisata Bangun resmi menjadi desa wisata rintisan yang dibina oleh Disparbud Kabupaten Trenggalek dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek nomor: 556/147/35.03.025/2017. Surat tersebut berisi tentang pengukuhan Kelompok Sadar Wisata “Dewi Bangun” atau Ladewi Bangun dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau

pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Bangun. Melalui kebijakan tersebut dapat menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona.

Pemerintah Desa Bangun dalam melakukan penentuan kebijakan juga memiliki peran yang besar. Pembentukan Ladewi Bangun merupakan hasil dari fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengakomodir ide dan gagasan dari seluruh kelompok masyarakat yang ada di Desa Bangun. Fasilitasi yang dilakukan pemerintah desa melalui musyawarah bersama dalam penentuan ketua dan bentuk lembaga yang tepat dan fasilitasi dalam menyikapi masalah yang muncul dalam perjalanannya mengelola daya tarik wisata. Dari peran yang dilakukan tersebut, masyarakat dalam perjalanannya melakukan pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun selalu mendapat dukungan kebijakan baik dari Disparbud Kabupaten Trenggalek maupun dari Pemerintah Desa Bangun.

Kaitannya dengan pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata, pemerintah memiliki peran untuk meningkatkan pengetahuan dan *skill* masyarakat Desa Wisata Bangun dalam mengelola daya tarik wisata yang ada. Peran Disparbud Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pembinaan yaitu melalui diputuskannya Ladewi Bangun melalui surat keputusan menjadi kelompok sadar wisata binaan Disparbud Kabupaten Trenggalek. Pembinaan yang dilakukan melalui bentuk

pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwisataan kepada masyarakat Desa Bangun.

Tidak hanya memberikan pembinaan secara langsung, Disparbud juga melibatkan Ladewi Bangun dalam kegiatan berskala provinsi. Dengan adanya kemitraan yang dibangun antara Disparbud dengan Asidewi Trenggalek, program pembinaan juga semakin intensif dilakukan. Asidewi Trenggalek sebagai mitra Disparbud rutin melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kepariwisataan dan ikut mengarahkan masyarakat Desa Bangun mengelola daya tarik wisata sesuai dengan kaidah pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Desa Bangun juga memiliki perannya dalam melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia. Meskipun dukungan pembinaan dalam bentuk mengadakan pelatihan belum dilakukan, tetapi Pemerintah Desa Bangun yang menjadi fasilitator ketika terjadi ketidaksepahaman kelompok masyarakat dalam mengelola daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk dukungan moral dan menjadi penengah ketika ada permasalahan yang terjadi sehingga keharmonisan Ladewi Bangun dengan kelompok masyarakat lainnya dapat terjaga.

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan daya tarik wisata secara ringkas dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Tabel. 4.13 Peran pemerintah sebagai fasilitator

No.	Klasifikasi peran	Bentuk program
1.	Penyusunan rencana startegis	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan RPJMD tahun 2016-2021 - Program prioritas kewilayahan tentang pengembangan desa wisata - Program unggulan sektor pariwisata dalam bentuk pembangunan sarana prasarana Jalan Lintas Selatan - Eksplorasi destinasi wisata oleh Disparbud di desa wisata Bangun
2.	Penentuan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Ladewi bangun yang difasilitasi oleh pemerintah desa Bangun - Pembuatan surat keputusan Ladewi Bangun oleh Diparbud - Diakuinya desa wisata Bangun sebagai desa wisata rintisan oleh Disparbud
3.	Pembinaan SDM Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat desa Bangun - Pelatihan peningkatan <i>skill</i> masyarakat desa bangun tentang kepariwisataan - Kemitraan Disparbud dengan Asidewi Trenggalek untuk melakukan program pendampingan secara rutin

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan tabel tersebut, pemerintah memiliki peran strategis sebagai fasilitator. Peran yang dilakukan pada kenyataannya kebanyakan masih pada program satu kali aksi. Program tersebut seharusnya dapat terus berkelanjutan sehingga semangat masyarakat dapat terus terpupuk dan kemampuan masyarakat dalam mengelola daya tarik wisata dapat terus meningkat sehingga Desa Wisata Bangun pengelolaannya dapat terus berkelanjutan.

c. Peran Swasta sebagai pengembang / investor dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Menurut Sunaryo (2017:217) menjelaskan bahwa *stakeholders* pariwisata dalam bentuk pihak swasta memiliki peranan penting dalam pembangunan destinasi wisata. Pihak swasta sebagai pelaku bisnis mempunyai peran dalam menyediakan sarana pendukung pariwisata. Kepariwisataaan membutuhkan banyak sarana pendukung seperti restoran, akomodasi, biro perjalanan, transportasi, dan lain-lain.

Pihak swasta dalam pengembangan destinasi wisata berperan sebagai pendorong pembangunan pariwisata, pengembang destinasi wisata dan sebagai penyumbang kontribusi dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*. Peran tersebut apabila dapat diterapkan dalam sebuah destinasi wisata akan mempercepat pembangunan yang ada di destinasi tersebut (Arida, 2016:119). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti membatasi kajiannya pada peran swasta sebagai pendorong pembangunan, peran swasta sebagai pengembang dan peran swasta sebagai penyumbang kontribusi berbasis CSR.

Terkait pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan destinasi wisata mempunyai beberapa alasan, yang pertama adalah sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah dan masyarakat lokal yaitu perihal anggaran modal. Yang kedua, adalah keterlibatan swasta bisa meningkatkan transparansi dan peningkatan kualitas destinasi wisata. Peran swasta dalam menyediakan

modal bagi pembangunan pariwisata berdampak pada dikuasainya *asset* milik masyarakat lokal ataupun pihak swasta berbagi kepemilikan *asset* dengan masyarakat lokal terhadap daya tarik wisata yang ada. Akhirnya masyarakat lokal bukan pemilik tunggal terhadap destinasi wisata yang ada di sekitar mereka.

Pengelolaan daya tarik wisata yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Wisata Bangun seperti yang dijelaskan oleh peneliti pada subbab partisipasi masyarakat lokal menggunakan pendekatan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (CBT). Mereka yang menginisiasi sampai pada akhirnya menumbuhkan kesadaran bersama untuk mengelola daya tarik wisata yang ada. Dikarenakan pembangunan pariwisata yang ada di Desa Wisata Bangun bersumber dari masyarakat, maka masyarakat lokal memiliki *power* untuk tidak berkompromi dengan pihak swasta dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata di sana.

Peran swasta yang terjadi dalam pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun lebih memposisikan sebagai pendorong dalam bentuk pemberian dana hibah. Pihak swasta yang memberikan dorongan bersumber dari pengusaha lokal yang memiliki kepedulian untuk berpartisipasi memajukan desanya melalui sektor pariwisata. Dana hibah yang diberikan pun bersifat tidak mengikat sehingga tidak ada unsur kepentingan dengan pihak swasta tersebut.

Masih kecilnya peran swasta dalam pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun juga disebabkan oleh letak geografis Desa Bangun

yang merupakan desa pelosok dengan kondisi akses jalan yang masih sulit akibat belum rampungnya pengerjaan Jalan Lintas Selatan. Selain itu, Desa Wisata Bangun Masih dalam tahap desa wisata rintisan yang wisatawannya masih bersifat lokal sekitar wilayah Kecamatan Munjungan sehingga bisa dikatakan untuk saat ini pihak investor kalaupun ada perlu berpikir untuk investasi di sana.

Peran pihak swasta sebagai pengembang daya tarik wisata belum ada di Desa Wisata Bangun. Hal ini dikarenakan pengelolaan daya tarik wisata yang ada saat ini dipegang penuh oleh masyarakat lokal melalui wadah Ladewi Bangun. Konsekuensi yang muncul karena tidak adanya pihak swasta sebagai pengembang atau penanam modal, maka pembangunan yang dilakukan menjadi berjalan lambat. Hal ini disebabkan Ladewi Bangun dalam memulai pengelolaan berangkat dari titik nol dan hanya memiliki semangat gotong royong antar warga masyarakatnya. Tetapi hal tersebut memberikan manfaat meskipun perkembangannya berjalan lambat, mereka tetap menjadi tuan di rumah mereka sendiri.

Peran swasta sebagai penyumbang kontribusi berbasis CSR juga belum terealisasi di Desa Wisata Bangun. Alasannya Desa Wisata Bangun ini pengelolaannya masih sekitar satu tahun sehingga masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Ladewi Bangun dan seluruh masyarakat Desa Bangun untuk mewujudkan desa wisata yang mandiri. Selain itu, faktor kesiapan pengelolanya juga menjadi perhatian. Di dalam tubuh Ladewi Bangun masih terdapat ketidaksepahaman antar individu

dan belum berjalannya fungsi semua Pokja sehingga mempengaruhi kinerja Ladewi Bangun dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata. Hal tersebut juga pasti menjadi pertimbangan pihak swasta sampai saat ini belum adanya kontribusi CSR yang diberikan untuk membantu pengembangan Desa Wisata Bangun dan pengelolaan daya tarik wisata yang ada di dalamnya.

Peran swasta sebagai investor dalam pengelolaan daya tarik wisata dijelaskan secara ringkas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.14 Peran swasta sebagai investor

No.	Bentuk dukungan	Realisasi
1.	Pendorong pembangunan pariwisata	- Pemberian dana hibah oleh pengusaha lokal - Sumbangan yang tidak mengikat untuk pembuatan fasilitas pendukung
2.	Pengembang destinasi wisata	- Belum ada realisasi
3.	Penyumbang kontribusi berbasis CSR	- Belum ada realisasi

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa peran swasta dalam pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun masih kecil. Hal ini disebabkan karena kontribusi masyarakat lokal yang besar karena telah adanya kesadaran kolektif bersama sehingga kesempatan untuk investor menjadi kecil.

Masyarakat hanya menerima bentuk dukungan investasi dalam bentuk sumbangan yang tidak mengikat. Di satu sisi hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pengaruh masyarakat besar dalam pengelolaan daya tarik wisata yang ada. Tetapi disisi lain perkembangan pengelolaan yang ada

akan berjalan lambat karena bertumpu pada ide dan gagasan masyarakat yang memiliki banyak kepala dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, masyarakat desa wisata bangun dalam segi tertentu seharusnya mau terbuka untuk menerima swasta dengan pertimbangan tetap menguntungkan pihak masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Penerapan Konsep *Community Based Tourism* dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata berkelanjutan (Study Pada Desa Wisata Bangun Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)” yang dikaji sesuai hasil di lapangan dan pembahasan terhadap fokus permasalahan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Konsep *Community Based Tourism* dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan

Desa Wisata Bangun merupakan desa wisata rintisan yang masuk dalam kategori desa wisata berpotensi yang masyarakatnya memiliki antusias tinggi dalam mengelola daya tarik wisata yang ada di dalamnya. Konsep CBT yang diterapkan untuk mencapai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan diaplikasikan dalam bentuk partisipasi masyarakat lokal, pembentukan kelembagaan desa wisata, pengelolaan daya tarik wisata berwawasan lingkungan dan terciptanya kegiatan usaha masyarakat.

a) Partisipasi masyarakat lokal

Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun muncul dari inisiatif masyarakat lokal yang memiliki kesadaran bersama bahwa desanya memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan. Kesadaran kolektif tersebut menjadikan pengelolaan daya tarik wisata muncul melalui

partisipasi masyarakat lokal. Masyarakat atas inisiatif sendiri melakukan kerjabakti yang diikuti oleh seluruh kelompok masyarakat Desa Bangun. Mereka menyadari pengetahuan tentang kepariwisataan masih kurang. Pada akhirnya mereka melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dengan mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwisataan sehingga dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata sesuai dengan kaidah pariwisata berkelanjutan.

b) Pembentukan kelembagaan desa wisata

Masyarakat Desa Bangun yang telah memiliki kesadaran bersama membutuhkan wadah untuk menampung ide dan gagasan dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat yang tergabung dalam beberapa kelompok organisasi kepemudaan Desa Bangun menyetujui pembentukan Lembaga Desa Wisata (Ladewi) Bangun yang fokus mengelola seluruh daya tarik wisata yang kepengurusannya mengambil perwakilan seluruh kelompok masyarakat yang terlibat. Dalam melaksanakan tugasnya Ladewi Bangun tidak dapat bergerak sendiri, mereka menjalin kemitraan dengan Karang Taruna, LMDH, Disparbud Kabupaten Trenggalek dan Asidewi Trenggalek. Dengan banyaknya mitra yang dilibatkan, Ladewi Bangun banyak mendapatkan arahan, pengetahuan dan bantuan sehingga pengelolaan daya tarik wisata yang ada dapat terus berkelanjutan.

c) Pengelolaan daya tarik wisata berwawasan lingkungan

Ladewi Bangun memiliki program prioritas melakukan pengelolaan Air Terjun Wonoasri sebagai daya tarik wisata utama. Mereka membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Dusun Rampal untuk fokus mengelola daya tarik wisata tersebut. Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh Pokja Dusun Rampal dengan membagi wilayah Air Terjun Wonoasri dengan tiga zona yaitu zona perekonomian, zona daya tarik wisata pendukung dan zona inti sebagai daya tarik wisata utama. Dengan adanya pembagian zonasi ini, penataan lokasi menjadi lebih teratur dan memiliki fungsinya masing-masing. Pembangunan fasilitas yang ada di tiga zonasi tersebut memanfaatkan bahan ramah lingkungan sehingga kelestarian alam hutan sekitar Air Terjun Wonoasri dapat terus terjaga.

d) Terciptanya kegiatan usaha masyarakat

Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun mulai menciptakan kegiatan usaha masyarakat. Terutama dalam pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Wonoasri memunculkan kegiatan usaha dalam bentuk jasa usaha warung makan, jasa penitipan sepeda motor dan jasa penyewaan pelampung. Penghasilan yang didapatkan dari kegiatan ekonomi tersebut dikumpulkan untuk membangun fasilitas pendukung agar semakin menarik diminati oleh wisatawan. Dari segi kualitas produk usaha tersebut, masyarakat belum menerapkan standarisasi dikarenakan keterbatasan pengetahuan mereka. Meskipun belum memiliki standarisasi, dalam melakukan pelayanan mereka melakukan pelayanan khas kearifan lokal

dengan budaya “*suguh, gupuh, lungguh*”. Tetapi dengan keterbatasan pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha tersebut, masyarakat tetap semangat dan optimis bahwa dengan pengelolaan yang berkelanjutan lama kelamaan kegiatan usaha yang muncul juga akan semakin besar.

2. Peran *stakeholders* terkait dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan

Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun melibatkan seluruh *stakeholders* atau pemangku kepentingan pariwisata. *Stakeholders* terkait yang terlibat dalam pengelolaan daya tarik wisata terdiri dari kelompok masyarakat, pemerintah dan pihak swasta yang memiliki perannya masing-masing untuk menciptakan pengelolaan daya tarik wisata yang berkelanjutan.

a) Peran masyarakat sebagai pelaku pengelolaan daya tarik wisata

Pengelolaan daya tarik wisata bersumber dari inisiatif masyarakat Desa Bangun yang memiliki kesadaran terhadap potensi wisata yang dimiliki. Pengelolaan yang muncul dari inisiatif masyarakat, akhirnya masyarakat Desa Bangun memiliki *power* sebagai pelaku dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan daya tarik wisata sehingga pariwisata yang dari, oleh dan untuk masyarakat terwujud di Desa Wisata Bangun.

b) Peran pemerintah sebagai fasilitator pengelolaan daya tarik wisata

Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun bisa berjalan karena adanya andil peran dari pemerintah baik di tingkat pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai fasilitator. Peran

pemerintah Kabupaten Trenggalek yang ada dalam bentuk penyusunan rencana startegis yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang bermanfaat untuk mendukung program desa wisata yang digagas oleh masyarakat Desa Bangun. Peran Pemerintah Desa Bangun yang ada dalam bentuk memberikan fasilitasi kepada kelompok masyarakat dalam pembentukan Ladewi Bangun dan menjadi penengah ketika terjadi ketidak harmonisan antar pengurus lembaga maupun kelompok masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun.

c) Peran swasta sebagai investor pengelolaan daya tarik wisata

Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun melibatkan pihak swasta sebagai investor dalam skala kecil. Perintisan desa wisata ini bersumber dari kesadaran masyarakat, maka peluang investor untuk menjadi pengelola sangat sulit. Hal ini juga dikarenakan masyarakat memiliki tekad bahwa pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Bangun harus ditangani oleh masyarakat. Keterlibatan swasta yang terjadi dalam bentuk pemberian dana hibah oleh sekelompok pengusaha yang tidak mengikat karena sebagai bentuk kepedulian mereka untuk memajukan desa bangun dalam sektor pariwisata.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, maka berikut ini merupakan saran dari peneliti antara lain:

1. Penerapan CBT agar pengelolaan daya tarik wisata dapat terus berkelanjutan

- a) Memperjelas tugas masing-masing pengurus yang tergabung dalam Ladewi Bangun dalam bentuk panduan teknis sehingga fungsi kepengurusan dapat berjalan semua sesuai tugasnya masing-masing.
- b) Kemitraan yang dibangun oleh Ladewi Bangun dengan kelompok masyarakat lainnya seharusnya dapat diperjelas dalam bentuk kesepakatan tertulis untuk menghindari konflik dikemudian hari apabila sudah terdapat pemasukan besar dari aktifitas pariwisata yang ada.
- c) Orientasi masyarakat yang selama ini dalam bentuk pengabdian dan gotong royong seharusnya mulai diarahkan ke orientasi bisnis agar mereka mendapatkan nilai manfaat ekonomi yang lebih besar dalam pengelolaan daya tarik wisata yang ada.
- d) Pembuatan konsep perencanaan pengelolaan secara tertulis dan disepakati bersama agar target yang dicapai jelas, pelaksanaan di lapangan mudah karena sudah tahu apa yang harus diperbuat dan evaluasinya dapat terukur.
- e) Pembuatan kode etik atau peraturan secara tertulis yang disepakati bersama terhadap fungsi hutan yang digunakan untuk kegiatan pariwisata sehingga kelestarian alam di Desa Wisata Bangun dapat terjaga.
- f) Pertemuan rutin yang telah diagendakan satu bulan sekali seharusnya terus dilakukan agar kordinasi antar pengurus Ladewi Bangun maupun dengan kelompok masyarakat lain dapat terus terjalin dengan baik.
- g) Menambahkan unsur edukasi di daya tarik wisata yang dikelola agar wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alamnya tetapi juga

mendapatkan pengetahuan baru ketika berkunjung ke Desa Wisata Bangun.

2. Peran *stakeholders* terkait

- a) Ketidakharmonisan hubungan yang muncul antar pengurus Ladewi Bangun seharusnya segera diselesaikan dengan keterbukaan masing-masing pihak agar tidak menghambat proses pengelolaan daya tarik wisata.
- b) Pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan dan sosialisasi dalam bentuk *ceremonial* program, tetapi seharusnya ada pendampingan rutin yang dilakukan ke Desa Wisata Bangun untuk mengevaluasi sejauh mana pelatihan maupun sosialisasi yang diberikan dapat berjalan efektif dan sesuai sasaran.
- c) Peran swasta dalam aspek makro yang dapat menciptakan iklim pariwisata di Desa Wisata Bangun menjadi alternatif yang dapat diterapkan sebagai bentuk stimulasi agar pengelolaan daya tarik wisata dapat berjalan cepat, tetapi harus dibarengi dengan dukungan dan kesiapan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU REFERENSI

- Achmadi, Mochamad dan Agie, R Muhamad wahyu. 2016. *“Analisis Sikap dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Desa Wisata”*. Jakarta: STP Trisakti.
- Arida, Nyoman Sukma. 2016. *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali*. Bali: Pustaka Larasan.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFPE.
- Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauzi.A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Freeman, R. Edward. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Gartner, W. C. 1996. *Tourism Development: Principles, Processes and Policies*, New York: John Wile.
- Hastosaptyandhan, R. Restama Gustar. 2016. *“Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Bogor: ITB.

- Hermantoro, Hengky. 2011. *Creative-Based Tourism Dari Wisata Kreatif Menuju Wisata Kreatif*. Yogyakarta: Galangpress.
- Kusmayadi dan Sugiarto, Endar. 2000. *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisataaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roskadarya.
- Nugroho, Iwan. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pariwisata. 2016. *Panduan pembentukan desa wisata*. Jakarta: Kemenpar.
- Pitana, I G. D, Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Purmada, Dimas Kurnia, dkk. 2016. “*Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*”. Malang: FIA UB.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suansri, P. 2003. *Comunity Based Tourism Handbook*. Bangkok, Thailand: Responsible Ecological Social Tours (REST) Project.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yoeti, A Oka. 1982. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Yuwono, Andi. 2015. “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar*”. Surabaya: UBAYA.
- Purmada, Dimas Kurnia, dkk. 2016. “*Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*”.

INTERNET

- <http://m.liputan6.com/lifestyle/read/2675604/sambut-target-15-ribu-dengan-10-ribu-homestay-desa-wisata> diakses tanggal 29 Januari 2017 pukul 13.25 WIB.
- <http://setkab.go.id/resmi-wisatawan-dari-45-negara-ini-bebas-visa-kunjungan-wisata-ke-indonesia/> diakses tanggal 2 februari 2017 pukul 19.58 WIB.
- <https://rinakurniawati.files.wordpress.com/2013/01/modul-pariwisata-berkelanjutan.pdf> diakses tanggal 14 Februari 2017 pukul 15.30 WIB.

JURNAL

- Afiandi, Kurniyati, dan utomo. 2011. *Kajian Pembentukan Desa Wisata Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*.
- Banks, Sarah, *Community Based Participatory Research A Guide to Ethical Principles and Practice*, Center for Social Justice and Community Action, Durham University, UK. 2012.

- Craig-Smith and French, C. 1994, *Learning To Live With Tourism*, Melbourne.
- French. CN, Craig-Smith And A. Collier. 1995. *Principle Of Tourism*, Melbourne, Australia.
- Hermanto, Sugeng. 2016. *Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Pariwisata Di Wana Wisata Kawah Putih*. 7-28-1 SM. STP Bandung.
- Joanna Ochocka, *Community Based Research*, disampaikan dalam Advanced CBR Training yang diselenggarakan oleh SILE/LLD UIN Sunan Ampel Surabaya, di Hotel Singgasana Surabaya, 25-29 Agustus 2014.
- MacCannell. 1992. *Empty Meeting Grounds: the Tourist Paper*, London. New York.
- Octastefani, T, dkk. 2015. *Peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata*. JKMP, VOL. 3, Nomor 1, Yogyakarta.
- Prafitri, Gita Ratri. 2016. *Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata*. Jurnal Pengembangan Kota (JPK) volume 4 no. 1. Diakses melalui <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk> pada tanggal 25 Januari 2017.
- Santoso, J. 2009. *Potensi Pengembangan Objek Wisata Pantai Klayar Di Kabupaten Pacitan*. Diakses melalui <http://eprints.uns.ac.id> pada tanggal 10 Agustus 2017
- Seaton And Bennet. 1996. *The Marketing Tourist Product*, Cengage Learning. England.

KEBIJAKAN

Peraturan Menteri kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006, tentang Pedoman *Zonasi*
Taman Nasional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

